



**SALINAN**

## **GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**NOMOR 27 TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.

3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut DPKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah di Bidang Kearsipan Daerah.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
8. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
9. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
10. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
11. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
12. Klasifikasi arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
13. Klasifikasi keamanan arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
14. Klasifikasi akses arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
15. Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
16. Biasa/terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
17. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
18. Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap *privacy*, keuntungan *kompetitif*, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.

19. Sangat rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
20. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat di akses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
21. Penggunaan arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
22. Pengguna internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
23. Pengguna eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
24. Prosedur pengaksesan informasi publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
25. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi Badan Publik.

## Pasal 2

Pengaturan Sistem Klasifikasi Kemanan dan Akses Arsip Dinamis dimaksud untuk :

- a. mendorong unit-unit kerja agar memberkaskan arsip dinamis unit kerjanya secara tertib yang disertai dengan daftar arsip aktifnya;
- b. mendorong unit-unit kerja untuk mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
- c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga; dan
- d. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman pelaksanaan dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
- c. tersedianya informasi Pemerintah Daerah yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan lampiran klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan
- d. terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

## Pasal 4

Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis meliputi:

- a. klasifikasi keamanan arsip, memuat informasi biasa/terbuka, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
- b. pengamanan arsip, memuat pengamanan ruang simpan, penentuan pengelola arsip, serta daftar informasi terbatas, rahasia dan sangat rahasia; dan

- c. klasifikasi dan pengaturan akses arsip, memuat pengguna internal dan pengguna eksternal.

#### Pasal 5

- (1) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
- (3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta standar operasional prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

### BAB II

#### KETENTUAN DAN PROSEDUR

#### Pasal 6

- (1) Arsip dinamis dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia dan sangat rahasia.
- (2) Tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya.
- (3) Tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya.
- (4) Arsip dinamis Pemerintah Daerah dapat diakses oleh pengguna internal dan eksternal.
- (5) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Gubernur sebagai pimpinan tertinggi pemerintah daerah provinsi, dapat mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai pimpinan tinggi madya, dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, namun tidak dapat mengakses arsip yang terdapat pada pimpinan tinggi pratama di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin;
  - c. Staf Ahli Gubernur dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, namun tidak dapat mengakses arsip yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin;
  - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai pimpinan tinggi pratama, dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, namun tidak dapat mengakses arsip yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan satu level di luar unit kerja/ pembedangannya kecuali telah mendapatkan izin;
  - e. Kepala Perangkat Daerah sebagai pimpinan tinggi pratama, dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, namun tidak dapat mengakses arsip yang terdapat pada

pimpinan level tertinggi dan satu level di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;

- f. Pejabat Eselon III sebagai pejabat administrator, dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, namun tidak dapat mengakses arsip yang satu level di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;
  - g. Pejabat Eselon IV sebagai pejabat pengawas, dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa;
  - h. pejabat fungsional, hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, dengan tingkat klasifikasi biasa;
  - i. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengakses arsip dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum; dan
  - c. publik dapat mengakses informasi Pemerintah Daerah yang jenis arsipnya dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

#### Pasal 7

- (1) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filing cabinet*/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;
  - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
  - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
  - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

#### Pasal 8

Arsip dinamis Pemerintah Daerah terbagi menjadi 4 (empat) kategori yang meliputi:

- a. biasa/terbuka;
- b. terbatas;
- c. rahasia; dan



d. sangat rahasia.

## Pasal 9

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori arsip biasa/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Daerah antara lain:

- a. arsip dinamis fungsi fasilitatif dari lingkungan Sekretariat Dinas/Badan/ Biro yang meliputi fungsi Hubungan Masyarakat, Hukum, Kearsipan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan, Keuangan, Organisasi dan Tata Laksana, Perencanaan, Perlengkapan, dan Perpustakaan;
- b. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan agama;
- c. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Hukum;
- e. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Keaparaturan;
- f. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Kearsipan;
- g. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Kehutanan;
- h. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Kelautan dan Perikanan;
- i. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Kepegawaian;
- j. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga;
- k. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Kesatuan dan Bangsa dan Politik;
- m. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Kesehatan;
- n. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Keuangan;
- o. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Komunikasi dan Informatika;
- p. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Koperasi dan UKM;
- q. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Lingkungan Hidup;
- r. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Pariwisata;
- s. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan PU dan Penataan Ruang;
- t. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Pembangunan Desa Tertinggal;
- u. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak;
- v. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Pemerintahan Daerah;
- w. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Pemilu;
- x. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Pemuda dan Olahraga;
- y. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Penanaman Modal;
- z. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Penanggulangan Bencana;
- aa. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
- bb. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Pendidikan dan Pelatihan;

- cc. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Penelitian;
- dd. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Pengadaan;
- ee. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Pengawasan;
- ff. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Pengendalian Penduduk dan KB;
- gg. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Perdagangan;
- hh. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Perencanaan;
- ii. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Perhubungan;
- jj. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Perindustrian;
- kk. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Perpustakaan;
- ll. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Persandian;
- mm. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Pertanian;
- nn. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Perumahan dan Pengawasan Pemukiman;
- oo. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Polisi Pamong Praja;
- pp. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Sosial;
- qq. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Tenaga kerja; dan
- rr. arsip dinamis substantif yang meliputi urusan Transmigrasi.

#### Pasal 10

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan arsip yang memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis di lingkungan Pemerintah Daerah, yang meliputi:

- a. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Kepegawaian seperti *personal file*, hasil pertimbangan BAPERJAKAT, rekam medis pegawai, dan lain-lain;
- b. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Perlengkapan seperti dokumen pengadaan barang Pemerintah Daerah, dan lain-lain;
- c. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Inspektorat seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal, Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen, dan lain-lain;
- d. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran di setiap unit kerja, dan lain-lain; dan
- e. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Arsip seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga, dan lain-lain.

#### Pasal 11

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. arsip dinamis yang tercipta berkenaan dengan masalah Keorganisasian, Kepegawaian, dan Hukum seperti kasus/sengketa hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan *personal file*, dan lain-lain;



- b. arsip dinamis yang tercipta dari Bagian Umum/ Aset seperti sertifikat tanah, rancang bangun instalasi telepon, instalasi listrik, daftar arsip vital, dan lain-lain; dan
- c. arsip dinamis yang tercipta dari fungsi Pengawasan seperti Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, dan lain-lain.

## Pasal 12

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori arsip sangat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, mengandung dampak yang sangat luas hingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa yang meliputi:

- a. arsip yang apabila informasinya dibuka dan diberikan kepada publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu:
  - 1) arsip dinamis yang informasinya dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  - 2) arsip dinamis yang informasinya mengandung identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
  - 3) arsip dinamis yang informasinya mengandung data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  - 4) arsip dinamis yang informasinya dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
  - 5) arsip dinamis yang informasinya membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. arsip yang apabila informasinya dibuka dan diberikan kepada publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
  - 1) arsip dinamis yang informasinya mengandung tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
  - 2) arsip dinamis yang informasinya mengandung memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
  - 3) arsip dinamis yang informasinya mengandung Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
  - 4) arsip dinamis berupa gambar, peta, dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
  - 5) arsip dinamis berupa data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/ atau data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
  - 6) arsip dinamis berupa sistem persandian negara; dan/atau
  - 7) arsip dinamis berupa sistem intelijen negara.

- c. arsip yang apabila informasinya dibuka dan diberikan kepada publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- d. arsip yang apabila informasinya dibuka dan diberikan kepada publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, seperti:
  - 1) arsip dinamis berupa rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
  - 2) arsip dinamis berupa rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
  - 3) arsip dinamis berupa rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
  - 4) arsip dinamis berupa rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
  - 5) arsip dinamis berupa rencana awal investasi asing;
  - 6) arsip dinamis berupa proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
  - 7) arsip dinamis berupa hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- e. arsip yang apabila informasinya dibuka dan diberikan kepada publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, seperti:
  - 1) arsip dinamis berupa posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
  - 2) arsip dinamis berupa korespondensi diplomatik antar negara;
  - 3) arsip dinamis berupa sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
  - 4) arsip dinamis berupa perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

### Pasal 13

- (1) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan, dan media simpan arsip.
- (2) Pengamanan arsip kategori umum disimpan pada rak besi, arsip kategori terbatas disimpan pada *filing cabinet*, dan arsip kategori rahasia dan sangat rahasia disimpan pada lemari besi.

### Pasal 14

- (1) Penentuan Pengelola Arsip meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pengelola Arsip Aktif (PAA) di *Central File* Satuan Unit Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- (2) Pejabat Fungsional Arsiparis sebagai pengelola arsip inaktif berperan dalam pengamanan arsip di *Records Center* dalam menetapkan hak akses arsip.
- (3) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip Aktif (PAA) mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola arsip di *central file*.

- (4) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip Aktif (PAA) yang bertugas mengelola arsip harus dipilih pegawai yang profesional baik dalam substansi kearsipan maupun dalam dedikasi dan integritas.
- (5) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip Aktif (PAA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur.

#### Pasal 15

- (1) Pengamanan informasi arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi penciptaan daftar arsip terbatas/terbuka, daftar arsip rahasia dan daftar arsip sangat rahasia.
- (2) Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *Records Centre dan Central File*.

#### Pasal 16

Tabel Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 20 Juli 2020  
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 20 Juli 2020

H. M. ALI BAAL MASDAR

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 27 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 20 JULI 2020  
 TENTANG : SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

### SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>FUNGSI FASILITATIF</b>						
<b>I.</b>	<b>001</b>	<b>HUBUNGAN MASYARAKAT</b>					
	001.00	1. Berkas yang berkaitan dengan pemberian ucapan selamat, ucapan terima kasih, ucapan bela sungkawa dan ucapan permohonan maaf	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	001.01	2. Berkas yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat operasional dan tidak menyangkut kebijakan dan/atau tidak memerlukan tindak lanjut, seperti surat pemberitahuan /undangan yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, surat penyampaian majalah, buletin, jurnal, surat penawaran bimbingan teknis, penawaran training, penawaran workshop dan sebagainya	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	001.02	3. Berkas hubungan antar Lembaga	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	001.02.00	a. Lembaga Negara					
	001.02.01	b. Perusahaan					
	001.02.02	c. Organisasi kemasyarakatan					
	001.02.03	d. Hubungan Dengan PT/ Sekolah					
	001.02.04	e. Forum Kehumasan					
	001.03	4. Berkas yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan website	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	001.04	5. Berkas yang berkaitan dengan keprotokolan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	001.04.00	a. Upacara/Acara Kedinasan					
	001.04.01	b. Kunjungan Dinas					
	001.04.02	c. Agenda Pimpinan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
II.	001.05	6. Berkas yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing,	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	001.06	7. Berkas yang berkaitan dengan informasi kelembagaan seperti : pengumpulan, pengolahan penyajian informasi kelembagaan seperti klipng koran, brosur/ leaflet/ poster/ plakat, pengumuman, dll	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	001.07	8. Berkas yang berkaitan dengan kegiatan pemberian kenang-kenangan kepada instansi atau organisasi serta perorangan yang memiliki jasa atau prestasi di bidang tertentu	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	002	KEARSIPAN					
	002.00	1. Berkas yang berkaitan dengan administrasi pengurusan surat	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	002.00.00	a. Persuratan Surat Masuk	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	002.00.01	b. Persuratan Surat Keluar					
	002.01	2. Berkas yang berkaitan dengan pembinaan kearsipan					
	002.01.00	a. Penyusunan Sistem	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	002.01.01	b. Pembinaan					
	002.01.02	c. Monitoring					
	002.02	3. Berkas yang berkaitan dengan pengelolaan Arsip Aktif	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	002.02.00	a. Penataan, penyimpanan, pemeliharaan, pengolahan					
	002.02.01	b. Layanan Arsip (peminjaman, penggunaan arsip aktif)					
002.03	4. Berkas yang berkaitan dengan pengelolaan Arsip Inaktif	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar		
002.03.00	a. Penataan, penyimpanan, pemeliharaan, pengolahan						
002.03.01	b. Layanan Arsip (peminjaman, penggunaan arsip inaktif)	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar		
	002.04	5. Berkas yang berkaitan dengan kegiatan penyusutan arsip	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	002.04.00	a. Pemindahan arsip					
	002.04.01	b. Pemusnahan arsip					
	002.04.02	c. Penyerahan arsip statis					

1 NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
III.	003	<b>KEPEGAWAIAN</b>					
	003.00	1. Bezetting /Persediaan Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	003.01	2. Formasi Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	003.01.00 003.01.01 003.02	a. Usulan unit kerja b. Usulan formasi 3. Ujian Kenaikan Pangkat/Jabatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	003.02.00 003.02.01 003.03	a. Ujian Penyesuaian liasah b. Ujian Dinas 4. Ujian Kompetensi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	003.03.00 003.03.01 003.04	a. Assessment Test Pegawai b. Pemetaan/Talent Mapping Pegawai 5. Mutasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	003.04.00 003.04.01 003.04.02 003.04.03 003.04.04 003.04.05 003.04.06	a. Kenaikan Pangkat/ Golongan b. Kenaikan Gaji Berkala c. Penyesuaian Masa Kerja d. Penyesuaian Tunjangan Keluarga e. Penyesuaian Kelas Jabatan f. Rotasi Kerja g. Alih Tugas					
	003.05	6. Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	003.05.00 003.05.01 003.05.02 003.06	a. Pengangkatan Jabatan b. Pemberhentian Jabatan Struktural c. Pengangkatan PTT 7. Pendelegasian Wewenang	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	003.06.00 003.06.01 003.07	a. Pendelegasian Wewenang b. Pelaksanaan Harian PLH 8. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	003.07.00 003.07.01 003.07.02 003.07.03 003.07.04 003.07.05 003.07.06 003.08	a. Program Diploma b. Program Sarjana c. Program Pasca Sarjana d. Pendidikan dan Pelatihan Penienangan e. Kursus/ Diklat Fungsional f. Kursus/ Diklat Teknis g. Orientasi Pegawai 9. Administrasi Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	003.08.00 003.08.01 003.08.02 003.08.03 003.08.04 003.08.05 003.08.06 003.08.07 003.08.08 003.09	a. Data/ Keterangan Pegawai b. Kartu pegawai c. Karis/ Karsu d. Kartu Taspen e. Kartu Jaminan Kesehatan f. Tanda Jasa g. Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) h. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) i. Tunjangan Kinerja dan Uang Makan 10. Cuti Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	003.09.00 003.09.01	a. Cuti Tahunan b. Cuti Besar					
	003.09.02 003.09.03 003.09.04 003.09.05 003.10	c. Cuti Zakit d. Cuti Bersalin e. Cuti Karena Alasan penting f. Cuti di Luar Tanggungan Negara 11. Pembinaan pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	003.10.00 003.10.01 003.10.02 003.10.03 003.11	a. Penilaian Prestasi Kerja b. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) c. Pembinaan mental d. Hukuman Disiplin 12. Pembinaan Jabatan Fungsional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	003.11.00 003.11.01 003.11.02 003.11.03 003.11.04 003.11.05	a. Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu b. Kenaikan Jenjang Jabatan c. Pemindahan Jabatan Fungsional Tertentu d. Pengangkatan Jabatan Fungsional Umum e. Pemindahan Jabatan Fungsional Umum f. Pemberhentian Jabatan Struktural					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	003.12	13. Kesejahteraan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	003.12.00 003.12.01 003.12.02 003.12.03 003.13 003.13.00	a. Kesehatan b. Rekreasi/Kesenian/Olahraga c. Bantuan Sosial d. Perumahan 14. Pemberhentian Pegawai a. Dengan hormat	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	003.13.01	b. Tidak dengan hormat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	003.14	15. Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Duda/PNS yang Tewas	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	003.15	16. Perselisihan/Sengketa Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	003.16	17. Organisasi Non Kedinasan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	003.16.00 003.16.01 003.16.02 003.16.03 003.16.04 003.17	a. Korpri b. Dharma Wanita c. Koperasi d. Asosiasi e. Lain-lain 18. Berkas Perseorangan Pejabat Negara :	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	003.18	a. Gubernur, dan Wakil Gubernur. b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD. 19. Berkas Perseorangan Pejabat Lainnya :	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	003.19	a. Ketua, Wakil Ketua, Komisi Lainnya 20. Berkas Perseorangan Kepala OPD	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	003.20	a. Sekretaris Daerah b. Kepala OPD 21. Berkas Perseorangan Aparatur Sipil Negara : a. Lamaran Yang Diterima b. <u>Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya</u> c. <u>Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN</u>	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	004.02.01 004.02.02 004.02.03 004.02.04 004.03	b. Rumah dinas c. Ruang Rapat dan Sarana lainnya d. Kendaraan dinas e. Telekomunikasi 4. Pemeliharaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	004.04	5. Pengamanan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
V.	004.05	6. Risalah/ Notulen Rapat	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	<b>005</b> 005.00	<b>KEUANGAN</b> 1. Pelaksanaan Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	005.00.00 005.00.01 005.00.02	a. RAB b. Pengalihan c. Pengeluaran Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	005.01 005.01.00	2. Pengelolaan Perbendaharaan a. Perbendaharaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	005.01.01	b. Kartu Pengawasan Kredit	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	005.01.02	c. Pajak	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	005.01.03	d. Pendapatan Daerah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	005.01.04	e. Pengembalian Belanja	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	005.01.05	f. Berita Acara Pemeriksaan Kas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	005.01.06	g. Tuntutan Ganti Rugi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	005.01.07	h. Pinjaman/Bantuan Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	005.01.08	i. Pembukuan Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	005.02	3. Verivikasi Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	005.03	4. Akuntansi dan Pelaporan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	005.04	5. Ketatausahaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	005.04.00 005.04.01 005.04.02 005.04.03 005.05 005.05.00	a. Keterangan penghasilan b. SKPP c. Permohonan Pinjaman d. Iuran Keanggotaan Organisasi 6. Pembinaan a. LHP atas laporan keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	005.05.01	b. Pemeriksaan Fungsional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	005.05.02	c. Pembinaan Keuangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
<b>VI.</b>	<b>006</b>	<b>ORGANISASI DAN TATA LAKSANA</b>					
	006.00	1. Organisasi Non Kedinasan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	006.00.00 006.00.01 006.01	a. Analisis Organisasi b. Evaluasi Organisasi 2. Analisis Jabatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	006.01.00 006.01.01 006.02	a. Analisis Jabatan Struktural b. Analisis Jabatan Fungsional Tertentu 3. Standar Kompetensi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	006.02.00 006.02.01 006.03	a. Standar Kompetensi Jabatan Struktural b. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional 4. Analisis Beban Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	006.04	5. Tata Laksana	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	006.04.00 006.04.01 006.04.02 006.04.03 006.05	a. Penyusunan dan Penvelarasan Proses Bisnis b. Evaluasi Proses Bisnis c. Penyusunan dan Penvelarasan SOP AP d. Monitoring dan SOP AP 6. Reformasi Birokrasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
VII.	006.06	7. Evaluasi Jabatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	007 007.00	<b>PERENCANAAN</b> 1. Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	007.00.00 007.00.01 007.00.02 007.01	a. Rencana Strategis (Renstra) b. Forum OPD c. Pokok Pikiran DPRD 2. Rencana Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	007.01.00 007.01.01 007.01.02 007.01.03 007.02	a. Usulan Perencanaan Kegiatan b. Rencana Kerja Tahunan c. Rencana Kerja berdasar Pagu Indikatif d. New Iniatif 3. Penetapan Kinerja	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	007.03	4. Perencanaan Anggaran	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	007.03.00 007.03.01 007.03.02 007.04	a. Penyusunan Rencana Anggaran-APBD b. Penyusunan Rencana Anggaran-APBN c. Penerimaan Daerah 5. Revisi Dokumen Anggaran	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	007.04.00 007.04.01 007.04.02 007.04.03 007.04.04 007.04.03 007.05	a. Revisi DPA b. Revisi DIPA c. Anggaran Belanja Tambahan (ABT) d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) f. Pergeseran Anggaran 6. Perjanjian Kerjasama	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	007.05.00 007.05.01 007.06	a. Kerja sama Dalam Negeri b. Kerja sama Luar Negeri 7. Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	007.06.00	a. Evaluasi Program dan Anggaran					
	007.07	8. Penyusunan Laporan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	007.07.00 007.07.01 007.07.02 007.07.03 007.07.04 007.07.05	a. Laporan Berkala b. Laporan Khusus c. Laporan Perkembangan (Progress Report) d. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) e. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) f. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)					
	008 008.00	<b>PERLENGKAPAN</b> 1. Perencanaan pengadaan barang dan jasa	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	008.00.00 008.00.01 008.00.02 008.00.03 008.01	a. Analisis Kebutuhan b. Tata Ruang c. Daftar Perkenalan Mampu d. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan 2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	008.01.00 008.01.01 008.01.02 008.01.03 008.01.04 008.01.05 008.01.06 008.01.07 008.01.08 008.02	a. Alat Tulis Kantor b. Perlengkapan Kantor c. Tanah dan Bangunan d. Kendaraan e. Instalasi/ Jaringan f. Jasa Kebersihan Kantor g. Pakaian Dinas h. Sewa Kantor/ Gudang i. Bahan Pengolahan Arsip 3. Pengelolaan Barang	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	008.02.00 008.02.01 008.02.02 008.02.03 008.02.04 008.02.05	a. Penyimpanan/ pergudangan b. Distribusi /Penyaluran barang milik daerah c. Inventarisasi barang milik daerah d. Penghapusan barang milik daerah e. Pelaporan barang milik daerah f. Penyusunan RKB dan RKPRU					
	008.03	4. Pemeliharaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	008.03.00	a. Pemeliharaan/perawatan barang milik daerah					

1 NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7		
IX.	009	PERPUSTAKAAN					
	009.00	1. Penyimpanan Deposit	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	Permanen
	009.00.00	a. Bukti penerimaan koleksi					
	009.00.01	b. Administrasi Pengolahan Deposit					
	009.01	2. Pengadaan dan Pengolahan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	009.01.00	a. Buku Induk Koleksi					
	009.01.01	b. Daftar Buku					
	009.02	3. Layanan Jasa dan Informasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	009.03	4. Preservasi Bahan Pustaka	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat OPD Prov. Sulbar	
	009.03.00	a. Survev					
	009.03.01	b. Refrografi					
B.	FUNGSI SUBSTANTIF						
I.	100	BINA KEAGAMAAN					
	101	A. Bimbingan Masyarakat Islam					
	101.00	1. Rumah Ibadah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
		a. Bantuan pengelolaan rumah ibadah					
		b. Penyuluhan dan bimbingan kemasjidan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
		c. Sertifikat aset-aset Badan Kesejahteraan Masiid (BKM)					
	101.01	2. Bimbingan dan Penyuluhan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
		a. Kezgiatan penvuluhan dan bimbingan penvuluh					
		b. Penerangan agama Islam					
	101.02	3. Pembinaan lembaga keagamaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	101.03	4. Pembinaan aliran/keagamaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
		a. Bimbingan dan pengembangan					
		b. Kerjasama dalam bentuk program aksi					
		c. Pelaksanaan koordinasi dan pemecahan permasalahan krisis umat					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	101.04	5. Peringatan Hari Besar Islam	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	101.05	6. Bantuan Sosial (Bansos) Islam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	102 102.00	B. BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN 1. Kasus Rumah Ibadah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	102.01	2. Pembinaan Lembaga Keagamaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	102.02	3. Bantuan Gereja (Alkitab, Baju Toga, Rehab Gedung Gereja, dll)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	102.03	4. Kasus Rohaniawan/Penyalahgunaan Wewenang	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	102.04	5. Peringatan Hari Besar Kristen	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	102.05	a. Natal b. Jumat Agung 6. Bimbingan dan Peyuluhan Kegiatan Agama Kristen	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	102.06	7. Pesparawi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	102.07	8. Pendirian rumah ibadah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	102.08	9. Bantuan Sosial (Bansos) Kristen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	103 103.00	C. BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK 1. Kasus Pendirian Gereja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	103.01	2. Bantuan Gereja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	103.02	3. Bantuan Sarana Keagamaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	103.03	4. Bantuan Ormas Katolik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	103.04	5. Bantuan Komisi KWI dan Keuskupan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	103.05	6. Pembinaan Tokoh Agama	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	103.06	7. Dialog Kerukunan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	103.07	8. Pertemuan Lintas Komisi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	103.08	9. Lokakarya Musik Liturgi Provinsi Gerejawi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	103.09	10. Pagelaran Musik Provinsi Gerejawi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	103.10	11. Pengembangan Keagamaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	103.11	a. Statistik keagamaan b. Data Lembaga Keagamaan Katolik, Ordo, Gereja, Panti Asuhan c. Data Pemeluk agama 12. Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan  a. Data penyuluh agama b. Data Juru Penerang c. Juknis dan Materi Penyuluhan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	103.12	d. Bantuan Operasional Juru Penerang e. Pedoman Pengusulan Pembuatan Laporan Penyuluhan PNS f. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Juru Penerang Agama katolik g. Pedoman Pemberian Bantuan di Lingkungan Direktorat Urusan Agama Katolik h. Standar Pedoman Bina Iman Remaja (BIR) dan Bina Iman Anak (BIA)  i. Pedoman Bimbingan Masyarakat Katolik i. Pembinaan Pembina BIR dan BIA k. Pembinaan Penyuluhan Agama /Juru Penerang katolik 13 Pembinaan Umat, Orang Muda Katolik, Keluarga Bahagia	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	103.13	14. Bantuan Sosial (Bansos) Katolik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	104 104.00	D. BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU 1. Penyuluhan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	104.01	a. Perayaan Hari Raya Agama Hindu b. Utsawa Dharma Gita c. Seni Budaya Hindu d. Pewitenen, Diksa/Dwijati e. Tirta Yatra f. Juru Penerang Agama Hindu g. Penyuluhan Agama Hindu h. Dharma Duta 2. Pembinaan Lembaga Keagamaan a. Kasus lembaga keagamaan (rumah ibadah)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
		b. PHDI	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
		c. Banjar/suka dula Hindu Dharma	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
		d. Pesantian-Pesantian	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
		e. Pengurus Pura	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
		f. Pengurus WHDI	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
		g. Pengurus Peradah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
		h. Pasraman	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	104.02	3. Bimbingan Ibadah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	104.03	a. Persembayangan b. Upacara keagamaan - Upacara Eka Dasa Rudra - Upacara Lainnya c. Pembagian aliran/Keagamaan 4. Data Pengembangan Keagamaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
		a. Statistik Keagamaan b. Pemeluk Agama c. Tokoh Agama d. Pura/Candi dan Kuil					
	104.04	5. Bantuan Sosial (Bansos Hindu)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	105 105.00	E. BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA 1. Penyuluhan  a. Perayaan Hari Rava Agama Budha	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	105.01	2. Pembinaan Lembaga Keagamaan a. Kasus Rumah Ibadah/Yayasan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
		b. Kasus Majelis-Majelis (Keagamaan)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	105.02	3. Bimbingan Ibadah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	105.03	a. Persembavangan b. Upacara keagamaan c. Pembagian aliran/Keagamaan 4. Data Pengembangan Keagamaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	105.04	a. Statistik Keagamaan b. Pemeluk Agama c. Tokoh Agama d. Majelis Keagamaan 5. Bantuan Sosial (Bansos Buddha)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	106	F. KERUKUNAN UMAT BERAGAMA					
II.		1. Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
		2. Kasus Keagamaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
		3. Kasus Aliran Keagamaan (Konghucu)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	107	G. PEMBINAAN MENTAL SPRITUAL	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Kesra Setda Prov. Sulbar	
	200	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
	201	A. Pembinaan Usaha Pertambangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas ESDM Prov. Sulbar	
	201.00	1. Pembinaan Usaha Air Bawah Tanah					
	201.01	2. Pembinaan Usaha Listrik dan Energi					
	201.02	3. Pembinaan Pertambangan Usaha Minyak dan Gas					
	201.03	4. Pembinaan Usaha Penambangan Bahan Galian					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	202	B. Bimbingan Usaha Pertambangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas ESDM Prov. Sulbar	
	202.00 202.01 202.02 202.03 202.04 203	1. Bimbingan dan Penvuluhan Pengeboran Air Bawah Tanah 2. Bimbingan dan Penvuluran Listrik dan Energi 3. Bimbingan dan Penvuluhan Minvak dan Gas 4. Bimbingan dan Penvuluhan Penambangan Bahan Galian 5. Bimbingan dan Penvuluhan Geologi					
		C. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Usaha Air Bawah Tanah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas ESDM Prov. Sulbar	
	203.00	1. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Usaha Air Bawah Tanah					
III.	203.01 203.02	2. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Listrik dan Energi 3. Pengawasan dan pengendalian Penambangan Usaha Minyak dan Gas					
	203.03	4. Pengawasan dan pengendalian Penambangan Usaha Bahan Galian					
	204	D. Perizinan Bidang Petambangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas ESDM Prov. Sulbar	
	204.00 204.01 204.02 204.03 205	1. Perizinan Pertambangan Air Bawah Tanah 2. Perizinan Pertambangan Listrik dan Energi 3. Perizinan Pertambangan Minyak dan Gas 4. Perizinan Pertambangan Bahan Galian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas ESDM Prov. Sulbar	
	205.00 205.01 206	1. Penelitian dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 2. Penelitian dan Pemanfaatan Bahan-Bahan Galian F. Organisasi dan Profesi Bidang Pertambangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas ESDM Prov. Sulbar	
	207	G. Kerjasama Pengelolaan Pertambangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas ESDM Prov. Sulbar	
	<b>300</b>	<b>HUKUM</b>					
	300.00	A. Perumusan Kebijakan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Hukum Setda Prov. Sulbar	
		1. Pengkaiian dan pengusulan kebijakan 2. Penviapan kebijakan 3. Perumusan dan penyusunan bahan 4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5. Penetapan dalam bentuk Peraturan					
	301	B. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/REGELING	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Hukum Setda Prov. Sulbar	
	301.00	1. Usul Prakarsa Peraturan Perundang-Undangan					
	301.01	2. Program legislasi instansi pusat/daerah					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	302	C. PEMBAHASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Hukum Setda Prov. Sulbar	
	302.00 302.01 303	1. Peraturan Daerah 2. Peraturan Gubernur D. PEMBENTUKAN KEPUTUSAN/PENETAPAN (BESCHIKKING)	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Hukum Setda Prov. Sulbar	
	303.00 303.01 303.02 304	1. Keputusan 2. Surat Edaran 3. Instruksi E. PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Hukum Setda Prov. Sulbar	
	304.00 304.01 304.02 305	1. Sosialisasi 2. Penyuluhan 3. Desiminasi F. DOKUMENTASI HUKUM	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Hukum Setda Prov. Sulbar	
	306	G. UJI MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Hukum Setda Prov. Sulbar	
	307	H. Perlindungan dan Penegakan HAM	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Hukum Setda Prov. Sulbar	
	307.00 307.00.00 307.00.01 307.00.02 307.01 307.01.00 307.01.01 307.01.02 307.01.03	1. Komunikasi Masyarakat a. Pengaduan masyarakat b. Telaahan, koordinasi, rumusan dan rekomendasi pengaduan masyarakat c. Permasalahan HAM yang berskala nasional 2. Hak Asasi Manusia a. kerjasama b. Desiminasi c. Penguatan d. Informasi Implementasi					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
IV.	308	I. Penanganan Kasus	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Hukum Setda Prov. Sulbar	
	308.00	1. Sengketa Arbitrase					
	308.01	2. Pembelaan dan bantuan hukum					
	308.01.00	a. Tata Usaha Negara					
	308.01.01	b. Perdata					
	308.01.02	c. Pidana					
	308.02	3. Telaah hukum, saksi ahli dan opini hukum					
	309	J. Tindak Lanjut dan Tuntutan Ganti Rugi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Hukum Setda Prov. Sulbar	
	309.00	1. Tindak Lanjut					
	309.01	2. Tuntutan Ganti Rugi					
	<b>400</b>	<b>KEAPARATURAN</b>					
	400.00	A. Perumusan Kebijakan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ortala Setda Prov. Sulbar	
		1. Pengusulan kebijakan 2. Penyajian Bahan Kebijakan 3. Perumusan kebijakan 4. Penyusunan kebijakan 5. Penetapan Kebijakan					
	401	B. Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ortala Setda Prov. Sulbar	
	401.00	1. Reformasi Birokrasi					
	401.01	2. Akuntabilitas aparatur					
	401.01.00	a. LKIP Gubernur					
	401.01.01	b. SAKIP SKPD					
	401.02	3. Pelayanan Publik					
	401.02.00	a. Pengaduan Masyarakat					
	401.02.01	b. Pengaduan Aparatur					
	402	C. Kelembagaan dan tata laksana	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ortala Setda Prov. Sulbar	
	402.00	1. Kelembagaan					
	402.00.00	a. Koordinasi kebijakan kelembagaan dan tata laksana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ortala Setda Prov. Sulbar	
	402.00.01	b. Analisis Organisasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ortala Setda Prov. Sulbar	
	402.00.02	c. Evaluasi Organisasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ortala Setda Prov. Sulbar	
	402.00.03	d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program kelembagaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ortala Setda Prov. Sulbar	
	402.01	2. Tata Laksana	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ortala Setda Prov. Sulbar	
	402.01.00	a. Penyusunan dan Penyelarasan Proses Bisnis					
	402.01.01	b. Evaluasi Proses Bisnis					
	402.01.02	c. Penyusunan dan Penyelarasan SOP AP					
	402.01.03	d. Monitoring dan SAP AP					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	403	D. Analisis dan Evaluasi Jabatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ortala Setda Prov. Sulbar	
	403.00 403.01 403.02 403.03 403.04 404 403.00	1. Analisis Jabatan Struktural 2. Analisis Jabatan Fungsional Tertentu 3. Analisis Jabatan Fungsional Umum 4. Analisis Beban Kerja 5. Evaluasi Jabatan E. Sumber Daya Manusia Aparatur 1. Pembinaan integritas sumber daya manusia aparatur	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ortala Setda Prov. Sulbar	
	404.01	2. Perencanaan dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ortala Setda Prov. Sulbar	
	404.01.00	a. Perencanaan Aparatur Sipil Negara					
	404.01.01 404.01.02 404.02	b. Penempatan dan distribusi Aparatur Sipil Negara c. Sistem informasi dan database Aparatur Sipil Negara 3. Standardisasi jabatan sumber daya manusia aparatur	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ortala Setda Prov. Sulbar	
	404.02.00 404.02.01 405 405.00 405.00.00	a. Standar Kompetensi Jabatan Struktural b. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional A. Bina Kabupaten/ Kota 1. Kelembagaan a. Analisis Organisasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ortala Setda Prov. Sulbar	
	405.00.01	b. Evaluasi Organisasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ortala Setda Prov. Sulbar	
	405.00.02	c. Monev Organisasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ortala Setda Prov. Sulbar	
	405.01	2. Sumber Daya Manusia Aparatur	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ortala Setda Prov. Sulbar	
	405.01.00 405.01.01	a. Monev Analisis Jabatan b. Monev Formasi Pegawai					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
V.	500	<b>KEARSIPAN</b>					
	500.00	A. Perumusan Kebijakan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	501	1. Pengusulan kebijakan					
	501.00	2. Penyiapan Bahan Kebijakan					
		3. Perumusan kebijakan					
		4. Penyusunan kebijakan					
		5. Penetapan Kebijakan					
	501	A. Pembinaan kearsipan					
	501.00	1. Pembinaan Arsiparis					
	501.00.00	a. Bimbingan Arsiparis	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	501.00.01	b. Pengembangan Profesi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	501.00.02	c. Bimbingan Tim Penilai	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	501.00.03	d. Penilaian Jabatan Fungsional Arsiparis	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	501.00.04	e. Organisasi profesi arsiparis	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	501.01	2. Diklat, Bimkos, Supervisi dan Implementasi Sistem Kearsipan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	501.01.00	a. Data Lembaga Kearsipan					
	501.01.01	b. Data Unit kearsipan					
	501.01.02	c. Supervisi Kearsipan					
	501.01.03	d. Diklat Kearsipan					
	501.01.04	e. Bimbingan Teknis Kearsipan					
	501.01.05	f. Apresiasi Kearsipan					
	501.01.06	g. Konsultasi Penyusunan Sistem Kearsipan					
	501.01.07	h. Konsultasi Penyusunan Peraturan Kearsipan					
	501.01.08	i. Implementasi Pengelolaan Arsip Elektronik					
	501.01.09	j. Magang Kearsipan					
	501.01.10	k. Pemberian Penghargaan Kearsipan					
	501.01.11	l. Evaluasi Pembinaan Kearsipan					
	501.02	3. Sosialisasi Kearsipan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	501.02.00	a. Seminar/Lokakarya/Workshop/Ekspose					
	501.02.01	b. Rakorda/Rakor/Rakernis/Temu Teknis					
	501.02.02	c. Sosialisasi Peraturan Perundangan Kearsipan					
	502	B. Konservasi					
	502.00	1. Akuisisi Arsip	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	502.00.00	a. Pemerintah Daerah					
	502.00.01	b. Perusahaan (BUMD dan Swasta)					
	502.00.02	c. Organisasi Massa, Organisasi Politik dan Perorangan/Tokoh					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	502.01	2. Persetujuan Pemusnahan Arsip	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	502.01.00 502.01.01 502.02	a. Pemerintah Daerah b. Perusahaan (BUMD dan Swasta) 3. Sejarah Lisan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	502.03 502.03.00	4. Pengolahan Arsip a. Pengolahan arsip media baru	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	502.03.01 502.03.02 502.04	b. Pengolahan arsip kartografi dan kearsitekturan c. Pengolahan Arsip sejarah lisan 5. Preservasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	502.04.00 502.04.01 502.04.02 502.04.03 502.04.04 502.05	a. Penyimpanan arsip b. Reproduksi c. Restorasi d. Instalasi Laboratorium e. Sarana dan Prasarana 6. Pelayanan Arsip	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	502.05.00 502.05.01 502.05.02 502.05.03 502.05.04	a. Pameran Arsip b. Komunikasi Lavanan c. Lavanan Arsip d. Penerbitan Naskah Sumber e. Perizinan					
	503 503.00	C. Pengkajian Dan Pengembangan 1. Pengkajian	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	503.00.00 503.00.01 503.00.02 503.00.03 503.01	a. Sistem Kearsipan b. Kelembagaan c. Sumber Daya Manusia d. Sarana Prasarana 2. Penerbitan Jurnal	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	504 504.00	D. Informasi Kearsipan 1. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Elektronik	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	504.00.00 504.00.01 504.01	a. Pengkajian Sistem b. Pengembangan Sistem 2. Penyelenggaraan JIKN dan SIKN	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	504.01.00 504.01.01 504.01.02	a. Pengelolaan Data dan Informasi JIKN dan SIKN b. Pemeliharaan Sistem c. Pembinaan SIKN dan JIKN					
	505 505.00	E. Pengawasan Kearsipan 1. Pengawasan Eksternal	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
VI.	505.00.00 505.00.01 505.01  505.01.00 505.01.01 600	a. Pelaksanaan Pengawasan b. Monitoring Hasil Pengawasan 2. Pengawasan Internal  a. Pelaksanaan Pengawasan b. Monitoring Hasil Pengawasan <b>KEHUTANAN</b>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	600.00	A. Perumusan Kebijakan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	601	1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan Kebijakan 3. Perumusan Kebijakan 4. Masukan dan dukungan kebijakan 5. Penetapan Kebijakan B. Penyuluhan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	601.00 601.01 601.02 601.03 601.04 601.05 602	1. Program Kerja Penyuluhan 2. Materi Penyuluhan 3. Sarana Penyuluhan 4. Pengembangan Tenaga Penyuluhan 5. Pelaksanaan Penyuluhan 6. Diseminasi C. Planologi Kehutanan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	602.00 602.00.00 602.00.01 602.00.02 602.01	1. Perencanaan Kawasan Hutan a. Perencanaan Makro Kawasan Hutan b. Penataan Ruang Kawasan Hutan c. Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan 2. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	602.01.00 602.01.01 602.01.02 602.02	a. Pengukuhan Kawasan Hutan b. Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan c. Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan 3. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	602.02.00 602.02.01 602.02.02 602.02.03	a. Inventarisasi Sumber Daya Hutan b. Pemantauan Sumber Daya Hutan c. Pemetaan Sumber Daya Hutan d. Jaringan Data Spasial					
	602.03	4. Penggunaan Kawasan Hutan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	602.03.00 602.03.01	a. Penggunaan Kawasan Hutan b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	602.03.02 602.04	c. Informasi Penggunaan Kawasan Hutan 5. Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan					
	602.04.00 602.04.01 602.04.02	a. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan b. Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan c. Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan					



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	603 603.00	D. Bina Usaha Kehutanan 1. HPH /HTI/IUPHHK	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	603.00.00 603.00.01 603.00.02 603.00.03 603.00.04 603.01	a. Data areal HPH/HTI/IUPHHK b. SK HPH/HTI/IUPHHK c. Kerjasama d. Pembatalan/ Penolakan e. Perpanjangan 2. Modal dan Peralatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	603.01.00 603.01.01 603.01.02 603.01.03 603.01.04 603.02	a. Investasi Industri b. Peralatan c. Tenaga Kerja d. Pemegang Saham e. Neraca Perusahaan 3. Rencana Karya	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	603.02.00 603.02.01 603.02.02 603.02.03	a. Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) b. Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) c. Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT) d. Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)					
	603.03	4. Produksi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	603.03.00 603.03.01 603.03.02 603.04	a. Target Produksi RKT dan Bagan Keria b. Produksi Kayu c. Produksi Non Kayu 5. Industri	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	603.04.00 603.04.01 603.04.02 603.05	a. Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK b. Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK c. Industri Non Kayu 6. Pembangunan Hutan Tanaman Industri	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	603.05.00 603.05.01 603.06	a. Hutan Tanaman Industri Pulp b. Hutan Tanaman Industri Pertukangan 7. Pelanggaran dan Sanksi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	603.06.00 603.06.01 603.06.02 603.07	a. Pemblokiran b. Denda c. Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK 8. Pemanfaatan Hutan Produksi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	603.07.00 603.07.01 603.07.02 603.07.03 603.08	a. Pola Pemanfaatan Hutan Produksi b. Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi c. Informasi Sumber Daya Hutan Produksi d. Pengembangan Investasi Usaha 9. Pengembangan Hutan Alam	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	603.08.00	a. Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	603.08.01 603.08.02	b. Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil Hutan Kayu Hutan Alam c. <u>Produksi Hutan Alam</u>					
	603.08.03 603.09	d. Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam 10. Pengembangan Hutan Tanaman	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	603.09.00 603.09.01 603.09.02	a. Hutan Tanaman Industri b. Hutan Tanaman Rakyat c. Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil Hutan Kayu HutanTanaman I					
	603.09.03 603.09.04 603.10	d. Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman e. Pembiayaan Hutan Tanaman 11. Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	603.10.00 603.10.01 603.10.02 603.10.03 603.11	a. Penerimaan Negara Bukan Pajak b. Peredaran Hasil Hutan c. Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan d. Penertiban Peredaran Hasil Hutan 12. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	603.11.00 603.11.01 603.11.02 603.12 603.12.00 603.12.01 604 604.00	a. Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan b. Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan c. Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan 13. Pembinaan Hutan a. Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK b. Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur E. Standardisasi Dan Lingkungan 1. Standardisasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	604.00.00 604.00.01 604.00.02 604.00.03 604.01	a. Kayu b. Non Kayu c. Produk d. Proses 2. Sarana Pengujian Hasil Hutan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	604.02	3. Pengembangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	604.02.00 604.02.01 604.03	a. Pengembangan Perusahaan b. Pengembangan Pemasaran 4. Pemasaran Hasil Hutan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	604.04	5. Pengendalian Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	604.04.00 604.04.01 604.05	a. Amdal di Dalam Kawasan Hutan b. Amdal di Luar Kawasan Hutan 6. Angkutan Hasil Hutan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	604.05.00	a. Sarana dan Prasarana (Armada Angkutan, Kerjasama Angkutan, Tempat Pemuatan Hasil Hutan, Tempat Pengumpulan Log Pond dan Pengangkutan)					
	604.05.01	b. Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan (Angkutan dan Bongkar Muat)					
	604.06	7. Tata Usaha Hasil Hutan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	604.06.00	a. Tanda Pengenal Perusahaan					
	604.06.01	b. Legalitas					
	604.06.02	c. Palu Tok Kualitas					
	604.06.03	d. Pass Angkutan					
	604.06.04	e. Sertifikat Ekspor Hasil Hutan					
	605	F. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam					
	605.00	1. Konservasi Jenis dan Genetik	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	605.00.00	a. Flora dan Fauna yang Dilindungi					
	605.00.01	b. Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi					
	605.00.02	c. Lembaga Konservasi/Kebun Binatang					
	605.00.03	d. <u>Konvensi Keanekaragaman Havati</u>					
	605.01	2. Kawasan Konservasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	605.01.00	a. Cagar Alam					
	605.01.01	b. Suaka Margasatwa					
	605.01.02	c. Taman Wisata					
	605.01.03	d. Taman Buru					
	605.01.04	e. Taman Nasional					
	605.01.05	f. Taman Hutan Raya					
	605.01.06	g. Hutan Lindung dan Suaka Alam					
	605.01.07	h. Lahan Basah dan Konservasi Laut					
	605.01.08	i. Gua/Karst					
	605.02	3. Pengamanan Hutan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	605.02.00	a. Pelanggaran					
	605.02.01	b. Bencana Alam					
	605.02.02	c. Kebakaran Hutan					
	605.02.03	d. Sengketa Hutan					
	605.02.04	e. Hama dan Penyakit					
	605.03	4. Penyidikan dan Perlindungan Hutan					
	605.03.00	a. Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	605.03.01	b. Penyidikan dan Perlindungan Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	605.03.02	c. Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	605.04	5. Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	605.04.00	a. Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam					
	605.04.01	b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan					
	605.04.02	c. <u>Pemanfaatan Wisata Alam</u>					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	605.05	6. Bina Cinta Alam	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	605.05.00 605.05.01 605.05.02 606 606.00	a. Cinta Alam b. Kader Konservasi Sumber Dava Alam c. Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA G. Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial 1. Perbenihan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	606.00.00 606.00.01 606.00.02 606.00.03 606.00.04 606.00.05 606.00.06 606.00.07 606.00.08 606.00.09 606.01	a. Pemolaan Benih b. Kebun Benih c. Tegakan Benih d. Pengadaan Benih e. Pengujian dan Penyimpanan Benih f. Lalu Lintas Angkutan Benih g. Pembibitan h. Pengembangan Sumber Benih i. Pengembangan Usaha Perbenihan i. Pengendalian Peredaran Benih 2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	606.01.00 606.01.01 606.01.02 606.01.03	a. Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan b. Rehabilitasi Hutan c. Rehabilitasi Lahan d. Pengelolaan Hutan Mangrove, Hutan Pantai, Rawa dan Gambut					
	606.01.04 606.02	e. Reklamasi Hutan dan Konservasi Tanah 3. Tanaman Reboisasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	606.02.00 606.02.01 606.03	a. Reboisasi Lahan Kritis b. Reboisasi Areal HPH 4. Perhutanan Sosial	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	606.03.00	a. Pemolaan					
	606.03.01 606.03.02 606.03.03 606.03.04 606.03.05	b. Pengembangan Hutan Kemasvarakatan c. Pengembangan Hutan Desa d. Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan e. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosia f. Hasil Hutan Bukan Kayu/Aneka Usaha Kehutanan ( HHBK/AUK)					
	606.04	5. Pengendalian Perladangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	606.04.00 606.04.01 606.04.02 606.04.03 606.04.04 606.04.05 607 607.00 607.00.00	a. Penentuan Lokasi b. Pengembangan Hutan Kemasvarakatan c. Pemupukan Lokasi d. Pengelolaan Tanah e. Pemindahan Penduduk f. Pembuatan Sarana H. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 1. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan a. Perencanaan Program Penelitian	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
VII.	607.00.01	b. Pelaksanaan Penelitian	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	607.01	2. Monitoring dan Evaluasi Penelitian	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	607.01.00 607.01.01 607.01.02 607.02	a. Monitoring Penelitian b. Evaluasi Penelitian c. Rekomendasi Penelitian 3. Diseminasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	607.02.00 607.02.01	a. Gelar Teknologi b. Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan					
	<b>700</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					
	700.00	A. RUMUSAN KEBIJAKAN DIBIDANG :	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	701 701.00 701.00.00	1 pengkaiian dan pengusulan kebijakan 2 penyiapan bahan 3 perumusan kebijakan 4 pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan  5 penetapan kebijakan B. PERIKANAN TANGKAP 1. Sumber Daya Ikan a. Data dan Statistik Perikanan Tangkap	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	701.00.01	- pengumpulan dan pengolahan - analisis dan penyajian b. Sumber Daya Ikan Perairan Umum	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	701.00.02	- pemulihan sumber daya ikan perairan umum - tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan c. Sumber Daya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	701.00.03	- pemulihan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan - tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan d. Sumber Daya Ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
		- identifikasi sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas - tata kelola sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas					
	701.00.04	e. Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
		- evaluasi pengelolaan data sumber daya ikan - analisis pengelolaan sumber daya ikan					
	701.01	2. Pelabuhan Perikanan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	701.01.00	a. Identifikasi dan Penyiapan Pelabuhan Perikanan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	701.01.01	- identifikasi dan analisis - penyiapan bangunan b.Tata Operasional Pelabuhan Perikanan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	701.01.02	- tata laksana pelabuhan perikanan - pengusahaan dan pelavanan c. Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	701.01.03	- bimbingan pembangunan pps, ppn, dan ppp - bimbingan pembangunan ppi dan pelabuhan swasta d. Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	701.01.04	- tata laksana dan sarana - keselamatan pelavaran e. Pemantauan dan Evaluasi Pelabuhan Perikanan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	701.02 701.02.00	- pemantaun dan evaluasi pps,ppn, dan ppp - pemantaun dan evaluasi ppi dan pelabuhan swasta 3. Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan a.Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
		- rancang bangun kapal perikanan					
	701.02.01	- kelaikan kapal perikanan b.Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Penangkapan Ikan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	701.02.02	- rancang bangun alat penangkapan ikan - kelaikan alat penangkapan ikan c.Pendaftaran Kapal Perikanan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	701.02.03	- identifikasi dan pengukuran - pencatatan dan dokumentasi d.Pengawasan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	701.02.04	- pengawasan kapal perikanan - ketenagakerjaan perikanan e.Pemantauan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	701.03 701.03.00	- pemantauan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan - evaluasi dan pelaporan 4. Pelavanan Usaha Penangkapan Ikan a. Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
		- verifikasi alokasi usaha penangkapan ikan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	701.03.01	- pelayanan alokasi usaha penangkapan ikan b.Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	701.03.02	- verifikasi pengusahaan penangkapan ikan - administrasi pengusahaan penangkapan ikan c.Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	701.03.03	- verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perikanan berbadan hukum - verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perorangan dan koperasi - pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan - pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan - evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan d. Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	701.03.04	- penerbitan dokumen penangkapan ikan - tata laksana dokumen penangkapan ikan E. Pemantauan dan evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat	DKP Prov. Sulbar	
	701.04 701.04.00	- pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan - evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan 5. Pengembangan Usaha Penangkapan a. Kelembagaan Usaha	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	701.04.01	- tata laksana kelembagaan - kerja sama usaha b. Investasi dan Pemodalan Usaha	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	701.04.02	- tata laksana investasi dan pemodalan usaha - bimbingan investasi dan pemodalan usaha c. Kenelayanan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	701.04.03	- identifikasi dan kapasitas nelayan - bimbingan nelayan d. Pembinaan pengelolaan usaha	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	701.04.04	- bimbingan pengelolaan usaha - bimbingan diversifikasi usaha e. Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	702 702.00 702.00.00	- pemantauan usaha penangkapan ikan - evaluasi usaha penangkapan ikan C. PERIKANAN BUDIDAYA 1. Prasarana dan Sarana Budidaya a. Lahan dan Air	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
		a) identifikasi potensi b) penataan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	702.00.01	b. Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	702.00.02	a) standarisasi b) pemantauan dan evaluasi c. Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	702.00.03	a) standarisasi b) pemantauan dan evaluasi d. Prasarana dan Sarana Budidaya Air Laut	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	702.00.04	a) standarisasi b) pemantauan dan evaluasi e. Minapolitan Budidaya	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	702.01 702.01.00	a) identifikasi potensi b) pemanfaatan potensi 2. Perbenihan a. Induk	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	702.01.01	a) pengelolaan induk ikan air tawar b) pengelolaan induk ikan air payau dan laut b. Perbenihan Skala Kecil	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	702.01.02	a) perbenihan skala kecil ikan air tawar b) perbenihan skala kecil ikan air laut c. Perbenihan Skala Besar	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	702.01.03	a) perbenihan skala besar ikan air tawar b) perbenihan skala besar ikan air payau dan laut d. Standarisasi dan Sertifikasi Perbenihan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	702.01.04	a) standarisasi perbenihan b) sertifikasi perbenihan e. Informasi dan Distribusi Perbenihan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	702.02 702.02.00	a) informasi perbenihan b) distribusi perbenihan 3. Produksi a. budidaya air tawar	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	702.02.01	a) standarisasi b) penerapan teknologi budidaya air tawar b. budidaya air payau dan laut	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
		a) standarisasi					



1 NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	702.02.02	b) penerapan teknologi budidaya air patau dan laut c. budidaya ikan hias	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	702.02.03	a) standarisasi b) penerapan teknologi budidaya ikan hias d. sertifikasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	702.02.04	a) penerapan sertifikasi b) monitoring dan evaluasi sertifikasi e. data dan statistik perikanan budidaya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	702.03 702.03.00	a) pengumpulan dan pengolahan data b) analisis dan penvaian data statistik 4. Kesehatan Ikan dan Lingkungan a. hama dan penyakit ikan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	702.03.01	a) metode dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan b) monitoring dan evaluasi hama dan penyakit ikan b. perlindungan lingkungan budidaya	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	702.03.02	a) pengendalian lingkungan budidaya b) rehabilitasi lingkungan budidaya c. standarisasi dan kesehatan dan lingkungan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	702.03.03	a) standarisasi laboratorium dan kesehatan dan lingkungan b) standarisasi metode uji kesehatan ikan dan lingkungan d. obat ikan, kimia, dan bahan biologi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	702.03.04	a) registrasi obat ikan, kimia dan bahan biologi b) monitoring dan evaluasi obat ikan, kimia, dan bahan biologi e. pengendalian residu	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	702.04 702.04.00	a) perencanaan pengendalian residu b) tindak lanjut pengendalian residu 5. Usaha Budidaya a. investasi dan permodalan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	702.04.01	a) investasi b) permodalan b. kewirausahaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	702.04.02	a) bimbingan usaha b) kemitraan c. pelayanan usaha	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	702.04.03	a) perizinan b) pemantauan dan evaluasi d. kelembagaan dan ketenagakerjaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	702.04.04	a) kelembagaan b) ketenagakerjaan e. informasi usaha dan promosi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	703 703.00 703.00.00	a) informasi usaha b) promosi D. PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1. Pengolahan Hasil a. standarisasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
		a) analisis standar b) <u>penerapan standar</u>					
	703.00.01	b. pengembangan produk	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	703.00.02	a) pengembangan produk skala mikro, kecil, dan menengah b) pengembangan produk skala besar c. pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	703.00.03	a) bimbingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah b) kerja sama usaha mikro, kecil, dan menengah d. industri pengolahan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	703.00.04	a) bimbingan teknis industri pengolahan b) kerja sama asosiasi dan industri pengolahan e. sarana dan prasarana	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	703.01 703.01.00	a) sarana b) prasarana 2. Pengembangan Produk Non Konsumsi a. standarisasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	703.01.01	a) analisis standar b) <u>penerapan standar</u> b. promosi dan jaringan pasar ikan hias	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	703.01.02	a) promosi ikan hias b) jaringan pasar ikan hias c. pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
		a) bimbingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah b) <u>identifikasi dan evaluasi sentra pengolahan produk</u>					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	703.01.03	d. pengembangan industri	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	703.01.04	a) bimbingan teknis industri b) kerja sama industri e. sarana dan prasarana	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	703.02 703.02.00	a) sarana b) prasarana 3. Pemasaran Dalam Negeri a. kelembagaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	703.02.01	a). kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan b). kelembagaan pasar hasil perikanan b. analisis dan informasi pasar dalam negeri	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	703.02.02	a) analisis pasar dalam negeri b) informasi pasar dalam negeri c. jaringan distribusi dan kemitraan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	703.02.03	a) jaringan distribusi b) kemitraan d. promosi dan kerja sama	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	703.02.04	a) promosi b) kerja sama e. sarana dan prasarana	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
		a) sarana b) prasarana					
	703.03 703.03.00	4. Pemasaran Luar Negeri a. kelembagaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	703.03.01	a) analisis kelembagaan b) kerja sama kelembagaan b. analisis dan informasi pasar luar negeri	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	703.03.02	a) analisis kebutuhan import b) informasi pasar luar negeri c. pengembangan ekspor	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	703.03.03	a) peningkatan akses pasar b) pengamanan dan perlindungan akses pasar d. pengendalian impor	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
		a) analisis kebutuhan impor					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	703.03.04	b) pemantauan dan evaluasi impor e. promosi dan kerjasama	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	703.04 703.04.00	a) promosi b) kerja sama 5. Usaha dan investasi a. pelayanan usaha	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	703.04.01	a) pelayanan usaha mikro, kecil, dan menengah b) pelayanan usaha besar b. kemitraan usaha	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
		<u>a) kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah</u>					
	703.04.02	b) kemitraan usaha besar c. ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	703.04.03	a) tenaga kerja pengolahan b) tenaga kerja pemasaran d. investasi dan permodalan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	703.04.04	a) investasi b) permodalan e. informasi dan promosi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	704 704.00	a) informasi b) promosi E. KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL 1. Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	704.00.00	a. Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi a) rencana tata ruang laut nasional b) rencana tata ruang laut lintas wilayah dan perairan yuridiksi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	704.00.01	b. informasi dan evaluasi spasial	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	704.01 704.01.00	a) informasi spasial b) evaluasi spasial 2. Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan a. jejaring, data, dan informasi konservasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	704.01.01	a) jejaring konservasi b) data dan informasi konservasi b. konservasi wawasan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
		<u>a) perencanaan konservasi kawasan</u>					
	704.01.02	b) perlindungan dan pelestarian kawasan c. konservasi jenis ikan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	704.01.03	a) perancangan konservasi jenis ikan b) perlindungan dan pelestarian jenis ikan d. pemanfaatan kawasan dan jenis ikan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	704.02 704.02.00	a) pemanfaatan kawasan b) pemanfaatan jenis ikan 3. Pesisir dan Lautan a. mitigasi bencana lingkungan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	704.02.01	a) mitigasi bencana pesisir dan lautan b) adaptasi dampak perubahan iklim b. pendayagunaan sumber daya kelautan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	704.02.02	a) benda muatan kapal tenggelam b) jasa kelautan c. penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir dan laut	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	704.02.03	a) penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir b) penanggulangan pencemaran sumber daya laut d. rehabilitasi dan reklamasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	704.03 704.03.00	a) rehabilitasi b) reklamasi 4. Pendayagunaan Pulau-Pulau Terkecil a. identifikasi pulau-pulau terkecil	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	704.03.01	a) identifikasi potensi pulau-pulau terkecil b) data dan informasi pulau-pulau terkecil b. pengelolaan ekosistem pulau-pulau terkecil	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	704.03.02	a) rehabilitasi b) mitigasi dan adaptasi c. investasi dan promosi pulau-pulau terkecil	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	704.03.03	a) fasilitas investasi b) promosi d. sarana dan prasarana pulau-pulau terkecil	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	704.04 704.04.00	a) sarana pulau-pulau terkecil b) prasarana pulau-pulau terkecil 5. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha a. akses permodalan  a) akses perbankan b) akses nonbank	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	704.04.01	b. akses ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	704.04.02	a) identifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi b) implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi c. sosial budaya masyarakat	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	704.04.03	a) penguatan kelembagaan masyarakat b) peningkatan peran serta masyarakat d. pengembangan usaha	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	705 705.00	a) pelayanan usaha b) usaha mikro F. PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	705.00.00 705.00.01 705.00.02 705.01	a. pengawasan penangkapan ikan b. pengawasan pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran c. pengawasan usaha budidaya 2. Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	705.01.00	a. pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi a) pengawasan ekosistem perairan b) pengawasan kawasan konservasi					
	705.01.01	b. pengawasan pencemaran perairan a) pengawasan pencemaran pesisir laut dan pesisir pantai b) pengawasan pencemaran perairan umum dan pedalaman					
	705.01.02	c. pengawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil a) pengawasan pesisir b) pengawasan pulau-pulau terkecil					
	705.01.03	d. pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati a) pengawasan jasa kelautan b) pengawasan sumber daya non hayati					
	705.02	3. Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	705.02.00 705.02.01 705.02.02 705.02.03 705.03	a. Pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi b. Pengawasan pencemaran perairan c. Pengawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil d. Pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati 4. Kapal Pengawas	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	705.03.00	a. logistik dan operasional a) logistik b) operasional					
	705.03.01	b. perawatan kapal pengawas a) perawatan kapal pengawas wilayah Barat					
	705.03.02	b) perawatan kapal pengawas wilayah Timur c. pengawasan kapal pengawas a) pengawasan kapal pengawas wilayah Barat b) pengawasan kapal pengawas wilayah Timur					
	705.04	5. Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	705.04.00	a. sistem pemantauan					
	705.04.01	a) pengembangan sistem pemantauan b) kerja sama pemantauan					
	705.04.02	b. pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan					
	705.05	a) operasional sistem pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan					
	705.05.00	b) analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan					
	705.05.01	c. pengembangan infrastruktur pengawasan					
	705.05.02	a) penyiapan infastruktur b) evaluasi infastruktur					
	705.05.03	6. Penanganan pelanggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	705.05.01	a. penyidikan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kehutanan Prov. Sulbar	
	705.05.02	b. penanganan barang bukti dan awak kapal	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	705.05.03	c. kerjasama penegakan hukum dan fasilitas PPNS perikanan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	706	a) kerjasama penegakan hukum b) fasilitas PPNS perikanan d. pemantauan dan evaluasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	706	a) pemantauan b) evaluasi					
	706.00	G. KARANTINA IKAN					
	706.00.00	1. Tindak Karantina Ikan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	706.00.01	a. pemeriksaan ikan					
	706.00.02	b. penahanan					
	706.00.03	c. pengasingan					
	706.00.04	d. pengamatan					
	706.00.05	e. perlakuan					
	706.00.06	f. penolakan					
	706.00.07	g. pemusnahan					
	706.01	h. pelepasan/pembebasan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	706.01.00	2. Tertib Operasional	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	706.01.01	a. persvaratan lalu lintas pemasukan					
	706.01.02	b. persvaratan lalu lintas pengeluaran					
	706.01.03	c. permohonan sertifikat					
	706.01.04	d. pemasukan formulir					
	706.01.05	e. pemasukan sertifikat					
	706.01.06	f. evaluasi dan monitoring sertifikat					
	706.01.07	g. surat perintah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	706.02	h. rekomendasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	706.03	3. Pencegahan Penyakit	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	706.03	a. penutupan suatu area					
	706.03	b. pelanggaran lalu lintas ikan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	
	706.03	4. Pengawasan Karantina Ikan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DKP Prov. Sulbar	





NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	803.02	3 Magang	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
	803.03	a. Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Ijin b. Laporan Kegiatan Pengembangan Diri 4 Tugas Belajar	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
	803.04	a. Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Ijin b. Laporan Kegiatan Pengembangan Diri 5 Ijin Belajar Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
	803.05	a. Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Ijin b. Laporan Kegiatan Pengembangan Diri 6 Ujian Dinas	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
		a. Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Ijin b. <del>Laporan Kegiatan Pengembangan Diri</del>					
	803.06	7 Ujian Penyesuaian Ijazah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
	803.07	a. Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Ijin b. Laporan Kegiatan Pengembangan Diri 8 DP3/SKP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
	803.08	9 Daftar Usul Penetapan Angka Kredit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
	803.09	10 Disiplin Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
	803.10	11 Hukuman Disiplin	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
	803.11	12 Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
	803.12	13 Pembinaan Mental	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
	804 804.00	D Mutasi Pegawai 1 Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Mutasi antar Unit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
	804.01	2 Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
	804.02	3 Mutasi Keluarga	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	804.03	a. Surat Izin Pernikahan/Perceraian b. Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian c. Surat Nikah /Cerai d. Akte Kelahiran Anak e. Surat Keterangan Adopsi Anak f. Surat Keterangan Meninggal Dunia 4 Usul kenaikan pangkat/golongan/jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
	804.04	5 Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
	804.05	6 Pendelegasian Wewenang	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
	804.05.00 804.05.01 804.06	a. Pelaksana Tugas (Plt) b. Pelaksana Harian (Plh) 7 Peninjauan Masa Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
	804.07	8 Baperjakat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
	804.08	9 Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
	805 805.00	E Administrasi Pegawai 1 Data/ Keterangan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
	805.01	2 Cuti Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
	805.01.00 805.01.01	a. Cuti Besar b. <del>Cuti Sakit</del>					
	805.01.02 805.01.03 805.01.04 805.01.05 805.02	c. Cuti Bersalin d. Cuti Tahunan e. Cuti Alasan Penting f. Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) 3 Dokumentasi Identitas Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
	805.02.00 805.02.01 805.02.02 805.02.03	a. Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu b. Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan c. Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) d. Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)					
	805.03	4 Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
	805.04	5 Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	806	F Kesejahteraan Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
	806.00	1 Berkas tentang Lavanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai					
	806.01	2 Berkas tentang Lavanan Asuransi Pegawai/ASKES					
	806.02	3 Berkas tentang Lavanan Tabungan Perumahan					
	806.03	4 Berkas tentang Lavanan Bantuan Sosial					
	806.04	5 Berkas tentang Lavanan Pakiaian Dinas					
	806.05	6 Berkas tentang Lavanan Pegawai yang meninggal karena dinas					
	806.06	7 Berkas tentang Pemberian Tali Kasih					
	806.07	8 Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa					
	806.08	9 Berkas tentang Lavanan Olahraga dan Rekreasi					
	807	G Disiplin Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
	807.00	1 Pemberhentian Pegawai					
	807.00.00	a. Dengan Hormat					
	807.00.01	b. Tidak Dengan Hormat					
	807.01	2 Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun					
	807.02	3 Perselisihan /Sengketa Kepegawaian					
	808	H Organisasi Non Kedinasan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
	808.00	1 Korpri					
	808.01	2 Dharma Wanita					
	808.02	3 Asosiasi					
	808.03	4 Lain-Lain					
	809	I Berkas Perseorangan					
	809.00	1 Berkas Perseorangan Pejabat Negara	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	BKD Prov. Sulbar	
	809.01	a. Gubernur dan Wakil Gubernur 2 Berkas Perseorangan Pejabat Lainnya	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	BKD Prov. Sulbar	
	809.02	a. Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD b. Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPUD, dan Panwaslu Kada c. Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Lainnya d. Sekretaris Daerah Provinsi 3 Berkas Perseorangan Staf Ahli, Asisten dan Kepala OPD	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	BKD Prov. Sulbar	
	809.03	4 Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil :  a. Berkas Lamaran yang diterima b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya c. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN d. SK Pengangkatan CPNS e. Hasil Pengujian Kesehatan f. SK Pengangkatan PNS	Rahasia	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	BKD Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
		g. SK Peninjauan Masa Keria h. SK Kenaikkan Pangkat i. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan j. SK Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional k. SK Perpindahan Wilayah Keria l. SK Perpindahan Antar Instansi m. SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN) n. Berita Acara Pemeriksaan o. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS p. SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk q. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan r. SK Pemberian Uang Tunggu s. SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara t. SK Pengalihan PNS u. SK Pemberhentian sebagai PNS v. SK Pemberhentian Sementara w. Surat Keterangan Pernyataan Hilang x. Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang v. SK Penggantian Nama z. Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran aa. Akta Nikah/Cerai ab. Akta Kelahiran ac. Isian Formulir PUPNS ad. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan ae. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol af. Surat Keterangan Mutasi Keluarga ag. Surat Keterangan Meninggal Dunia/hilang ah. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan ai. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional ai. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus ak. Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala al. Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri am. Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri an. Kartu Daftar Ulang (Kardaf) PNS ao. Ijazah/Sertifikat ap. SK Penempatan/Penarikan Pegawai aq. SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk ar. Surat Pertimbangan Status PNS as. SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS at. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah au. SK Pensiun					
IX.	900	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>					
	900.00	A. Kebijakan Pemuda dan Olah Raga meliputi kebijakan dibidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, dan Harmonisasi dan Kemitraan meliputi:	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPORA Prov. Sulbar	
	901	1. Pengkaiian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan kebijakan 3. Perumusan dan penyusunan bahan 4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan					
	901.00	B. Pemberdayaan Pemuda 1. Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPORA Prov. Sulbar	
	901.00.00	a. Penelusuran (Duta Kepemudaan) - Potensi Lokal (Provinsi)					
	901.00.01	b. Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan) - Potensi Lokal (Provinsi)					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	901.00.02 901.01	c. Pengembangan 2. Peningkatan Wawasan Pemuda	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPORA Prov. Sulbar	
	901.01.00	a. Wawasan Kebangsaan - Program - Evaluasi					
	901.01.01	b. Wawasan Lingkungan - Program - Evaluasi					
	901.01.02	c. Wawasan Sosial dan Hukum - Program - Evaluasi					
	901.02	3. Peningkatan Kapasitas Pemuda	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPORA Prov. Sulbar	
	901.02.00	a. Kapasitas Imam dan Taqwa - Program - Evaluasi					
	901.02.01	b. Kapasitas IPTEK - Program - Evaluasi					
	901.02.02	c. Pemanfaatan IPTEK - Program - Evaluasi					
	901.03	4. Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPORA Prov. Sulbar	
	901.03.00	a. Pengkajian - Program - Evaluasi					
	901.03.01	b. Pengembangan - Program - Evaluasi					
	901.03.02	c. Pendayagunaan (fasilitasi) - Program - Evaluasi					
	902 902.00	C. Pengembangan Pemuda 1. Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPORA Prov. Sulbar	
	902.00.00	a. Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan - Program - Evaluasi					
	902.00.01	b. Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan - Program - Evaluasi					
	902.01	2. Kewirausahaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPORA Prov. Sulbar	
	902.01.00	a. Kelembagaan - Program - Evaluasi					
	902.01.01	b. Pengaderan - Program - Evaluasi					
	902.01.02	c. Perintisan - Program - Evaluasi					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	902.02	3. Organisasi Kepemudaan Dan Pengawasan Kepramukaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPORA Prov. Sulbar	
	902.02.00	a. Organisasi Kepemudaan - Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya - Program - Evaluasi - Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya - Program - Evaluasi - Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya - Program - Evaluasi					
	902.02.01	b. Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya - Pengkajian - Pengembangan					
	902.03	4. Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPORA Prov. Sulbar	
	902.03.00	a. Standardisasi - Organisasi Kepemudaan - Prasarana dan Sarana Kepemudaan					
	902.03.01	c. Infrastruktur b. Infrastruktur Pemuda - Prasarana Kepemudaan - Sarana Kepemudaan					
	902.04	5. Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPORA Prov. Sulbar	
	902.04.00	a. Kemitraan - Lintas Sektoral - Daerah - Luar Negeri					
	902.04.01	b. Penghargaan Pemuda - Pengembangan Peghargaan Kepemudaan					
	903	D. Pembudayaan Olahraga					
	903.00	1. Pengelolaan Olahraga Pendidikan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPORA Prov. Sulbar	
	903.00.00	a. Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah - Pengembangan - Evaluasi					
	903.00.01	b. Olahraga Pendidikan Tinggi - Pengembangan - Evaluasi					
	903.00.02	c. Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal - Pengembangan - Evaluasi					
	903.01	2. Pengelolaan Olahraga Rekreasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPORA Prov. Sulbar	
	903.01.00	a. Olahraga Massal - Pengembangan - Evaluasi					
	903.01.01	b. Olahraga Tradisional - Pengembangan - Evaluasi					
	903.01.02	c. Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	903.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan</li> <li>- Evaluasi</li> </ul> 3. Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPORA Prov. Sulbar	
	903.02.00	a. Sentra Olahraga <ul style="list-style-type: none"> <li>- Olahraga Pendidikan</li> <li>- Pengembangan</li> <li>- Evaluasi</li> <li>- Olahraga Rekreasi</li> <li>- Pengembangan</li> <li>- Evaluasi</li> <li>- Olahraga Prestasi</li> <li>- Pengembangan</li> <li>- Evaluasi</li> </ul>					
	903.02.01	b. Sekolah Khusus Olahraga <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provinsi</li> <li>- Pengembangan</li> <li>- Evaluasi</li> <li>- Nasional</li> <li>- Pengembangan</li> <li>- Evaluasi</li> </ul>					
	903.03	4. Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPORA Prov. Sulbar	
	903.03.00	a. Olahraga Tradisional <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokal</li> <li>- Nasional</li> </ul>					
	903.03.01	b. Layanan Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>- Olahraga Usia Dini dan Lansia</li> <li>- Olahraga Penderita Cacat</li> </ul>					
	903.04	5. Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPORA Prov. Sulbar	
	903.04.00	a. Kemitraan Keolahragaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lintas Sektoral</li> <li>- Daerah</li> <li>- Luar Negeri</li> </ul>					
	903.04.01	b. Penghargaan Olahraga <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelusuran</li> <li>- Penyelenggaraan</li> </ul>					
	904	E. Peningkatan Prestasi Olahraga					
	904.00	1. Pebibitan dan IPTEK Olahraga	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPORA Prov. Sulbar	
	904.00	a. Pebibitan Olahraga <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemandu Bakat</li> <li>- Penelusuran Bakat</li> <li>- Penelaahan Bakat</li> </ul>					
	904.00.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Olahragawan Berbakat</li> <li>- Program</li> <li>- Evaluasi</li> </ul>					
	904.00.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetisi</li> <li>- Nasional</li> <li>- Internasional</li> </ul>					
	904.01	b. IPTEK Olahraga <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan</li> <li>- Identifikasi dan Kajian</li> <li>- Penggunaan</li> <li>- Evaluasi dan Diseminasi</li> </ul>					
	904.01.00						
	904.01.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan</li> </ul>					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	904.02	2. Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPORA Prov. Sulbar	
	904.02 904.02.00	a. Tenaga Keolahragaan - Pengembangan Pelatih dan Instruktur - Nasional - Internasional					
	904.02.01	- Pengembangan Wasit dan Juri - Nasional - Internasional					
	904.02.02	- Pengembangan Tenaga Pendidik dan Pendukung					
	904.03	b. Organisasi Keolahragaan					
	904.03.00	- Pendidikan dan Rekreasi					
	904.03.01	- Olahraga Prestasi - Kelembagaan - Sumberdava					
	904.03.02	- Olahraga Fungsional dan Profesioanal					
	904.04	3. Industri dan Promosi Olahraga	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPORA Prov. Sulbar	
	904.04	a. Industri Olahraga					
	904.04.00	- Jasa Olahraga					
	904.04.01	- Produk Olahraga					
	904.04.02	- Manajemen Industri Olahraga					
	904.05	b. Promosi Olahraga					
	904.05.00	- Penyelenggaraan					
	904.05.01	4. Olahraga Prestasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPORA Prov. Sulbar	
	904.06	a. Daerah - Pengembangan - Pekan dan Kejuaraan Olahraga					
		b. Nasional - Pengembangan - Pekan dan Kejuaraan Olahraga					
		c. Internasional - Pengembangan - Olympic Games					
	904.07	5. Standardisasi dan infrastruktur Olahraga	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPORA Prov. Sulbar	
	904.07.00	a. Olahraga Prestasi					
	904.07.01	b. Olahraga Pendidikan dan Rekreasi					
	904.08	6. Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPORA Prov. Sulbar	
	904.08.00	a. Olahraga Prestasi					
	904.08.01	b. Olahraga Pendidikan dan Rekreasi					
	904.09	7. Infrastruktur Olahraga	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BKD Prov. Sulbar	
	904.09.00	a. Prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan					
	904.09.01	b. Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi					
	904.09.02	c. Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi					
<b>X.</b>	<b>1000</b>	<b>KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					
	1000.00	A Pendaftaran Penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDUKCAPIL Prov. Sulbar	
	1000.00.00	1 Identitas Penduduk					



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
		a. fasilitasi pelaksanaan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda b. penyiapan pemberian nomor kendali kartu keluarga dan kartu tanda penduduk c. fasilitasi pencetakan dan distribusi blangko dokumen kependudukan					
	1000.00.01	2 Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah NKRI					
	1000.00.02	a. fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk WNI b. fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk orang asing c. fasilitasi pelaksanaan perubahan alamat 3 Pindah Datang Penduduk Antar Negara a. fasilitasi pelaksanaan pendaftaran perpindahan penduduk Indonesia keluar Negeri dan WNI dari luar negeri b. fasilitasi pelaksanaan pendaftaran orang asing tinggal terbatas					
	1000.00.03	4 Pendataan Penduduk Rentan					
	1000.00.04	a. fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana b. fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk daerah terbelakang c. fasilitasi pelaksanaan pendataan orang terlanjar d. pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan 5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi a. monitoring pelaksanaan program pendaftaran penduduk b. evaluasi pelaksanaan program pendaftaran penduduk c. pelaksanaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk					
	1000.01 1000.01.00	B Pencatatan Sipil 1 Kelahiran dan Kematian a. fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran b. fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian c. fasilitasi pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian d. pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan kelahiran dan kematian	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDUKCAPIL Prov. Sulbar	
	1000.01.01	2 Perkawinan dan Perceraian a. fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama islam b. fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama non islam c. pencatatan perkawinan dan perceraian d. pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan perkawinan dan perceraian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	DISDUKCAPIL Prov. Sulbar	
	1000.01.02	3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDUKCAPIL Prov. Sulbar	
	1000.01.03	a. pelayanan perubahan dan pembatalan akta b. pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta c. pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan 4 Pencatatan Kewarganegaraan a. pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat kelahiran b. pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat non kelahiran c. pelaksanaan pencatatan pewarganegaraan kelahiran dan non kelahiran d. pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengangkatan pelayanan pencatatan pewarganegaraan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDUKCAPIL Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1000.01.04	5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDUKCAPIL Prov. Sulbar	
	1000.02 1000.02.00	C Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDUKCAPIL Prov. Sulbar	
	1000.02.01	a perencanaan pengembangan sistem informasi kependudukan b pengembangan aplikasi c pengembangan pemanfaatan infrastruktur 2 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDUKCAPIL Prov. Sulbar	
		a pengembangan sistem kelembagaan b pengembangan sumber daya manusia c. kelembagaan informasi kependudukan					
	1000.02.02	3 Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDUKCAPIL Prov. Sulbar	
	1000.02.03	a pengelolaan data administrasi kependudukan b pemeliharaan database administrasi kependudukan c pengembangan database administrasi kependudukan d. pelayanan pengelolaan data administrasi kependudukan 4 Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDUKCAPIL Prov. Sulbar	
	1000.02.04	a penyajian informasi administrasi kependudukan b pelaksanaan pelayanan informasi melalui media elektronik c. pelaksanaan layanan informasi melalui media cetak 5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDUKCAPIL Prov. Sulbar	
	1000.03 1000.03.00	a pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah b kebijakan kependudukan dan pengembangan wawasan kependudukan c. pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan d. pelaksanaan dokumentasi pelayanan informasi kependudukan D Pengembangan Kebijakan Kependudukan 1 Kuantitas Penduduk a pelaksanaan penyusunan analisis jumlah, struktur dan komposisi penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDUKCAPIL Prov. Sulbar	
		b pelaksanaan analisis pertumbuhan penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDUKCAPIL Prov. Sulbar	
		c. kebijakan kuantitas penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDUKCAPIL Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1000.03.01	2 Kualitas Penduduk	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	DISDUKCAPIL Prov. Sulbar	
	1000.03.02	3 Mobilitas Penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDUKCAPIL Prov. Sulbar	
	1000.03.03	4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDUKCAPIL Prov. Sulbar	
	1000.03.04	5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDUKCAPIL Prov. Sulbar	
	1000.04 1000.04.00	E Penyerasian Kependudukan 1 Indikator Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDUKCAPIL Prov. Sulbar	
	1000.04.01	2 Proyeksi Penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDUKCAPIL Prov. Sulbar	
	1000.04.02	3 Perencanaan Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDUKCAPIL Prov. Sulbar	
	1000.04.03	4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDUKCAPIL Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
XI.	1000.04.04	c. penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga usaha swasta  d. penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga non pemerintah 5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDUKCAPIL Prov. Sulbar	
	1100 1100.00	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b> A Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Badan Kesbangpol Prov. Sulbar	
	1100.00.00	1 Ketahanan Ideologi Negara a penguatan ideologi negara b implementasi ideologi negara					
	1100.00.01	2 Wawasan Kebangsaan a <u>penguatan wawasan kebangsaan</u>					
	1100.00.02	b pembinaan dan sosialisasi c. implementasi 3 Bela Negara a pendidikan bela negara b pemberdayaan bela negara	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Badan Kesbangpol Prov. Sulbar	
	1100.00.03	4 Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan a penguatan nilai-nilai sejarah b implementasi nilai-nilai sejarah c. penerbitan rekomendasi penelitian					
	1100.00.04	5 Pembauran dan Kewarganegaraan a pembinaan pembauran kebangsaan b pembinaan kewarganegaraan					
	1100.01	B Kewaspadaan Nasional					
	1100.01.00	1 Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Badan Kesbangpol Prov. Sulbar	
	1100.01.01	2 Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan					
	1100.01.02	3 Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan					
	1100.01.03	4 Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial					
	1100.01.04	5 a pedoman kewaspadaan nasional 6 Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing a pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Badan Kesbangpol Prov. Sulbar	
	1100.02	b surat pemberitahuan penelitian orang asing C Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Masyarakat					
	1100.02.00	1 Ketahanan Seni a fasilitasi pelaksanaan pelestarian kesenian b pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kesenian					
	1100.02.01	2 Ketahanan Budaya a fasilitasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan b pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kebudayaan					
	1100.02.02	3 Agama dan Kepercayaan a fasilitasi b data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota c. <u>pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan</u>					
	1100.02.03	d. pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan 4 Organisasi Kemasyarakatan a pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat (a) pendaftaran Ormas (b) database Ormas b laporan hasil kerjasama kegiatan dengan ORMAS/LNL					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
		c. evaluasi aktifitas Ormas : sanksi administrasi d. fasilitasi sengketa Ormas e. fasilitasi Ormas 5 Masalah sosial Kemasvarakatan a. fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba b. masalah sosial kemasvarakatan D Politik Dalam Negeri	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Badan Kesbangpol Prov. Sulbar	
	1100.02.04						
	1100.03						
	1100.03.00	1 Implementasi Kebijakan Politik a. implementasi kebijakan politik (a) sosialisasi dan publikasi best practise dan inovasi b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi					
	1100.03.01	2 Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan a. evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di pusat (a) pendampingan kuniungan kerja DPR-RI b. evaluasi kelembagaan politik pemerintahan daerah (a) orientasi anggota DPRD Provinsi					
	1100.03.02	3 Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik a. verifikasi dan evaluasi partai politik yang memperoleh kursi b. partai politik yang tidak memperoleh kursi c. pemerintah daerah d. database parpol					
	1100.03.03	4 Pendidikan Budaya Politik a. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik b. penyelenggaraan pendidikan budaya politik c. modul sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan					
	1100.03.04	5 Pemilihan Umum a. fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu b. evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat c. evaluasi pemilihan umum Presiden dan wakil presiden d. laporan hasil perkembangan politik di daerah e. laporan hasil kerjasama kegiatan dengan Ormas/LSM/LNL					
	1100.04	E Ketahanan Ekonomi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Badan Kesbangpol Prov. Sulbar	
	1100.04.00	1 Ketahanan Sumberdava Alam dan Kesenianan Perekonomian a. fasilitasi ketahanan di bidang sumberdava alam (a) sosialisasi dan publikasi best practise dan inovasi b. penanganan kesenianan perekonomian					
	1100.04.01	2 Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter a. fasilitasi identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi fiskal dan moneter b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi					
	1100.04.02	3 Perilaku Perekonomian Masvarakat a. pembinaan organisasi kemasvarakatan perekonomian b. evaluasi cinta produk dalam negeri dan perlindungan konsumen					
	1100.04.03	4 Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi a. evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama penanganan kejahatan lembaga perekonomian b. evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian					
<b>XII.</b>	<b>1200</b>	<b>KESEHATAN</b>					
	1200.00	A PERUMUSAN KEBIJAKAN	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
		1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan bahan 3 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 4 Pengumpulan dan pengolahan data 5 Penetapan dalam bentuk nspk dan standarisasi					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1201	B UPAYA KESEHATAN	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1201.01 1201.00.00 1201.00.01 1201.00.02 1201.00.03 1201.00.04 1201.00.05	1 Upaya Kesehatan Dasar a Pelayanan Kedokteran Keluarga b Praktik Klinis Bagi Dokter di Fankes Primer c Pelaksanaan Kesehatan Primer d Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas e Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit f ICD 10, Destistry & Stomatology					
	1201.00.06 1201.00.07 1201.00.08 1201.00.09 1201.00.10  1201.00.11  1201.00.12 1201.00.13 1201.01	g Infeksi Menular Lewat Tranfusi Darah h Penyakit Mulut di Tingkat Primer i Pembiayaan Darah j Penggunaan Darah Rasional k Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Darah l Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, sangat terpencil dan kepulauan m Akreditasi Puskesmas n Puskesmas Berprestasi 2 Upaya Kesehatan Rujukan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1201.01.00	a Pelayanan Kesehatan Rujukan a) Rumah Sakit Bergerak b) Rumah Sakit Pratama c) Rumah Sakit Publik d) Rumah Sakit Privat e) Rumah Sakit Khusus					
	1201.01.01	b Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)					
	1201.01.02	c Pelayanan Rumah Sakit Privat a) Akses Pelayanan SPGDT Call 119 b) Akses Pelayanan Rekamasa Jaringan dan Sel Punca c) Pelayanan Geriatri d) Pelayanan Medical Tourism e) Pelayanan Hiperbarik					
	1201.01.03	d Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain a) Rumah Sakit Rujukan Regional Jejaring Pelayanan Kanker  b) Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumah Sakit Rujukan Regional c) Pencegahan Fraud di Rumah Sakit					
	1201.01.04	e Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan a) Keselamatan Pasien di Rumah Sakit b) Pelayanan Jantung dan Pembuluh Darah di Rumah Sakit c) Pelayanan Penyakit Ginjal d) Pelayanan HIV/AIDS e) Pelayanan Tim Reproduksi Berbantu di Rumah Sakit f) Penguatan Rumah Sakit Vertikal sebagai Sister Hospital g) Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi (PPDSBK)					
	1201.01.05	f Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan a) Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan b) Biaya Klaim Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari Luar Negeri					
	1201.01.06 1201.01.07 1201.01.08	g Fasilitas Pelayanan Kesehatan Asing dan Perdagangan Jasa h Badan Pengawas di Rumah Sakit i Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan (Penanam Modal Asing) PMA a) Usulan Penetapan atau Peningkatan Kelas dari Pemilik RS atau Pimpinan Badan Hukum Rumah Sakit b) Rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi c) Profil dan data Rumah Sakit 3 (tiga) Tahun Terakhir					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
		d) Self Instrumen Assesment sesuai dengan kelas yang diajukan					
	1201.01.09	e) Keputusan Penetapan Kelas (Jika peningkatan kelas) f) Sertifikat Lulus Akreditasi (Jika Peningkatan Kelas) i Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lain a) Akreditasi Rumah Sakit Standar Internasional (JCI) b) Akreditasi Rumah Sakit dengan Standar Nasional c) Rumah Sakit Pasca Akreditasi Nasional d) Surveyor Akreditasi Rumah Sakit					
	1201.02	3 Keperawatan dan Keteknisian Medik	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1201.02.00	a Pelayanan Keperawatan Dasar					
	1201.02.01	b Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit					
	1201.02.02	c Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum					
	1201.02.03	d Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus					
	1201.02.04	e Bina Pelayanan Kebidanan					
	1201.02.05	f Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik					
	1201.03	4 Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1201.03.00	a Mikrobiologi dan Imunologi a) Laboratorium Kesehatan b) Laboratorium Klinik c) Laboratorium Puskesmas d) Laboratorium Mikrobiologi Kultur					
	1201.03.01	b Patologi dan Toksikologi					
	1201.03.02	a) PNPME b) Sarana Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) c Radiologi a) Pelayanan Radiologi b) Dosis Radiasi Nasional c) Radiologi, Radioterapi dan Kedokteran Nuklir d) Radioterapi di Rumah Sakit e) Telemedicine f) Radiologi Diagnostik g) Teleradiologi					
	1201.03.03	d Peritinan dan Sertifikasi a) Peritinan Pelayanan Radiologi b) Sertifikasi Peningkatan Kapabilitas					
	1201.03.04	e Sarana dan Prasarana Kesehatan a) Prasarana Bangunan Rumah Sakit Kelas A b) Prasarana Bangunan Rumah Sakit Kelas B c) Prasarana Bangunan Rumah Sakit Kelas C d) Prasarana Ruang Gawat Darurat e) Prasarana Ruang Operasi f) Prasarana Ruang Perawatan Intensif g) Prasarana Ruang Rawat Inap h) Prasarana Ruang Rehabilitasi Medik i) Prasarana Ruang Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD) j) Prasarana Ruang Yang Aman dalam Situasi dalam Situasi Darurat Dan Bencana k) Prasarana Instalasi Penyediaan Air Bersih untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan l) Prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan m) Prasarana Rumah Sakit Keselamatan Jiwa n) Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Gas Medik Dan Vakum Medik o) Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Tata Udara p) Prasarana Rumah Sakit Sistem Proteksi Kebakaran Aktif					
	1201.03.05	f Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan a) Kalibrasi BPFK/LPPK/UPFK b) Kalibrasi Rumah Sakit c) Kalibrasi Puskesmas d) Pemeliharaan Peralatan kesehatan Rumah Sakit					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1201.03.06	e) Pemeliharaan Peralatan kesehatan Puskesmas g) Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) a) ASPAK Rumah Sakit b) ASPAK Puskesmas c) ASPAK Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota					
	1201.04	5 Kesehatan Jiwa	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1201.04.00	a Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan a) Kesehatan Jiwa di Desa Siaga b) Kegawatdaruratan Psikiatrik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer c) Promosi Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer					
	1201.04.01	b Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan a) Layanan Unggulan di RS Jiwa b) Rehabilitasi Psikososial di RS Jiwa c) Indikator Mutu RS Jiwa d) Mutu Layanan Jiwa di RS Jiwa dan RSUD sesuai Penyelenggaraan RS					
	1201.04.02	c Etikolegal dan Asesmen a) Penanggulangan Penelantaran dan Pemasungan Serta Penanganan Salah Lainnya Terhadap Orang Dengan Penderita Gangguan Jiwa b) Visum Et Repertum					
	1201.04.03	d Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif, Rokok, dan Alkohol a) Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) b) Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gangguan Penggunaan Alkohol c) Wajib Laporkan Pecandu Narkotika d) Pencegahan Masalah Akibat Penggunaan Tembakau Eti Rehabilitasi Medis terkait Hukum					
	1201.04.04	e Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko a) Kesehatan Jiwa Di Sekolah b) Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial Penanggulangan Bencana c) Penanggulangan Autisme d) Kesehatan Jiwa Pada Kelompok Berisiko e) Psikologi Awal (PFA) Bagi Petugas Siaga Bencana					
	1202 1202.00	C PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN 1 Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1202.00.00	a Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB)					
	1202.00.01	- Difteri - Polio - Penyelenggaraan Kegiatan Survei Pre TAS filariasis - Surveilans influenza - Keracunan Pangan b Imunisasi - Pekan Imunisasi Nasional - Coldchain Bagi Petugas Imunisasi - Introduksi imunisasi DPT-HB-HIB (Pentavalen) pada bayi dan Balita - Imunisasi bagi Petugas Kesehatan - Imunisasi di Daerah Sulit - Imunisasi TT bagi wanita usia subur(WUS) - Imunisasi bagi masyarakat umum - Vaksin dan serum program imunisasi, Pencanangan vaksin baru DPT-HIB-Hib - Imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT, DPT, Pertusis, Tetanus dan HIB B/ Haemophilus Influenza tipe B					
	1202.00.02	c Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan - Pemberian ICV (International Certificate Vaccine)					





NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1202.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Frambusia</li> <li>- Aliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANEK)</li> </ul> 3 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BaDinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1202.02.00	a Pengendalian Malaria <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelambu berinsektisida (LLINs)</li> <li>- Eliminasi malaria</li> <li>- Crosschecker mikroskopis malaria</li> </ul>					
	1202.02.01	b Pengendalian Arbovirolosi <ul style="list-style-type: none"> <li>- DBD</li> <li>- Chikungunya</li> <li>- Ebola</li> </ul>					
	1202.02.02	c Pengendalian Zoonosis <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyakit flu burung</li> <li>- Vaksin Anti Rabies (VAR) baru</li> <li>- Penyakit Pes</li> <li>- Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.1)</li> </ul>					
	1202.02.03	d Pengendalian Filariasis dan Kecacingan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Filariasis</li> <li>- Kecacingan</li> <li>- Schistosomiasis</li> </ul>					
	1202.02.04	e Pengendalian Vektor					
	1202.03	4 Pengendalian Penyakit Tidak Menular					
	1202.03.00	a Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyakit Jantung</li> <li>- Penyakit Pembuluh darah</li> <li>- Penyakit Hipertensi</li> <li>- Penyakit Stroke</li> </ul>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1202.03.01	b Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyakit Diabetes Mellitus</li> <li>- Penyakit gangguan Metabolik</li> <li>- Penyakit gangguan Tiroid</li> <li>- Gangguan Obesitas</li> </ul>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1202.03.02	c Pengendalian Penyakit Kanker	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1202.03.03	d Pengendalian Penyakit Kronis dan Generatif	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1202.03.04	e Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyakit Akibat produk tembakau</li> <li>- Asma, Lupus, Thalassemia</li> </ul>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1202.04	5 Penyehatan Lingkungan					
	1202.04.00	a Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Kualitas Air Minum</li> </ul>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1202.04.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanitasi Total Berbasis Masyarakat</li> </ul> b Penyehatan Pemukiman dan Tempat-Tempat Umum  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Higiene sanitasi dan Bangunan Umum</li> <li>- Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan</li> <li>- Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum</li> </ul>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1202.04.02	c Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanggulangan kedaruratan bidang Kesehatan Lingkungan</li> <li>- Fasilitas Kesehatan Masyarakat di daerah terpencil</li> <li>- Pelabuhan Sehat, Pasar Sehat, dan Kota Sehat</li> <li>- Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar</li> </ul>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1202.04.03	d Higiene Sanitasi Pangan  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Makanan Jajanan</li> <li>- Restoran / Rumah Makan</li> <li>- Jasa Boga</li> <li>- Depot Air Minum</li> </ul>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1202.04.04	e Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medis Fasvankes</li> <li>- Limbah Medis (Free Mercury)</li> <li>- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)</li> <li>- Pengamanan Dampak kesehatan radiasi non pengion</li> </ul>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1202.05	6 Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan					
	1202.05.00	a Pengembangan Teknologi dan Laboratorium  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laboratorium Pengendali Penyakit</li> <li>- Laboratorium Kesehatan Lingkungan</li> <li>- Laboratorium Kesehatan Matra</li> <li>- Model dan Teknologi Tepat Guna</li> <li>- Uji kendali mutu dan kalibrasi</li> <li>- Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan pada instalasi</li> </ul>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1202.06	7 Sertifikasi Sanitasi Kesehatan dan Pengujian Kesehatan					
	1202.06.00	a Ship Sanitation  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ship Sanitation Control Exemption of Certificate (SSCEC)</li> <li>- Ship Sanitation Control of Certificate (SSCC)</li> <li>- Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K Kapal</li> </ul>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1203	D GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK					
		1 Gizi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1203.00	a Gizi Makro					
	1203.00.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi (1000 HPK, Stunting)</li> <li>- Pemantauan Pertumbuhan Anak (posvandu)</li> </ul>					
	1203.00.01	b Gizi Mikro					
	1203.01						

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1203.01.00 1203.01.01 1203.02 1203.02.00 1203.02.01 1203.02.02 1203.03 1203.03.00 1203.03.01 1203.03.02 1203.03.03 1203.03.04 1203.03.05 1203.03.06 1203.04 1203.04.00 1203.04.01 1203.04.02 1203.04.03 1204	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya penanggulangan masalah gizi mikro (GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium), KVA (Kekurangan Vitamin A), AGR (Anemia Gizi Resil))</li> <li>- Manajemen Taburia</li> </ul> <p>c Gizi Klinik dan Dietetik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi</li> <li>- Tatalaksana Anak Gizi Buruk</li> <li>- Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih</li> </ul> <p>d Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Makanan Pendamping ASI</li> <li>- ASI Eksklusif</li> <li>- Pedoman Gizi Seimbang</li> <li>- Makanan Bayi dan Anak</li> <li>- Buffer Stock Makanan Pendamping ASI</li> <li>- Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Kurang</li> <li>- Makanan Tambahan Anak Sekolah</li> </ul> <p>e Kewaspadaan Gizi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surveilans Gizi</li> <li>- Epidemiologi Kasus Gizi Buruk</li> <li>- Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana</li> <li>- Jejaring Informasi Pangan dan Gizi</li> </ul> <p>2 Kesehatan Ibu</p>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1204.00 1204.00.00 1204.00.01 1204.00.02 1204.01 1204.01.00 1204.01.01 1204.01.02 1204.02 1204.02.00 1204.02.01 1204.02.02 1204.02.03 1204.03 1204.03.00 1204.03.01 1204.04 1204.04.00 1204.04.01 1204.04.02 1204.04.03 1204.05 1204.05.00 1204.05.01 1204.05.02 1204.05.03 1204.06 1204.06.00 1204.06.01 1204.06.02 1204.07 1204.07.00	<p>a Kesehatan Ibu Hamil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Antenatal Terpadu</li> <li>- Pelayanan Kelas Ibu Hamil</li> <li>- Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA)</li> </ul> <p>b Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemitraan Bidan dan Dukun</li> <li>- Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)</li> <li>- Supervisi Fasilitatif</li> </ul> <p>c Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Maternal Perinatal</li> <li>- Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) /Pemberdavaan Masvarakat</li> <li>- Tanda Bahaya pada Kehamilan</li> <li>- Surveilans Kematian Ibu</li> </ul> <p>d Keluarga Berencana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan KB Pasca Persalinan</li> <li>- Pelatihan KB Pasca Persalinan</li> </ul> <p>e Perlindungan Kesehatan Reproduksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT)</li> <li>- Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan Awal Minimal/PPAM Kesoro)</li> <li>- Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan</li> <li>- Pengarus Utama Gender Bidang Kesehatan (PUGBK)</li> </ul> <p>3 Kesehatan Anak</p> <p>a Kelangsungan Hidup Bayi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Kesehatan Neonatal</li> <li>- Manajemen Asfeksia</li> <li>- Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah)</li> <li>- Pencegahan Infeksi</li> </ul> <p>b Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Dini Interfensi Deteksi Tumbuh Kembang)</li> <li>- Rujukan Tumbuh Kembang</li> <li>- Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (ICATT)</li> </ul> <p>c Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Screening Hypotheroid Congenital</li> </ul>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1204.07.01	- Surveillance Kesehatan Anak					
	1204.07.02	- Surveillance Kesehatan Bawaan					
	1204.08	d Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja					
	1204.08.00	- Tempat Penanganan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit					
	1204.08.01	- Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja					
	1204.08.02	- Usaha Kesehatan Sekolah					
	1204.09	e Perlindungan Kesehatan Anak					
	1204.09.00	- Korban kekerasan terhadap anak					
	1204.09.01	- Anak dengan disabilitas					
	1204.09.02	- Anak terlantar/anak jalanan di panti					
	1204.09.03	- Anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas/Rutan					
	1204.09.04	- Anak kelompok terasing/kelompok minoritas					
	1205	4 Kesehatan Tradisional Alternatif, dan Komplementer	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1205.00	a Kesehatan Tradisional Keterampilan					
	1205.00.00	- Akupresure					
	1205.00.01	- Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional					
	1205.00.02	- Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Fasyankes					
	1205.00.03	- Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya					
	1205.01	b Kesehatan Tradisional Ramuan					
	1205.01.00	- Health Tourism					
	1205.01.01	- Peningkatan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA)					
	1205.01.02	- Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)					
	1205.01.03	- Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional					
	1205.01.04	- Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasvankes					
	1205.02	c Kesehatan Alternatif dan Komplementer					
	1205.02.00	- Akupunktur					
	1205.02.01	- Obat Herbal / Obat Tradisional					
	1205.02.02	- Integrasi Yankestrad					
	1205.02.03	- Pelayanan Alternatif Komplementer lainnya					
	1205.03	d Penapisan dan Kemitraan					
	1205.03.00	- Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T)					
	1205.03.01	- Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer					
	1205.03.02	- Penapisan Pengobat Tradisional Asing					
	1205.03.03	- Kemitraan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer					
	1205.03.04	- Pengobat Tradisional (Lokall)					
	1205.03.05	- Asosiasi Pengobat Tradisional					
	1206	5 Kesehatan Kerja dan Olahraga	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1206.00	a Pelayanan Kesehatan Kerja					
	1206.00.00	- Penyakit Akibat Kerja					
	1206.00.01	- Pemeriksaan Kesehatan Pekerja					
	1206.00.02	- Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)					
	1206.01	b Kapasitas Kerja					
	1206.01.00	- Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif					
	1206.01.01	- Kapasitas Kesehatan Kerja					
	1206.01.02	- TP ASI					
	1206.02	c Lingkungan Kerja					
	1206.02.00	- Pelayanan Kesehatan Kerja di KKP					
	1206.02.01	- K3 Perkantoran					
	1206.02.02	- K3 Rumah Sakit					
	1206.02.03	- K3 Puskesmas					
	1206.02.04	- Biomonitoring Efek Kesehatan					
	1206.02.05	- Review Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan					
	1206.03	d Kemitraan Kesehatan Kerja					
	1206.03.00	- Pengembangan Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja					
	1206.03.01	- Kesehatan Nelayan					
	1206.03.02	- Integrasi Pos UKK					
	1206.03.03	- Kabupaten/Kota Percontohan					
	1206.03.04	- Penguatan Profesi					



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1207.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan Pestisida Di Rumah Tangga</li> <li>- Post Market &amp; Surveillance PKRT</li> </ul> 3 Kefarmasian ( Standarisasi, klinis, komunitas dan Obat Tradisional)	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1207.02.00	a Pelayanan Kefarmasian <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visite untuk Apoteker</li> <li>- Tanggung Jawab Apoteker terhadap Keselamatan Pasien (Patient Safety)</li> <li>- Penulisan Resep</li> </ul>					
	1207.02.01	b Farmasi Klinik <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pharmaceutical Care untuk Penyakit Arthritis Rematik</li> <li>- Pharmaceutical Care untuk Penyakit Asma</li> <li>- Pharmaceutical Care untuk Penyakit Flu Burung</li> <li>- Pharmaceutical Care untuk Penyakit Hati</li> <li>- Pharmaceutical Care untuk Penyakit Diabetes Mellitus</li> <li>- Pharmaceutical Care untuk Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan</li> <li>- Pharmaceutical Care untuk Penyakit Tuberculosis</li> <li>- Pharmaceutical Care Lainnya</li> <li>- Dispensing Sediaan Steril</li> <li>- Pencampuran Obat Suntikan Penanganan Sediaan Sitostatika</li> </ul>					
	1207.02.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pharmaceutical Care untuk Pasien Penyakit Jantung Koroner : Fokus Sindrom Koroner Akut</li> </ul> c Farmasi Komunitas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas</li> <li>- Kefarmasian di Rumah (Home Pharmacy Care)</li> <li>- Kefarmasian untuk Pasien Pediatri</li> <li>- Kefarmasian untuk Penyakit Malaria</li> <li>- Farmasi di Rumah Sakit</li> </ul>					
	1207.02.03	d Penggunaan Obat Rasional <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obat Rasional</li> <li>- Informasi Obat</li> <li>- Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik</li> </ul>					
	1207.03	4 Produksi dan Distribusi Kefarmasian <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan Terapi Obat</li> </ul>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1207.03.00	a Obat Tradisional <ul style="list-style-type: none"> <li>- Farmakope Indonesia</li> <li>- Farmakope Herbal Indonesia</li> <li>- Suplemen I Farmakope Indonesia</li> <li>- Suplemen II Farmakope Indonesia</li> <li>- Suplemen II Farmakope Indonesia</li> <li>- Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia</li> <li>- Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia</li> <li>- Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia</li> <li>- Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)</li> <li>- Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT)</li> <li>- Usaha Jamu Gendong (UJG)</li> <li>- Usaha Jamu Racik (UJR)</li> <li>- Farmakope Herbal Indonesia &amp; Suplemennya Versi Bahasa Inggris</li> </ul>					
	1207.03.01	b Kosmetik dan Makanan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keamanan Pangan</li> <li>- Kosmetika bagi Petugas</li> <li>- Industri Rumah Tangga bagi Petugas</li> <li>- Makanan Jajanan Anak Sekolah</li> <li>- Kodeks Kosmetika Indonesia</li> <li>- Materi Kosmetika Bahan Alam Indonesia</li> </ul>					
	1208 1208.00	F SURAT KETERANGAN, SERTIFIKASI DAN PERIJINAN 1 Surat Keterangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1208.00.00 1208.00.01 1208.00.02 1208.00.03 1208.01	a Surat Keterangan Special Acces Scheme (SAS ) b Surat Keterangan Alat Kesehatan c Sertifikasi Produksi PKRT d Surat Keterangan PKRT 2 Sertifikasi dan Perijinan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1208.01.00 1208.01.01 1208.01.02	a Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan b Sertifikasi Sarana Distribusi Alat Kesehatan c <del>Perijinan Dan Pengawasan Alat Kesehatan</del>					
	1208.01.03 1209 1209.00	d Perijinan Penyalur Alat Kesehatan G PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 1 Pencegahan, Mitigasi,Kesiapsiagaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1209.01	a Pencegahan dan Mitigasi b Kesiapsiagaan 2 Tanggap Darurat dan Pemulihan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1209.02	a Tanggap Darurat b Pemulihan 3 Pemantauan dan Informasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1209.03	a Pemantauan b Informasi 4 Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1209.04	5 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1210 1210.00	H INTELIGENSIA KESEHATAN 1 Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1210.01	a Inteligensia Anak b Inteligensia Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia 2 Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1210.01.00 1210.01.01	a Inteligensia Akibat Gangguan Bawaan b Inteligensia Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem Persyarafan					
	1211	I KESEHATAN HAJI					
	1211.00	1 Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1211.00.00 1211.00.01 1211.00.02	a Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji b Pelayanan Kesehatan jamaah Haji kab/kota c Klaim Pelayanan Kesehatan di Embarkasi/Debakasi atau KKP					
	1211.00.03 1211.00.04 1211.00.05	d Pelayanan Kesehatan Embarkasi e Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) f Rekrutmen Tenaga Musiman					



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1211.01	2 Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1211.01.00 1211.01.01 1211.01.02 1211.01.03 1211.01.04 1211.01.05 1211.01.06	a Advokasi dan Kemitraan Pembinaan Kesehatan Haji b Kesehatan Haji di Kab/kota c Kesehatan Haji Terpadu d Pemeriksaan Jasa Boga Catering Jemaah Haji e Vaksinasi jamaah Haji f Sanitasi Asrama Haji g Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia dan Arab Saudi					
	1212 1212.00	J PROMOSI KESEHATAN 1 Sarana Promosi Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
		a Booklet b Poster c Leaflet d Pamflet e Lembar Balik f Selebaran g Buletin h Festival i Lomba j Pameran k Seminar l Iklan Lavanan Masyarakat m Film n Radio Spot					
	1212.01	2 Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
		a Saka Bhakti Husada b Pemberdayaan dan Keselamatan Keluarga c Lembaga Sosial/Organisasi Masyarakat di Bidang Kesehatan d Kawasan Tanpa Rokok e Kerjasama dengan Swasta di Bidang Kesehatan f Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan g Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor di Bidang Kesehatan h Peran Serta Kader PKK dan Dasawisma dalam Mendukung Kesehatan Ibu dan Anak					
	1212.02	3 Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
		a Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan b Kampanye Promosi Kesehatan c Video Animasi Promosi Kesehatan					
	1212.03	4 Hari Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
		a Hari Kesehatan Nasional b Hari Kesehatan Dunia c Hari tanpa Tembakau se-Dunia d Hari-hari Besar Kesehatan					
	1213	K KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA 1 Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1214	L DATA DAN INFORMASI					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1214.00	1 Statistik Kesehatan  a Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan b Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
XIII.	1214.01	2 Analisis dan Diseminasi Informasi  a Analisis Data Kesehatan b Diseminasi Informasi Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1214.02	3 Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan  a Pengembangan Sistem Informasi b Bank Data	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1214.03	4 Identitas Penderita HIV/ AIDS	Rahasia	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	1214.04	5 Dokumen Rekam Medis Termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	Rahasia	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Dinas Kesehatan Prov. Sulbar	
	<b>1300</b>	<b>KEUANGAN</b>					
	1300.00	A. Perumusan Kebijakan  1. Pengkaiian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiaian bahan 3. Pemberian masukan dan dukungan dalam penvusunan kebijakan 4. Pengumpulan dan pengolahan data 5. Penetapan dalam bentuk peraturan/kebijakan dan standarisasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1301	B. Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)					
	1301.00	1. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1301.00.00	a. Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra - Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) - Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja)					
	1301.00.01	b. Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemda					
	1301.00.01	c. KUA beserta Nota Kesepakatannya					
	1301.00.01	d. Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)					
	1301.00.01	e. Nota Kesepakatan PPA					
	1301.00.01	f. Prioritas Plafon Anggaran					
	1301.01	2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1301.01.00	a. Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah					
	1301.01.01	b. Dokumen RKA-SKPD					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1301.02	3. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1301.02.00	a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD: - Nota Keuangan Pemerintah - Materi RAPBD					
	1301.02.01	b. Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah					
	1301.02.01	c. Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD					
	1301.02.02	d. Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta Lampirannya					
	1301.02.03	e. Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD beserta penjabarannya					
	1301.02.03	f. Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD					
	1301.02.04	g. Penetapan Perda APBD oleh Gubernur beserta Penjabarannya					
	1301.02.04	h. Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD					
	1301.03	4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1301.03	a. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan					
	1301.03.00	1) Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra Perubahan					
	1301.03.01	- Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) - Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renia)					
	1301.03.01	2) Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah					
	1301.03.02	3) KUA Perubahan beserta Nota Kesepakatan					
	1301.03.02	4) Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan					
	1301.03.02	5) Nota Kesepakatan PPA Perubahan					
	1301.03.02	6) Prioritas Plafon Anggaran Perubahan					
	1301.04	b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan					
	1301.04.00	1) Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah					
	1301.04.01	2) Dokumen RKA-SKPD Perubahan					
	1301.05	c. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)					
	1301.05.00	1) Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Perubahan: - Nota Keuangan Pemerintah - Materi RAPBD					
	1301.05.01	2) Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah					
	1301.05.02	3) Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD Perubahan					
	1301.05.03	4) Dokumen Rancangan Penjabaran APBD Perubahan beserta lampirannya					
	1301.05.04	5) Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD Perubahan beserta penjabarannya					
	1301.05.05	6) Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD Perubahan					
	1301.05.06	7) Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Gubernur beserta Penjabarannya					

1 NO	2 KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	3 KLASIFIKASI KEAMANAN	4 HAK AKSES	5 DASAR PERTIMBANGAN	6 UNIT PENGOLAH	7 KETERANGAN
	1302	C. Penyusunan Anggaran	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1302.00	1. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah					
	1302.00	2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)					
	1302.01	3. DPPA SKPD					
	1302.02	3. Pergeseran Anggaran					
	1303	D. Bina Kabupaten / Kota					
	1303.00	1. Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten/ Kota	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1303.00.00	a) APBD					
	1303.00.01	b) APBD-P					
	1303.01	2. Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1303.01.00	a) APBD					
	1303.01.01	b) APBD-P					
	1303.02	3. Monev Rancangan APBD Kabupaten/ Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1303.02.00	a) APBD					
	1303.02.01	b) APBD-P					
	1303.03	4. Monev Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1303.03.00	a) APBD					
	1303.03.01	b) APBD-P					
	1303.04	5. Laporan Keuangan Kabupaten/ Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1303.05	6. Bagi hasil dan bantuan keuangan kabupaten/kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1304	E. Pendapatan					
	1304.00	1. Pendapatan Asli Daerah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1304.00.00	a) Surat Ketetapan Pajak Daerah					
	1304.00.01	b) Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah					
	1304.00.02	c) Surat Ketetapan Retribusi Daerah					
	1304.00.03	d) Bukti Pembayaran Retribusi					
	1304.00.04	e) Bukti Penerimaan Jasa Layanan kesehatan Masyarakat					
	1304.00.05	f) Dokumen Rasionalitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah					
	1304.00.06	g) Bukti Penerimaan SKPD dari Badan Layanan Umum					
	1304.00.07	h) Bukti Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir					
	1304.00.08	i) Bukti Penerimaan Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank					
	1304.01	2. Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1304.01.00	a) Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak dan Bukan Pajak					
	1304.01.01	b) Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten					
	1304.01.02	c) Dana Alokasi Umum (DAU)					
	1304.01.03	d) Daerah yang tidak Menerima DAU					
	1304.01.04	e) Dana Alokasi Khusus (DAK)					
	1304.02	3. Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1304.02.00	a) Alokasi Dana Penyesuaian					
	1304.02.01	b) Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah					
	1304.02.02	c) Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat					
	1304.02.03	d) Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat					
	1304.02.04	e) Penerimaan Hibah					
	1304.02.05	f) SP3					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1304.03	4. Surat Tanda Setoran (STS)/ Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1304.04	5. Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1304.05	6. Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1304.06	7. Dokumen Piutang Daerah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1304.07	8. Dokumen Pengelolaan Investasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1305	F. Belanja					
	1305.00	1. SPD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1305.00.00 1305.00.01 1305.01	a) Belanja tidak langsung b) Belanja langsung 2. SP2D	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1305.01.00 1305.01.01 1306 1306.00	a) Belanja tidak langsung b) Belanja langsung G. Pembiayaan Daerah 1. Bukti Penerimaan Pembiayaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1306.00.00 1306.00.01 1306.00.02 1306.00.03 1306.00.04 1306.01	a) SiLPA b) Dana Cadangan c) Dana Bergulir d) Pinjaman Daerah e) Pengalihan Piutang PBB P2 2. Bukti Pengeluaran Pembiayaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1306.01.00 1306.01.01 1306.01.02 1306.01.03 1306.01.04 1307	a) Investasi Jangka Panjang b) Penyertaan Modal BUMD c) Penyertaan Modal BPR d) Pengeluaran Dana Cadangan e) Pembiayaan UMKM H. Pengelolaan Perbendaharaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1308	I. Pengelolaan Kas Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1308.00.00 1308.00.01	1. Penetapan Rekening 2. Rekening Bendahara Penerimaan					
	1308.00.02	3. Rekening Bendahara Pengeluaran					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1309	J. Bantuan/ Pinjaman Luara Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1310	K. Akuntansi dan Pelaporan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1310.00 1310.01 1310.02 1311	1. Rekonsiliasi 2. Laporan Keuangan 3. Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) L. Ketatausahaan Keuangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1311.00 1312	1. SKPP M. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1312.00 1312.01 1313	1. Manual Implementasi SKD 2. Kebijakan Akuntansi N. Penyaluran Anggaran Tugas Perbantuan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1313.00 1313.01 1313.02 1314	1. Perbendaharaan 2. Permintaan Pembayaran 3. Pembukuan Anggaran O. Pengelolaan Anggaran Pemilu	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1314.00 1314.01 1314.02 1314.03 1314.04 1314.05 1314.06 1314.07	1. Penyusunan Anggaran Pilkada 2. Peraturan/Pedoman/Standar Belania 3. Usulan RKA Pilkada 4. Pembahasan RKA Pilkada 5. RASK Pilkada 6. DRASK Pilkada 7. Dana Cadangan Pilkada 8. Rancangan Perda APBD Pilkada					
	1314.08 1315 1315.00	9. Persetujuan Perda APBD Pilkada P. Pelaksanaan Anggaran Pilkada dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu 1. Perbendaharaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1315.01	2. Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1315.02	3. Pengembalian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1315.03	4. Pengeluaran Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1315.04	5. PPKO	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1316	Q. Pelaksanaan Anggaran Pilkada dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1316.00	1. Perbendaharaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1316.01	2. Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1317 1317.00	R. Pembinaan 1. Pembinaan SDM	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1317.00.00	a) Sosialisasi					
	1317.00.01	b) Bimbingan dan Konsultasi					
	1317.00.02	c) Bimbingan Teknis					
	1317.01	2. Pembinaan Pertanggung jawaban					
	1317.01.00	a) LHP atas Laporan Keuangan					
	1318	S. Pengelolaan BMD					
	1318.00	1. Perumusan Kebijakan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1318.01	2. Perencanaan BMD	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1318.01.00	a) RKBMD Pengadaan					
	1318.01.01	b) RKBMD Pemeliharaan					
	1318.01.02	c) RKBMD Pemanfaatan					
	1318.01.03	d) RKBMD Pemindahtanganan					
	1318.01.04	e) RKBMD Penghapusan					
	1318.02	3. Realisasi BMD	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1318.02.00	a) Realisasi BMD					
	1318.02.01	b) Realisasi Pemeliharaan					
	1318.03	4. Penggunaan, Pemanfaatan dan Pengamanan BMD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1318.03.00	a) Penggunaan BMD					
	1318.03.01	b) Pemanfaatan BMD					
	1318.03.02	c) Pengamanan BMD					
	1318.04	5. Pemindahtanganan dan Pemusnahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1318.04.00	a) Pemindahtanganan BMD					
	1318.04.01	b) Pemusnahan BMD					
	1318.05	6. Penatausahaan dan Pengendalian	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPKPD Prov. Sulbar	
	1318.05.00	a) Pembukuan					
	1318.05.01	b) Laporan Inventarisasi					
	1318.05.02	c) Laporan Semesteran/ Tahunan					
<b>XIV.</b>	<b>1400</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					
	1400.00	<b>A KEBIJAKAN</b>					
		Kebijakan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana informatika, Informasi dan Humas	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
		1 Pengkaiian dan pengusulan kebijakan					
		2 Penyiapan bahan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1401 1401.00	B 3 Perumus Kebijakan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penvisunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk peraturan/kebijakan dan standarisasi SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA 1. Penataan Sumber Daya	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
	1401.00.00	a) Alokasi Spektrum Dinas - Alokasi Dinas Tetap - Alokasi Dinas Bergerak Darat					
	1401.00.01	b) Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat - Alokasi Dinas Penvisaran - Alokasi Dinas Penerbangan, Maritim dan Satelit					
	1401.00.02	c) Orbit Satelit - Notifikasi dan Penataan Filing Satelit - Tata Kelola Hubungan Antarpenvelenggara					
	1401.00.03	d) Ekonomi Sumber Dava - Analisa Industri dan Ekonomi - Penanganan Izin Pita					
	1401.00.04	e) Harmonisasi Teknik Spektrum - Teknik Spektrum Antar lembaga - Harmonisasi dan Notifikasi Terrestrial					
	1401.01	2. Operasi Sumber Daya	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
	1401.01.00	a) Pelayanan Spektrum Dinas - Pelayanan Dinas Tetap - Pelayanan Dinas Bergerak Darat					
	1401.01.01	b) Pelayanan Spektrum Non Dinas - Pelayanan Dinas Penyiaran - Pelayanan Dinas Penerbangan, Maritim, dan Satelit					
	1401.01.02	c) Sertifikasi Operator Radio - Pelayanan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antarpendinguduk - <u>Pelayanan Operator Radio</u>					
	1401.01.03	d) Penanganan Biava - Penanganan Piutang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio - Analisa dan Evaluasi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio					
	1401.01.04	e) Konsultansi dan Data Operasi Sumber Dava - Konsultansi dan Informasi Sumber Dava - Pengelolaan Data Operasi Sumber Dava					
	1401.02	3. Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
	1401.02.00	a) Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum - Rancang Bangun Teknologi Monitoring Spektrum - Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Spektrum					
	1401.02.01	b) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum - Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Spektrum - Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum					
	1401.02.02	c) Monitoring dan Penertiban Spektrum - Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Bergerak Tetap dan Bergerak Terrestrial - Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Non Bergerak Tetap dan Bergerak Terrestrial					
	1401.02.03	d) Monitoring dan Penertiban - Monitoring Standar Perangkat Pos dan Informatika - Penertiban Standar Perangkat Pos dan Informatika					
	1402	C PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA					



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1402.00	1. Pos	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
	1402.00.00	a) Layanan dan Penerapan Pos Universal					
		- Layanan					
	1402.00.01	- Penerapan Layanan					
		b) Layanan Pos Komersial					
		- Tata Kelola Layanan					
	1402.00.02	- Data dan Informasi Layanan					
		c) Prangko dan Filateli					
		- Prangko					
		- Filateli					
	1402.00.03	d) Iklim Usaha Pos					
		- Pos Universal					
		- Pos Komersial					
	1402.00.04	e) Pentarifan Pos					
		- Layanan Pos Universal					
		- Pos Komersial					
	1402.01	2. Telekomunikasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
	1402.01.00	a) Layanan Jaringan Telekomunikasi					
		- Akses					
		- Backbone					
	1402.01.01	b) Layanan Jasa Telekomunikasi					
		- Jasa Teleponi Dasar, Nilai Tambah Teleponi, Sistem dan Transaksi Elektronik					
		- Jasa Multimedia					
	1402.01.02	c) Penomoran Telekomunikasi dan Informatika					
		- Penomoran Telekomunikasi					
		- Penomoran Informatika					
	1402.01.03	d) Tarif dan Interkoneksi					
		- Tarif Telekomunikasi					
		- Interkoneksi Telekomunikasi					
	1402.01.04	e) Kelavakan Sistem Telekomunikasi					
		- Kelavakan Sistem Jaringan dan Jasa					
		- Penerapan Teknologi Telekomunikasi					
	1402.02	3. Penyiaran	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
	1402.02.00	a) Pemetaan dan Database					
		- Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi					
		- Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi					
	1402.02.01	b) Verifikasi dan Uji Coba Siaran					
		- Verifikasi dan Uji Coba Siaran Radio					
		- Verifikasi dan Uji Coba Siaran Televisi					
	1402.02.02	c) Radio					
		- Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing					
		- Radio					
		- Lembaga Penyiaran Swasta Radio					
	1402.02.03	d) Televisi					
		- Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Asing Televisi					
		- Lembaga Penyiaran Swasta Televisi					
	1402.02.04	e) Iklim Usaha Penyiaran					
		- Penyusunan dan Evaluasi Regulasi Penyiaran					
		- Penerapan Kewajiban Lembaga Penyiaran					
	1402.03	4. Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
	1402.03.00	a) Telekomunikasi Khusus Pemerintah					
		- Analisa Penyelenggaraan					
		- Pelayanan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1402.03.01	b) Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah - Analisa Penvelenggaraan - Pelayanan					
	1402.03.02	c) Layanan Khusus Penvarian - Publik Radio - Publik Televisi					
	1402.03.03	d) Pelayanan Kewajiban Universal - Perencanaan Pembangunan - Monitoring dan Evaluasi					
	1402.03.04	e) Pengembangan Infrastruktur - Perencanaan Infrastruktur - Analisa Ekonomis Infrastruktur					
	1402.04	5. Pengendalian Pos dan Informatika	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
	1402.04.00	a) Monitoring dan Evaluasi Pos - Monitoring - Evaluasi					
	1402.04.01	b) Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi - Monitoring - Evaluasi					
	1402.04.02	c) Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi - Monitoring - Evaluasi					
	1402.04.03	d) Monitoring dan Evaluasi Penvarian - Monitoring - Evaluasi					
	1402.04.04	e) Pencegahan dan Penertiban - Pencegahan - Penertiban					
	1403	D APLIKASI INFORMATIKA					
	1403.00	1. e-Government	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
	1403.00.00	a) Tata Kelola e-Government - Program e-Government - Evaluasi e-Government					
	1403.00.01	b) Teknologi dan Infrastruktur e-Government - Teknologi e-Government - Infrastruktur e-Government					
	1403.00.02	c) Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Government - Interoperabilitas e-Government - Interkoneksi e-Government					
	1403.00.03	d) Aplikasi Layanan Pemerintahan - Aplikasi Layanan Pemerintahan Pusat - Aplikasi Layanan Pemerintahan Daerah					
	1403.00.04	e) Aplikasi Layanan Publik - Inisiasi Aplikasi Layanan Publik - Fasilitasi Aplikasi Layanan Publik					
	1403.01	2. e-Business	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
	1403.01.00	a) Tata Kelola e-Business - Program e-Business - Evaluasi e-Business					
	1403.01.01	b) Teknologi dan Infrastruktur e-Business - Teknologi e-Business - Infrastruktur e-Business					
	1403.01.02	c) Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Business - Interoperabilitas e-Business - Interkoneksi e-Business					
	1403.01.03	d) Aplikasi Layanan e-Business - Bidang Usaha Kecil dan Mikro - Bidang Usaha Menengah dan Besar					
	1403.02	3. Pemberdayaan Informatika					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1403.02.00	a) Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
	1403.02.01	- Perancangan Model - Penerapan Model b) <u>Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perdesaan</u>					
	1403.02.02	- Pengembangan Model - Penerapan Model c) Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar					
	1403.02.03	- Pengembangan Model - Penerapan Model d) Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus					
	1403.03	- Pengembangan Model - Penerapan Model 4. Pemberdayaan Industri Informatika	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
	1403.03.00	a) Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika					
	1403.03.01	- Pemberdayaan - Promosi b) Industri Perangkat Informatika Pengguna					
	1403.03.02	- Pemberdayaan - Pengembangan Produk c) Industri Perangkat Lunak					
	1403.03.03	- Pemberdayaan - Pengembangan Produk d) Industri Konten Multimedia					
	1403.04	- Pengembangan Produk 5. Keamanan Informasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
	1403.04.00	a) Tata Kelola Keamanan Informasi					
	1403.04.01	- Kelembagaan - Manajemen Risiko b) Teknologi Keamanan Informasi					
	1403.04.02	- Infrastruktur - Aplikasi c) Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi					
	1403.04.03	- Infrastruktur - Aplikasi d) Penyidikan dan Penindakan					
	1403.04.04	- Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi - Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi e) <u>Budaya Keamanan Informasi</u>					
	1404 1404.00	- Penyidikan - Penindakan E INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1. Komunikasi Publik	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
	1404.04.00	a) Tata Kelola Komunikasi Publik					
	1404.04.01	- Program Komunikasi Publik - Monitoring dan Evaluasi b) Pengelolaan Opini Publik					
	1404.04.02	- Pengumpulan Opini Publik - Pengolahan Opini Publik c) Layanan Komunikasi Publik					
		- Pengumpulan Data - Pengolahan Data					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1404.01	2. Pengolahan dan Penyediaan Informasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
	1404.01.00	a) Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan					
		- Politik dan Kemanan					
		- Hukum dan Hak Asasi Manusia					
	1404.01.01	b) Informasi Perekonomian					
		- Keuangan, Perbankan, dan Jasa					
		- Industri dan Perdagangan					
	1404.01.02	c) Informasi Kesejahteraan Rakyat					
		- Agama, Sosial, dan Budaya					
		- Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup					
	1404.02	3. Pengelolaan Media Publik	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
	1404.02.00	a) Media Cetak					
	1404.02.01	b) Media Online					
	1404.02.02	c) Media Luar Ruang dan Audio Visual					
	1404.03	4. Kemitraan Komunikasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
	1404.03.00	a) Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara					
		- Program Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara					
		- <u>Monitoring dan Evaluasi</u>					
	1404.03.01	b) Kemitraan Media dan Dunia Usaha					
		- Program Kemitraan Media dan Dunia Usaha					
		- Monitoring dan Evaluasi					
	1404.03.02	c) Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi					
		- Program Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi					
		- Monitoring dan Evaluasi					
	1404.04	5. Layanan Informasi Internasional	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
	1404.04.00	a) Layanan Informasi Media Asing					
		- Program Layanan Informasi Media Asing					
		- Monitoring dan Evaluasi					
	1404.04.01	b) Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional					
		- Program Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional					
		- Monitoring dan Evaluasi					
	1404.04.02	c) Layanan Informasi Masyarakat Luar Negeri					
		- Program Layanan Informasi					
		- Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi					
	1405	F PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA					
	1405.00	1. Infrastruktur Informatika	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
		- Jaringan					
		- Piranti Teknologi Informatika					
		- Keamanan Informatika					
	1405.01	2. Sistem dan Data	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
		- Portal dan Konten					
		- Pengumpulan dan Pengolahan Data					
		- Pengembangan Aplikasi					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1405.02	3. Pusat Kerjasama Internasional	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
	1405.02.00	a Keria Sama Multilateral					
	1405.02.01	- Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Multilateral - Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Multilateral - Investasi dan Pasar Teknologi Informasi dan Komunikasi Multilateral					
	1405.02.02	b Keria Sama Regional - Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional - Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Regional - Investasi dan Pasar Teknologi Informasi dan Komunikasi Regional					
	1405.02.02	c Keria Sama Bilateral - Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bilateral - Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Bilateral					
	1405.03	4. Pusat Informasi dan Hubungan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
	1405.03.00	a Pelayanan Informasi - Media Baru - Media Konvensional - Dokumentasi dan Perpustakaan					
	1405.03.01	b Bimbingan Teknis Bimbingan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana informatika, Informasi dan Humas					
	1405.04	5 Dokumentasi dan Penerbitan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
	1405.04.00	a Gubernur					
	1405.04.01	b Wakil Gubernur					
	1405.04.02	c Pimpinan DPRD Provinsi					
	1405.04.03	d Sekretaris Daerah					
	1405.04.04	Eva OPD					
	1405.05	6 Sambutan/ Pidato	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
	1405.05.00	a Gubernur					
	1405.05.01	b Wakil Gubernur					
	1405.05.02	c Pimpinan DPRD Provinsi					
	1405.05.03	d Sekretaris Daerah					
	1405.06	7 Pelayanan Media	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
	1405.06.00	a Penerangan dan Publikasi					
	1405.07	8 Hubungan Antar Lembaga	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
	1405.07.00	a Hubungan antar Lembaga					
	1405.07.01	b Bakohumas					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1405.08	9 Tata Acara Pimpinan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
	1405.08.00 1405.08.01 1405.08.02 1405.08.03 1405.09	a Pengaturan Acara b Kunjungan c Agenda Pimpinan d Pelayanan Tamu 10 Keprotokolan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
	1405.10	a Penjadwalan Acara b Analisa dan Evaluasi c Pelaksanaan dan Pengendalian d Sarana e Hubungan Keprotokolan 11 Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Diskominfo Prov. Sulbar	
<b>XV.</b>	<b>1500</b>	<b>KOPERASI DAN UKM</b>					
	1500.00	A Kebijakan dalam Kelembagaan Koperasi dan UKM, Produksi, Pembiayaan, Pemasaran dan Jaringan Usaha, Pengkajian Sumber Daya UMKK Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Pengembangan Sumber Daya Manusia, MOU (Perjanjian Kerja Sama), Gerakan Kewirausahaan Nasional, Penetapan Bantuan a Pengkajian dan pengusulan kebijakan b Penyiapan kebijakan c Perumusan kebijakan d Pemberian masukan dan dukungan kebijakan e Penetapan dalam bentuk NSPK	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1501 1501.00	B Kelembagaan Koperasi dan UKM 1 Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1501.00.00	a Organisasi Koperasi dan UKM - Organisasi Koperasi - Organisasi UKM					
	1501.00.01	b Badan Hukum Koperasi - Penatausahaan Badan Hukum Koperasi - Evaluasi Badan Hukum Koperasi					
	1501.00.02	c Penelaahan Kasus Hukum - Kasus Hukum Koperasi - Kasus Hukum UKM					
	1501.01	2 Tata laksana Koperasi dan UKM	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1501.01.00	a Tata laksana Koperasi - Tata laksana Koperasi Primer - Tata laksana Koperasi Sekunder					
	1501.01.01	b Tata laksana Usaha Kecil dan Menengah - Tata laksana Usaha Kecil - Tata laksana Usaha Mengah					
	1501.01.02	c Klasifikasi Koperasi dan UKM - Klasifikasi Koperasi - Klasifikasi UKM					
	1501.02	3 Keanggotaan Koperasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1501.02.00	a Partisipasi Usaha dan Permodalan - Partisipasi Usaha - Partisipasi Permodalan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1501.02.01	b Partisipasi Pengawasan - Rapat Anggota - Pengawasan					
	1501.02.02	c Pengembangan Anggota - Kaderisasi - Penvuluhan					
	1501.03	4 Pengendalian dan Akuntabilitas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1501.03.00	a Pengendalian - Pengendalian Intern - Tindak Lanjut Hasil Pengendalian					
	1501.03.01	b Bidang Akuntabilitas dan Akuntansi - Akuntabilitas - Akuntansi dan Audit					
	1501.03.02	c Monitoring dan Evaluasi - Monitoring - Evaluasi					
	502 502.00	C Produksi 1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	502.00.00	a Tanaman Pangan - Padi - Palawija					
	502.00.01	b Hortikultura - Buah-Buahan dan Tanaman Obat - Tanaman Hias dan Sayur					
	502.00.02	c Sarana - Sarana Produksi - Sarana Pengolahan					
	502.01	2 Kehutanan dan Perkebunan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	502.01.00	a Kehutanan - Hutan Produksi - Hutan Kemasarakatan					
	502.01.01	b Perkebunan - Tanaman Semusim dan Rempah-Rempah					
	502.01.02	- Tanaman Keras c Sarana - Sarana Produksi - Sarana Pengolahan					
	502.02	3 Perikanan dan Peternakan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	502.02.00	a Perikanan - Perikanan Tangkap - Perikanan Budidaya					
	502.02.01	b Peternakan - Ternak Besar - Ternak Kecil					
	502.02.02	c Sarana - Sarana Produksi - Sarana Pengolahan					
	502.03	4 Industri Kerajinan dan Pertambangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	502.03.00	a Industri - Sandang, Logam dan Elektronika - Pangan, Kimia dan Aneka					
	502.03.01	b Kerajinan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	502.03.02	- Logam - Non Logam c Pertambangan dan Migas - Pertambangan Umum - Pertambangan Migas					
	502.04	5 Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	502.04.00	a Ketenagalistrikan dan Konstruksi - Listrik - Konstruksi					
	502.04.01	b Aneka Usaha - Jasa Umum - Angkutan					
	502.04.02	c Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi - Pariwisata - Pos dan Telekomunikasi					
	1503 1503.00	E Pembiayaan 1 Program Pendanaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1503.00.00	a Program Pendanaan Jangka Pendek - Program Pendanaan Koperasi Jangka Pendek - Program Pendanaan UKM Jangka Pendek					
	1503.00.01	b Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang - Program Pendanaan Koperasi Jangka Menengah dan Panjang - Program Pendanaan UKM Jangka Menengah dan Panjang					
	1503.00.02	c Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir - Program Pendanaan Usaha Mikro - Program Pendanaan Dana Bergulir					
	1503.01	2 Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1503.01.00	a Pengembangan dan Pengendalian KSP - Pengembangan Kelembagaan KSP - Pengendalian Kelembagaan KSP					
	1503.01.01	b Pengembangan dan Pengendalian USP Koperasi - Pengembangan USP Koperasi - Pengendalian USP Koperasi					
	1503.01.02	c Pengembangan dan Pengendalian USP-LKM - Pengembangan USP-LKM - Pengendalian USP-LKM					
	1503.02	3 Urusan Permodalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1503.02.00	a Pengembangan Permodalan Sendiri - Permodalan Sendiri Koperasi - Permodalan Sendiri UKM					
	1503.02.01	b Pengembangan Permodalan Luar - Permodalan Bank - Permodalan Non Bank					
	1503.02.02	c Pengembangan Kredit Program - Kredit Program Bank - Kredit Program Non Bank					
	1503.03	4 Asuransi dan Jasa Keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1503.03.00	a Asuransi - Asuransi Koperasi - Asuransi UKM					
	1503.03.01	b Perpajakan - Perpajakan Koperasi					



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1503.03.02	- Perpajakan UKM c Jasa Keuangan dan Kredit Komersial - Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank - Jasa Keuangan dan Kredit Non Komersial Bank	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1503.04	5 Pembiayaan dan Penjaminan Kredit					
	1503.04.00	a Lembaga Pembiayaan - Modal Ventura - Sewa Guna Usaha dan Anak Piutang					
	1503.04.01	b Penjaminan Kredit - Penjaminan - Asuransi Kredit					
	1503.04.02	c Pasar Modal - Obligasi - Modal Penvertaan					
	1504	F Pemasaran dan Jaringan Usaha	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1504.00	1 Perdagangan Dalam Negeri					
	1504.00.00	a Pengadaan - Pengadaan Sektor Formal - Pengadaan Sektor Informal					
	1504.00.01	b Distribusi - Distribusi Sektor Formal - Distribusi Sektor Informal					
	1504.00.02	c Pengembangan - Pengembangan Sektor Formal - Pengembangan Sektor Informal					
	1504.01	2 Ekspor dan Impor	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1504.01.00	a Ekspor - Ekspor Koperasi - Ekspor UKM					
	1504.01.01	b Impor - Impor Koperasi - Impor UKM					
	1504.01.02	c Hubungan Perdagangan Internasional - Hubungan Perdagangan Multilateral dan Regional - Hubungan Perdagangan Bilateral					
	1504.02	3 Sarana dan Prasarana Pemasaran					
	1504.02.00	a Sarana - Pengembangan Pasar Tradisional - Pengembangan Sentra Pemasaran	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1504.02.01	b Prasarana - Lembaga Perantara - Fasilitas HAKI					
	1504.02.02	c Pengembangan Potensi Pemasaran - Pengembangan Potensi Pemasaran Koperasi - Pengembangan Potensi Pemasaran UKM					
	1504.03	4 Kemitraan dan Jaringan Usaha					
	1504.03.00	a Kemitraan - Kemitraan Koperasi - Kemitraan UKM					
	1504.03.01	b Jaringan Usaha - Jaringan Usaha Koperasi - Jaringan Usaha UKM					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1504.03.02  1504.04	c Pengembangan Kerja sama Kelembagaan - Pengembangan Kerja sama Kelembagaan Koperasi - Pengembangan Kerja sama Kelembagaan UKM  e Informasi dan Publikasi Bisnis	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1504.04.00  1504.04.01  1504.04.02  1504.05 1505 1505.00	a Pengumpulan Informasi - Pengumpulan Informasi Koperasi - Pengumpulan Informasi UKM  b Pengolahan Informasi - Pengolahan Informasi Koperasi - Pengolahan Informasi UKM  c Publikasi dan Promosi - Publikasi dan Promosi Koperasi - Publikasi dan Promosi UKM  d Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM G Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 Pengembangan Kewirausahaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1505.00.00  1505.00.01  1505.00.02  1505.01	a Lembaga Kewirausahaan - Pengembangan Jaringan Kewirausahaan - Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan  b Penumbuhan Kewirausahaan - Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan - Evaluasi Kewirausahaan  c Sosialisasi Kewirausahaan - Perangkat Lunak - Promosi Kewirausahaan  2 Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1505.01.00  1505.01.01  1505.02	a Diklat Formal dan Informal - Diklat Formal - Diklat Informal  b Kerjasama Lembaga Diklat - Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah - Hubungan Lembaga Diklat Non Pemerintah  3 Peran Serta Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1505.02.00 1505.02.01	a Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan UKM - Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi - Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap UKM  b Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan UKM					
	1505.02.02  1505.03  1505.03.00  1505.03.01  1505.03.02	- Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi - Peningkatan Dukungan LSM Terhadap UKM c Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi - Dukungan Organisasi Profesi terhadap Koperasi - Dukungan Organisasi Profesi terhadap UKM  4 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM  a Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM - Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi - Monitoring dan Evaluasi Diklat UKM  b Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal - Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal - Monitoring dan Evaluasi Diklat Informal  c Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1505.04	Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Non Pemerintah 5 Advokasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1505.04.00	a Advokasi Organisasi dan Manajemem - Advokasi Organisasi - Advokasi Manajemem					
	1505.04.01	b Advokasi Kemitraan dan Teknologi - Advokasi Kemitraan - Advokasi Teknologi					
	1505.04.02	c Advokasi Peraturan Perundang-Undangan - Kajian Penerapan - Sosialisasi Perundang-Undangan					
	1506 1506.00	H Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha 1 Produktifitas dan Mutu	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1506.00.00	a Produktifitas - Inkubator Teknologi - Pengembangan Klaster					
	1506.00.01	b Peningkatan Mutu - Disain - Standarisasi					
	1506.00.02	c Sertifikasi Produk - Sertifikasi - Label dan Merek					
	1506.01	2 Restrukturisasi Usaha	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1506.01.00	a Restrukturisasi Manajemem - Manajemem Koperasi - Manajemem UKM					
	1506.01.01	b Restrukturisasi Pendanaan - Pendanaan Koperasi - Pendanaan UKM					
	1506.01.02	c Restrukturisasi Kelembagaan - Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi - Restrukturisasi Kelembagaan UKM					
	1506.02	3 Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1506.02.00	a Kelembagaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) - Asosiasi dan Manajemem LPB - Akreditasi LPB					
	1506.02.01	2 Pengembangan Bisnis LPB - Peningkatan Kerja Sama LPB - Kerja Sama Lavanan LPB					
	1506.02.02	c Pengembangan Jaringan LPB - Kerja Sama Kelembagaan LPB - Kerja Sama Sarana dan Teknologi					
	1506.03	4 Fasilitasi Investasi UKMK	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1506.03.00	a Investasi Klaster UKMK - Fasilitasi Investasi UKMK Agro Bisnis - Fasilitasi Investasi UKMK Non Agro Bisnis					
	1506.03.01	b Pengembangan Kerja Sama Investasi Usaha - Pengembangan Pangan - Pengembangan Non Pangan					
	1506.03.02	c Fasilitas Investasi Aneka Usaha UKMK - Fasilitasi Investasi Usaha Koperasi					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
		- Fasilitas Investasi Usaha UKM					
	1506.04	5 Pengembangan Sistem Bisnis	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1506.04.00	a Fasilitas Transaksi					
		- Dalam Negeri					
		- Luar Negeri					
	1506.04.01	b Kerja Sama Usaha					
		- Pertukaran Koperasi					
		- Pertukaran UKM					
	1506.04.02	c Jaringan Komunikasi Bisnis					
		- Pengembangan Sarana Komunikasi Bisnis					
		- Komunikasi Bisnis					
	1507	I Pengkajian Sumber Daya UMK					
	1507.00	1 Penelitian Koperasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1507.00.00	a Perencanaan dan Pengendalian					
		- Perencanaan					
		- Evaluasi dan Pelaporan					
	1507.00.01	b Penyelenggaraan					
		- Kelembagaan Koperasi					
		- Bisnis Koperasi					
	1507.00.02	c Tata Laksana Penelitian					
		- Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi					
		- Sarana dan Prasarana					
	1507.01	2 Penelitian UKM	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1507.01.00	a Perencanaan dan Pengendalian					
		- Perencanaan					
		- Evaluasi dan Pelaporan					
	1507.01.01	b Penyelenggaraan					
		- Kelembagaan UKM					
		- Bisnis UKM					
	1507.01.02	c Tata Laksana Penelitian					
		- Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi					
		- Sarana dan Prasarana					
	1507.02	3 Penelitian Sumber Daya	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1507.02.00	a Perencanaan dan Pengendalian					
		- Perencanaan					
		- Evaluasi dan Pelaporan					
	1507.02.01	b Penyelenggaraan					
		- Sumber Daya Manusia					
		- Pembiayaan					
	1507.02.02	c Tata Laksana Penelitian					
		- Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi					
		- Sarana dan Prasarana					
	1507.03	4 Pengembangan Perkaderan UMK	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulbar	
	1507.03.00	a Penyuluhan					
		- Penyelenggaraan					
		- Materi Penyuluhan					
	1507.03.01	b Perkaderan					
		- Penilaian					
		- Pengembangan					
	1507.03.02	c Kerja Sama dan Jaringan					
		- Lembaga Pemerintah					

1	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
XVI.	1600	- Lembaga Non Pemerintah <b>LINGKUNGAN HIDUP</b> A KEBIJAKAN	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DLH Prov. Sulbar	
	1600.00	Kebijakan di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, pengelolaan B3, limbah B3, dan sampah, penataan hukum lingkungan, komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan: - Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Wilayah - Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Sektor - Kajian Dampak Lingkungan - Pengembangan Perangkat Kebijakan 2 <u>Penyiapan bahan</u>					
	1601 1601.00	3 Pemberian masukan dan dukungan dalam penvisunan kebijakan 4 Pengumpulan dan pengolahan data 5 penetapan dalam bentuk peraturan B TATA LINGKUNGAN 1 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DLH Prov. Sulbar	
	1601.00.00	a. Inventarisasi, penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup a) Dokumentasi Inventarisasi b) Pedoman Inventarisasi c) Penetapan Ekoregion d) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional e) Pedoman Penyusunan RPPLH Provinsi, RPPLH Kabupaten/Kota					
	1601.00.01	b. Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam a) Evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam b) Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam					
	1601.01	2 Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DLH Prov. Sulbar	
	1601.01.00 1601.01.01 1601.02	a. Evaluasi Penerapan b. Perencanaan Lingkungan Hidup 3 Ekonomi Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DLH Prov. Sulbar	
	1601.02.00	a. Perencanaan a) Valuasi Ekonomi b) Internalisasi Lingkungan					
	1601.02.01 1601.03	b. Insentif dan Pendanaan Lingkungan 4 Dampak Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DLH Prov. Sulbar	
	1601.03.00 1601.03.01	a. Bimtek Dampak Lingkungan b. Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan a) Penilaian dokumen lingkungan b) Pemeriksaan dokumen lingkungan					
	1601.03.02	c. <u>Evaluasi dan Tindak Lanjut</u> a) Evaluasi b) Tindak Lanjut					
	1602	C PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1602.00	1 Pemantauan dan Pengawasan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DLH Prov. Sulbar	
	1602.00.00	a. Manufaktur, Prasarana dan Jasa a) Industri Kimia b) Industri Logam, Elektronika dan Mesin c) Aneka Industri d) Prasarana dan Jasa					
	1602.00.01	b. Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas					
	1602.00.02	c. Agro Industri dan Usaha Skala Kecil a) Peternakan dan Perikanan b) Perkebunan c) Kehutanan dan Holtikultura d) Usaha Skala Kecil					
	1602.00.03	d. Udara Sumber Bergerak a) Transportasi Air dan Udara b) Transportasi Darat c) Transportasi Kereta Api dan Kendaraan Berat					
	1602.01	2 Evaluasi dan Pengembangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DLH Prov. Sulbar	
	1602.01.00	a. Manufaktur, Prasarana dan Jasa a) Industri Kimia b) Industri Logam, Elektronika dan Mesin c) Aneka Industri d) Prasarana dan Jasa					
	1602.01.01	b. Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas					
	1602.01.02	c. Agro Industri dan Usaha Skala kecil a) Peternakan dan Perikanan b) Perkebunan c) Kehutanan dan Holtikultura d) Usaha Skala Kecil					
	1602.01.03	d. Udara Sumber Bergerak a) Transportasi Air dan Udara b) Transportasi Darat c) Transportasi Kereta Api dan Kendaraan Berat					
	1603	<b>D PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM</b>					
	1603.00	1 Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DLH Prov. Sulbar	
	1603.00.00	a. Pengembangan a) Sumber Daya Genetik b) Keamanan Hayati					
	1603.00.01	b. Pemanfaatan a) Sumber Daya Genetik					
	1603.00.02	c. Pengelolaan Sumber Daya Genetik a) Pengembangan dan Pemanfaatan b) Pemantauan dan Pengawasan					
	1603.00.03	d. Keamanan Hayati a) Pengembangan dan Pengelolaan b) Pemantauan dan Pengawasan					
	1603.00.04	e. Pengendalian Kerusakan Lahan a) Lahan Budidaya b) Lahan Non Budidaya					
	1603.01	2 Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DLH Prov. Sulbar	
	1603.01.00	a. Kerusakan Ekosistem a) Sungai b) Kerusakan Ekosistem c) Pengelolaan Kualitas Air					
	1603.01.01	b. Danau a) Pengendalian Kerusakan Ekosistem b) Pengelolaan Kualitas Air					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1603.01.02  1603.02  1603.02.00 1603.02.01 1603.02.02 1603.03	c. Rawa a) Rawa gambut b) Rawa bukan gambut 3 Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut  a. Pencegahan b. Penangulangan c. Pemulihan 4 Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer	Biasa/ Terbuka     Biasa/ Terbuka	Eselon IV     Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar   Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DLH Prov. Sulbar   DLH Prov. Sulbar	
	1603.03.00 1603.03.01  1603.03.02  1603.03.03 1603.04  1603.04.00  1603.04.01  1604 1604.00  1604.00.00  1604.00.01  1604.00.02  1604.01  1604.01.00 1604.01.01 1604.01.02 1604.01.03	a. Perangkat Mitigasi b. Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca a) Laporan inventarisasi GRK nasional b) Data bidang inventarisasi GRK c. Pengendalian Bahan Perusak Ozon a) Surat rekomendasi kepada importir terdaftar dan bahan perusak ozon b) Hibah bantuan luar negeri terkait program perlindungan lapisan ozon d. Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan 5 Adaptasi Perubahan Iklim  a. Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim a) Pengembangan perangkat adaptasi perubahan iklim b) Pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim b. Kerentanan Perubahan Iklim a) Identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim b) Media kliring kerentananan perubahan iklim E PENGELOLAAN B3, LIMBAH, DAN SAMPAH 1. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun  a. Registrasi dan notifikasi a) Registrasi b) Notifikasi b. Pemantauan a) Sektor industri b) Sektor non industri c. Evaluasi dan Tindak Lanjut a) Sektor industri b) Sektor non industri 2. Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  a. Pengumpulan dan Pemanfaatan b. Pengangkutan dan Pengolahan c. Penimbunan dan Dumping d. Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas Batas a) Notifikasi b) Rekomendasi Limbah Lintas Batas 3 Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3  a. Pemantauan a) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas b) Manufaktur c) Agroindustri d) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi b. Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi	Biasa/ Terbuka     Biasa/ Terbuka     Biasa/ Terbuka	Eselon IV     Eselon IV     Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar   Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar   Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DLH Prov. Sulbar   DLH Prov. Sulbar   DLH Prov. Sulbar	
	1604.02  1604.02.00  1604.02.01		Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DLH Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1604.03	a) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas b) Manufaktur c) Agroindustri d) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi 4 Pengelolaan Sampah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DLH Prov. Sulbar	
	1604.03.00 1604.03.01 1604.03.02 1604.03.03 1605 1605.00	a. Pembatasan Sampah b. Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah c. Pembentukan Dewan Adipura d. Penetapan Pemenang Adipura F HUKUM LINGKUNGAN 1. Hukum Administrasi Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DLH Prov. Sulbar	
	1605.00.00 1605.00.01	a. Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan a) Pengelolaan Pengaduan b) Pengembangan Pengaduan b. Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan a) Penerapan hukum administrasi lingkungan b) Pengembangan hukum administrasi lingkungan					
	1605.01	2 Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	DLH Prov. Sulbar	
	1605.01.00 1605.01.01	a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan a) Administrasi Gugatan b) Gugatan b. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan a) <u>Kerugian Negara dan Masyarakat</u>					
	1605.02	b) Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 3 Penegakan Hukum Pidana Lingkungan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	DLH Prov. Sulbar	
	1605.02.00 1605.02.01 1605.02.02 1605.03	a. Penvidikan a) Administrasi Penvidikan b) Pelaksanaan Penvidikan b. Koordinasi Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut a) Koordinasi penuntutan b) Evaluasi dan tindak lanjut c. Koordinasi Pembinaan Penvidik Pegawai Negeri Sipil 4 Perjanjian Internasional Lingkungan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	DLH Prov. Sulbar	
	1605.03.00 1605.03.01	a. Pendapat Hukum Perianjian Internasional a) Pendapat Hukum Proses Pengesahan Perjanjian Internasional b) Tindak Lanjut Perianjian Internasional b. Evaluasi Perianjian Internasional a) Evaluasi Perianjian Internasional Pencemaran b) Evaluasi Perianjian Internasional Perusakan					
	1606 1606.00	G KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Komunikasi Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DLH Prov. Sulbar	
	1606.00.00 1606.00.01	a. Pengembangan Komunikasi a) Program Komunikasi b) Evaluasi Komunikasi b. Publikasi dan Kampanve a) Publikasi b) Kampanve					



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1606.01	2. Penguatan Inisiatif Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DLH Prov. Sulbar	
	1606.01.00	a. Komunitas Pendidikan Lingkungan a) Pengembangan dan Bimbingan b) Evaluasi					
	1606.01.01	b. Kearifan Lingkungan a) Inventarisasi b) Revitalisasi					
	1606.02	3. Peningkatan Peran Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DLH Prov. Sulbar	
	1606.02.00	a. Masvarakat Perkotaan a) Masvarakat Kawasan Permukiman b) Masvarakat Kawasan Rentan					
	1606.02.01	b. Masvarakat Pedesaan a) Masvarakat Petani b) Masvarakat Nelayan					
	1606.03	4. Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DLH Prov. Sulbar	
	1606.03.00	a. Organisasi Sosial Dan Masyarakat					
	1606.03.01	b. Organisasi Profesi dan Dunia Usaha					
	1607	H PEMBINAAN SARANA TEKNIS LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS					
	1607.00	1. Data dan Informasi Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DLH Prov. Sulbar	
	1607.00.00	a. Pengelolaan Data a) Pengumpulan dan Pengolahan Data b) Manajemen Basis Data					
	1607.00.01	b. Pengelolaan Informasi a) Analisis Data dan Penilaian Informasi b) Perpustakaan					
	1607.00.02	c. Pengembangan Perangkat Lunak a) Pengembangan Instrumen Lavanan Informasi b) Pengembangan Instrumen Analisis Data					
	1607.00.03	d. Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan Jaringan a) Pengembangan Sistem Jaringan b) Pemeliharaan Jaringan					
	1607.01	2. Kelembagaan Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DLH Prov. Sulbar	
	1607.01.00	a. Kelembagaan dan Tata Laksana a) Pengembangan Kelembagaan b) Tata Laksana					
	1607.01.01	b. Fasilitas Standar Pelayanan Minimal a) Fasilitas Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi b) Fasilitas Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/Kota					
	1607.02	3. Standarisasi dan Teknologi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DLH Prov. Sulbar	
	1607.02.00	a. Standarisasi Manajemen dan Pengujian Lingkungan a) Perangkat Manajemen Lingkungan b) Pengujian Lingkungan					
	1607.02.01	b. Standardisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan a) Kompetensi Keahlian Lingkungan b) Kompetensi Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan					
	1607.02.02	c. Teknologi Ramah Lingkungan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
XVII.	1607.03 1607.03.00	a) Pengembangan Kriteria Teknologi Ramah Lingkungan b) Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan 4 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan a. Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DLH Prov. Sulbar	
	1607.03.01	a) Pemantauan Kualitas Lingkungan b) Kajian Kualitas Lingkungan b. Laboratorium Rujukan dan Pengujian		Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	DLH Prov. Sulbar	
	1700 1700.00	a) Laboratorium Rujukan b) Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi <b>PARIWISATA</b> A Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi kebijakan dibidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK, dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi: 1 Pengkaiian dan pengusulan kebijakan 2 Penviapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penvusunan kebijakan 5 <u>Pencetapan dalam bentuk peraturan</u>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPAR Prov. Sulbar	
	1701 1701.00 1701.00.00	B PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata a. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata)	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPAR Prov. Sulbar	
	1701.00.01	b. Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Perancangan Destinasi Pariwisata)	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPAR Prov. Sulbar	
	1701.00.02	c. Pengembangan Zona Kreatif	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPAR Prov. Sulbar	
	1701.00.03	- Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budava - Zona Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK d. Invetasi Pariwisata	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPAR Prov. Sulbar	
	1701.01	- Pengembangan Potensi Investasi - Promosi Investasi 2 Pengembangan Daya Tarik Wisata	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPAR Prov. Sulbar	
	1701.01.00 1701.01.01 1701.01.02 1701.01.03 1701.01.04 1701.02 1701.02.00	a. Bimtek Dava Tarik Wisata b. Fasilitas Pengembangan Dava Tarik Wisata c. Pengembangan dava tarik wisata kota pusaka d. Penilaian Kelavakan Tugas Pembantuan e. Penghargaan Pengelolaan Dava Tarik Wisata (Cipta Award) 3 Industri Pariwisata a. Sarana Pariwisata - usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPAR Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
		- penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa.	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPAR Prov. Sulbar	
	1701.02.01	b. Jasa Pariwisata:	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPAR Prov. Sulbar	
		- jasa transportasi wisata - jasa informasi pariwisata - penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi - jasa perjalanan wisata - jasa konsultan pariwisata - jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan - insentif - konvensi - pameran					
	1701.02.02 1701.03	c. Pengembangan Produk dan Pelayanan 4 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPAR Prov. Sulbar	
	1701.03.00 1701.03.01 1701.03.02 1701.04	a. Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata b. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa c. Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat 5 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPAR Prov. Sulbar	
	1701.04.00 1701.04.01	a. Pengembangan Wisata Kulier dan Belanja b. Pengembangan Rekreasi dan Hiburan - Pengembangan Wisata Spa dan Kesehatan - Pengembangan Wisata Olah Raga					
	1701.04.02 1701.04.03 1702 1702.00	c. Pengembangan Wisata Alam dan Budaya d. Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif dan Event C PEMASARAN PARIWISATA 1. Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPAR Prov. Sulbar	
	1702.00.00	a. Informasi Pasar Dalam Negeri - Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri - Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri					
	1702.00.01	b. Informasi Pasar Luar Negeri - Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri - Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri					
	1702.00.02	c. Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widva Wisata - Hubungan Lembaga Pariwisata - Widva Wisata					
	1702.00.03  1702.01	d. Perancangan Pemasaran Pariwisata - Perancangan Pemasaran Dalam Negeri - Perancangan Pemasaran Luar Negeri 2. Promosi Pariwisata	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPAR Prov. Sulbar	
	1702.01.00 1702.01.01 1702.01	a. Promosi Pariwisata Dalam Negeri b. Promosi Pariwisata Luar Negeri 3. Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPAR Prov. Sulbar	
	1702.01.00	a. Promosi KIE Korporasi - Korporasi Dalam Negeri - Korporasi Luar Negeri					
	1702.01.01	b. Promosi KIE Pemerintah dan Non Pemerintah - Pemerintah					



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1704.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desain Busana</li> <li>- Desain Non Busana</li> </ul> 3 Kerjasama dan Fasilitasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPAR Prov. Sulbar	
	1704.02.00	a. Lisensi Teknologi					
	1704.02.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Teknologi</li> <li>- Pemanfaatan Teknologi</li> </ul> b. Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis					
	1704.02.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Sentra Inovasi</li> <li>- Pengembangan Inkubator Bisnis</li> </ul> c. Sentra Kreatif					
	1704.02.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Sentra Kreatif</li> <li>- Pengelolaan Sentra Kreatif</li> </ul> d. Akses Pembiayaan					
	1705	F PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
	1705.00	1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPAR Prov. Sulbar	
	1705.00.00	a. Program dan Evaluasi					
	1705.00.01	b. Data dan Publikasi					
	1705.01	2 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPAR Prov. Sulbar	
	1705.01.00	a. Program dan Evaluasi					
	1705.01.01	b. Data dan Publikasi					
	1705.02	3 Pengembangan SDM Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPAR Prov. Sulbar	
	1705.02.00	a. Program dan Evaluasi					
	1705.02.01	b. Penyelenggaraan dan Kerjasama					
	1705.03	4 Kompetensi Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISPAR Prov. Sulbar	
	1705.03.00	a. Program dan Evaluasi					
	1705.03.01	b. Evaluasi dan Kerjasama					
<b>XVIII.</b>	<b>1800</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					
	1800.00	A Perumusan Kebijakan Teknis dan Strategi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi: Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1801	1 Pengkaiian dan pengusulan kebijakan					
	1801.00	2 Penyiapan kebijakan					
	1801.00	3 Perumusan kebijakan dan penrusunan bahan					
	1801.00	4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penrusunan kebijakan					
	1801.00	5 Penetapan dalam bentuk Peraturan					
	1801.00	B SUMBER DAYA AIR					
	1801.00	1 Bina Penatagunaan Sumber Daya Air	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1801.00	a. Perencanaan Wilayah Sungai					
	1801.00.00	- Pengelolaan Sumber Dava Air wilavah sungai					
	1801.00.01	- Bimbingan teknis dan supervisi					
	1801.00.01	- Pelaporan					
	1801.01	b. Pengaturan dan Pemantauan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1801.01.00 1801.01.01 1801.02  1801.03  1801.03.00 1801.03.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan teknis dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil</li> <li>- Pemantauan dan evaluasi penggunaan sumber daya air</li> <li>c. pemantauan, evaluasi dan koordinasi Lembaga wadah koordinasi, pengelola sumber daya air, badan usaha, dan peran masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air</li> <li>d. Pemanfaatan Sumber Daya Air</li> <li>- Studi kelavakan kerjasama pemerintah dan badan usaha</li> <li>- Perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air</li> </ul>	Biasa/ Terbuka       Biasa/ Terbuka	Eselon IV       Eselon IV	<p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar</p>	<p>Dinas PUPR Prov. Sulbar</p> <p>Dinas PUPR Prov. Sulbar</p>	
	1801.03.02 1801.04  1801.04.00 1801.04.01 1801.04.02 1801.04.03 1801.05  1801.05.00  1801.05.01  1801.06 1801.06.00  1801.06.01  1801.06.02  1801.06.03  1801.06.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi, perizinan penggunaan dan pengusahaan pemanfaatan sumber daya air</li> <li>e. Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air</li> <li>- Pembinaan</li> <li>- Koordinasi dan strategi pengelolaan penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</li> <li>- Pengelolaan sistem hidrologi</li> <li>- Pemantauan dan evaluasi</li> <li>2 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air</li> <li>a. Evaluasi dan Manajemen Mutu <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi dan manajemen mutu pelaksanaan program</li> <li>- Pelaporan</li> </ul> </li> <li>b. Informasi dan Data Sumber Daya Air <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan sistem informasi</li> <li>- Pengelolaan data dan informasi</li> </ul> </li> <li>3 Sungai dan Pantai <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan pengendalian konstruksi dan pengelolaan drainase utama perkotaan</li> <li>b. Pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana</li> <li>c. Perencanaan sungai dan pantai</li> <li>d. Pengelolaan drainase utama perkotaan</li> <li>e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan</li> </ul> </li> </ul>	Biasa/ Terbuka       Biasa/ Terbuka       Biasa/ Terbuka       Biasa/ Terbuka       Biasa/ Terbuka	Eselon IV       Eselon IV       Eselon IV       Eselon IV       Eselon IV	<p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar</p>	<p>Dinas PUPR Prov. Sulbar</p> <p>Dinas PUPR Prov. Sulbar</p> <p>Dinas PUPR Prov. Sulbar</p> <p>Dinas PUPR Prov. Sulbar</p> <p>Dinas PUPR Prov. Sulbar</p> <p>Dinas PUPR Prov. Sulbar</p> <p>Dinas PUPR Prov. Sulbar</p> <p>Dinas PUPR Prov. Sulbar</p>	
	1801.06.05  1801.06.06	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Hasil audit konstruksi</li> <li>g. Dokumen detail desain konstruksi sungai dan pantai</li> </ul>	Terbatas  Biasa/ Terbuka	Eselon III  Eselon IV	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar</p>	<p>Dinas PUPR Prov. Sulbar</p> <p>Dinas PUPR Prov. Sulbar</p>	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1801.06.07	h. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1801.07	4 Irigasi dan Rawa	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1801.07.00	a. Pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana					
	1801.07.01	b. Pembinaan pengelolaan irigasi dan rawa					
	1801.07.02	c. Dokumen detail desain konstruksi irigasi dan rawa					
	1801.07.03	d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan					
	1801.07.04	e. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja					
	1801.08	5 Bendungan, Danau, Situ dan Embung	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1801.08.00	a. Pembinaan pengelolaan bendungan dan konservasi fisik sumber daya air					
	1801.08.01	b. Penilaian kesiapan pelaksanaan bendungan, danau, situ dan embung dan konservasi fisik sumber daya air					
	1801.08.02	c. Kerjasama dengan instansi terkait dan pihak pemilik bendungan					
	1801.08.03	d. Inventarisasi, registrasi dan klasifikasi bahaya bendungan					
	1801.08.04	e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan					
	1801.08.05	f. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja					
	1801.09	6 Air Tanah dan Air Baku	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1801.09.00	a. Pembinaan pengelolaan bendungan dan konservasi fisik sumber daya air					
	1801.09.01	b. Penilaian kesiapan pelaksanaan air tanah dan air baku dan konservasi fisik sumber daya air					
	1801.09.02	c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan					
	1801.09.03	d. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja					
	1801.10	7 Bina Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1801.10.00	a. Pembinaan pengelolaan operasi dan pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat					
	1801.10.00	b. Bimbingan teknis dan supervisi					
	1801.10.00	c. Pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana					
	1801.10.01	d. Operasi dan pemeliharaan sumber daya air					
	1801.10.02	e. Audit teknis					
	1801.11	8 Bina Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1801.11.00	a. Pembinaan pengelolaan operasi dan pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat					
	1801.11.01	b. Bimbingan teknis dan supervisi					
	1801.11.02	c. Pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana					
	1801.11.01	d. Operasi dan pemeliharaan sumber daya air					
	1801.11.02	e. Audit teknis					
	1801.12	9 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1801.12.00	a. Pembinaan pengelolaan operasi dan pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
		b. Bimbingan teknis dan supervisi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
		c. Pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1801.12.01	d. Operasi dan pemeliharaan sumber daya air	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1801.12.02	e. Audit teknis	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
		f. Fasilitasi bimbingan dan bantuan teknik jaringan Sumber Daya Air	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
		g. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian Lumpur Limbah Industri	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1801.13	10 Pengendalin Lumpur Limbah Industri	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1801.13.00	a. Perencanaan dan Penganggaran - Rencana Umum - Rencana Teknis - Program dan anggaran Lumpur Limbah Industri					
	1801.13.01	b. Pelaksanaan pengendalian lumpur Limbah Industri dan penataan lingkungan					



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1801.13.02 1801.13.03 1801.13.04 1802 1802.00 1802.00.00	c. Pengendalian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat Lumpur Limbah Industri d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan e. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja C BINA MARGA 1 Pengembangan Jaringan Jalan a. Perencanaan dan Sistem Jaringan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1802.00.01	- Perencanaan Strategis - Sistem Jaringan b. Program dan anggaran penyelenggaraan jalan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1802.00.02	c. Pengembangan Aplikasi Manajemen Jalan  - Analisa Data Jalan dan Jembatan Nasional dan Daerah - Pengembangan Sistem Jalan dan Jembatan Nasional dan Daerah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1802.00.03	- Pengelolaan data dan informasi d. Lingkungan dan Keselamatan Jalan - Teknik lingkungan bidang jalan  - Keselamatan Jalan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
		- Audit keselamatan jalan dan investigasi lokasi rawan kecelakaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1802.00.04	e. Pemantauan dan Evaluasi  - Pemantauan - <u>Evaluasi dan pelaporan</u>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1802.01 1802.01	2 Pembangunan Jalan a. Manajemen Konstruksi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1802.01.00	- Pengendalian dan pembinaan konstruksi jalan nasional yang bersumber APBN					
	1802.01.01	- Pengendalian dan pembinaan konstruksi jalan nasional yang bersumber keriasama luar negeri					
	1802.01.02	- Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA					
	1802.01.03	- Pembinaan teknis analisis mengenai dampak lingkungan					
	1802.01.04	- Pembinaan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas					
	1802.01.05	- Pembinaan teknis Sistem Manajemen Mutu					
	1802.01.06	- Pembinaan teknis Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja					
	1802.01.07	- Pembinaan teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang jalan					
	1802.01.08	- Pengujian mutu konstruksi					
	1802.01.09	- Monitoring, koordinasi dan pengendalian pekerjaan konstruksi					
	1802.01.10	- Penetapan leger jalan nasional					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1802.02	b. Geometrik, Perkerasan dan Drainase	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1802.02.00	- Pembinaan perencanaan teknik geometrik jalan					
	1802.02.01	- Pengembangan identifikasi kondisi dan kerusakan jalan					
	1802.02.02	- Pembinaan pelaksanaan teknologi bahan					
	1802.02.03	- Pembinaan penerapan teknik jalan kategori khusus, teknologi baru dan					
	1802.03	c. Geoteknik dan Manajemen Lereng	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1802.03.00	- Pembinaan teknis perencanaan tanah					
	1802.03.01	- Pengembangan dan penerapan teknologi tanah					
	1802.03.02	- Penediaan konsultasi teknis					
	1802.03.03	- Pembinaan teknis perencanaan mitigasi daerah rawan gempa, patahan dan manajemen lereng					
	1802.03.04	- Mitigasi dan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan					
	1802.03.05	- <del>Pembinaan manajemen mitigasi daerah rawan longsor</del>					
	1802.04	d. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Jalan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1802.04.00	- Pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan, analisis mengenai dampak lalu lintas, Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Sistem Pengendalian					
	1802.04.01	- Rekomendasi dan penetapan laik fungsi jalan nasional					
	1802.04.02	- Evaluasi kinerja penvelenggaraan pembangunan jalan					
	1802.05	3 Preservasi Jalan a. Perencanaan dan Pemrograman	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1802.05.00	- Pengolahan, analisis dan validasi data					
	1802.05.01	- Pembinaan teknis survey jalan					
	1802.05.02	- Fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan					
	1802.05.03	- Pengaturan penyediaan, pemantauan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan					
	1802.05.04	- Koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran					
	1802.05.05	- Fasilitasi Unit Pengelola Dana					
	1802.05.06	- Pembinaan manajemen pelaksanaan konstruksi □					
	1802.05.07	- Pengembangan teknologi bahan dan peralatan □					
	1802.05.08	- Pengelolaan pengendalian Mitigasi Bencana Alam					
	1802.05.09	- Pemantauan penanganan rawan kecelakaan					
	1802.06	b. Teknik Rekonstruksi dan Berkala Jalan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1802.06.00	- Pengendalian program dan penyediaan konsultasi teknis rekonstruksi dan berkala jalan					
	1802.06.01	- Pembinaan teknis penerapan teknologi bahan perkerasan					
	1802.06.02	- Penerapan teknologi bahan perkerasan					
	1802.06.03	- Pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan nasional					
	1802.07	c. Teknik Pemeliharaan Rutin Jalan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1802.07.00	- Bina Pemeliharaan Rutin Jalan					
	1802.07.01	- Pembinaan teknis penerapan teknologi bahan perkerasan					
	1802.07.02	- <del>Penerapan teknologi bahan perkerasan</del>					
	1802.07.03	- Pengendalian dan Pengawasan					
		4 Jembatan					

1 NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1802.08	a. Perencanaan dan Pemrograman	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1802.08.00	- Pengolahan, analisis dan validasi data jembatan nasional					
	1802.08.01	- Pembinaan metodologi survey, sistem manajemen jembatan dan mitigasi bencana alam					
	1802.08.02	- Audit keselamatan jembatan					
	1802.08.03	- Pengembangan metode survey inventarisasi, survey rutin, survey detail dan survey khusus jembatan					
	1802.08.04	- Evaluasi Biaya Penanganan Jembatan					
	1802.08.05	- Penyiapan Kebutuhan Bahan dan Anggaran					
	1802.08.06	- Manajemen K3					
	1802.08.07	- Pengujian Mutu Konstruksi					
	1802.08.08	- Bina Pembangunan dan Preservasi Jembatan					
	1802.08.09	- Monev Pembangunan dan Preservasi Jembatan					
	1802.08.10	- Perencanaan Teknik Jembatan Berdasarkan Permintaan Khusus					
	1802.08.11	- Fasilitas Penyesuaian Kontrak					
	1802.08.12	- Fasilitas Penetapan Laik Fungsi Jembatan					
	1802.09	b. Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1802.09.00	- Inventarisasi Terowongan dan Jembatan Khusus					
	1802.09.01	- Monev Perencanaan Teknik, Pembangunan, Preservasi					



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1803 1803.00	(DED) D CIPTA KARYA 1 Keterpaduan Infrastruktur Permukiman	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1803.00.00	a. Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan - Keterpaduan perencanaan pembangunan - Fasilitas kemitraan					
	1803.00.01	b. Keterpaduan Pelaksanaan - Fasilitas keterpaduan pelaksanaan pembangunan dan anggaran tahun berjalan - Pemantauan dan pelaporan					
	1803.00.02	c. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi - Pengelolaan data - Pengembangan sistem informasi					
	1803.00.03	d. Pemantauan dan Evaluasi - Pengembangan kawasan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan - Pengembangan sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman					
	1803.01	2 Bina Penataan Bangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1803.01.00 1803.01.01 1803.01.02 1803.02	a. Perencanaan Teknis b. Pengelolaan data dan informasi c. Analisa Teknis 3 Penataan Bangunan Gedung Umum dan Gedung Pemda	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1803.02.00 1803.02.01 1803.02.02 1803.02.03 1803.02.04 1803.03	a. Bimbingan, Bantuan Teknis, dan Supervisi b. Pengelolaan Data dan Informasi c. Pengembangan Jejaring Kemitraan d. Pengelolaan Sistem Informasi e. Fasilitas Pembangunan Gedung Perkantoran Pemprov 4 Pengelolaan Rumah Jabatan Pemerintah Daerah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1803.03.00 1803.03.01 1803.04	a. Bimbingan Teknis, dan Supervisi b. Pengalihan Status Rumah Jabatan Pemerintah Daerah 5 Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1803.04.00 1803.04.01 1803.04.02 1803.05	a. Pembangunan Kawasan Khusus b. Bimtek dan Supervisi Pengembangan Kawasan Khusus c. Inventarisasi Data dan Pengembangan Jaringan Kemitraan 6 Standarisasi dan Kelembagaan Penataan Bangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1803.05.00 1803.05.01 1803.06	a. Fasilitas Penguatan Kapasitas Kelembagaan b. Pelembagaan Pengaturan 7 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1803.06.00 1803.06.01	a. Analisa Teknis b. Pengelolaan Data dan Informasi					
	1803.06.02 1803.06.03	c. Bimtek Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum d. Evaluasi dan Pelaporan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1803.07	8 Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1803.07.00 1803.07.01 1803.07.02 1803.08	a. Pelaksanaan Pembangunan b. Bimtek dan Supervisi c. Fasilitas Penyediaan Tanah 9 Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1803.08.00 1803.08.01 1803.08.02 1803.09	a. Pelaksanaan Pembangunan b. Bimtek dan Supervisi c. Fasilitas Penyediaan Tanah 10 Sistem Penyediaan Air Minum Khusus	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1803.09.00 1803.09.01 1803.09.02 1803.10	a. Pelaksanaan Pembangunan b. Bimtek dan Supervisi c. Fasilitas Penyediaan Tanah 11 Standarisasi dan Kelembagaan Penyediaan Air Minum	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1803.10.00 1803.10.01 1803.10.02 1803.11	a. Standarisasi b. Kelembagaan c. Bimtek Kelembagaan 12 Fasilitas dan Penyebarluasan Teknologi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1803.12	13 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1803.13	14 Pengembangan Kesehatan Lingkungan Pemukiman	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1803.13.00	a. Analisa Teknis					
	1803.13.01 1803.14	b. Pengelolaan Data dan Informasi 15 Pengelolaan Air Limbah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1803.14.00 1803.14.01 1803.14.02 1803.15	a. Pelaksanaan Pembangunan b. Bimbingan Teknis dan Supervisi c. Fasilitas Penyediaan Tanah dan Serah Terima Aset 16 Pengelolaan Persampahan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1803.15.00 1803.15.01 1803.15.02 1803.16	a. Pengembangan Sistem b. Bimbingan Teknis dan Supervisi c. Fasilitas Penyediaan Tanah dan Serah Terima Aset 17 Kesehatan Lingkungan Permukiman Khusus	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1803.16.00 1803.16.01 1803.16.02 1803.17	a. Pelaksanaan Pembangunan b. Bimbingan Teknis dan Supervisi c. Fasilitas Penyediaan Tanah dan Serah Terima Aset 18 Standarisasi dan Kelembagaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1803.17.00 1803.17.01 1803.17.02 1803.17.03 1803.18	a. Standarisasi b. Kelembagaan c. Bimtek Kelembagaan d. Pemantauan dan Evaluasi 19 Fasilitasi dan Penyebarluasan Teknologi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1803.19	20 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1803.20	21 Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1804	E BINA KONSTRUKSI					
	1804.00	1 Bina Investasi Infrastruktur	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1804.00.00 1804.00.01 1804.01	a. Bimbingan Teknis Dan Supervisi b. Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi 2 Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1804.01.00 1804.02 1804.02.00 1804.02.01 1804.03	a. Penyelesaian permasalahan dan pengembangan 3 Pasar infrastruktur a. Bimbingan Teknis Pembinaan Pasar Infrastruktur b. Pemantauan dan Evaluasi Pasar Infrastruktur 4 Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1804.03.00 1804.03.01 1804.04	a. Bimbingan Teknis dan Supervisi b. Pemantauan dan Evaluasi 5 Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1804.04.00 1804.04.01 1804.05	a. Bimbingan Teknis dan Supervisi b. Pemantauan dan Evaluasi 6 Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1804.05.00 1804.05.01 1804.05.02 1804.06	a. Bimbingan Teknis dan Supervisi b. Pemantauan dan Evaluasi c. Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi 7 Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1804.06.00 1804.06.01 1804.06.02	a. Bimbingan Teknis dan Supervisi b. Pemantauan dan Evaluasi c. Penjaminan Mutu					
	1804.07	8 Jasa Konstruksi Masyarakat dan Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1804.07.00 1804.07.01 1804.07.02 1804.07.03	a. Rencana Keria Pengendalian Mutu b. Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Dava c. Pengendalian Mutu d. Pelaporan dan Pengawasan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1804.08	9 Penerapan Teknologi Konstruksi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1804.08.00 1804.08.01 1804.08.02 1804.09	a. Rencana Keria b. Keria Sama Teknologi Konstruksi c. Pemantauan dan Evaluasi 10 Material dan Peralatan Konstruksi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1804.09.00 1804.09.01	a. Rencana Keria b. Kerja Sama Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi					
	1804.09.02 1805 1805.00	c. Pengelolaan Data dan Aset F PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 1 Perencanaan Infrastruktur	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1805.00.00 1805.00.01 1805.00.02 1805.00.03 1805.00.04 1805.00.05 1805.00.06 1805.01	a. Rencana Strategis b. Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan c. Analisa Manfaat Dan Skema Pembiayaan d. Kerjasama Regional dan Global e. Rencana Keterpaduan f. Rencana Induk g. Bimbingan Keterpaduan 2 Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1805.01.00 1805.01.01 1805.01.02 1805.01.03	a. Analisis Kelayakan b. Fasilitasi Penyusunan dan Sinkronisasi Program c. Sinkronisasi Program dan Pembiayaan d. Pemantauan dan Evaluasi Program					
XIX.	1805.02	3 Pengembangan Kawasan Strategis	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1805.02.00 1805.02.01 1805.02.02 1805.03	a. Rencana dan Program b. Pengembangan Area Inkubasi c. Fasilitasi Pengadaan Tanah 4 Pengembangan Kawasan Perkotaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PUPR Prov. Sulbar	
	1805.03.00 1805.03.01	a. Kawasan Metropolitan b. Kota Besar dan Kota Baru					
	1900	PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL					
	1900.00	A Perumusan Kebijakan dibidang Pembangunan Daerah Tertinggal meliputi: Pengembangan sumber daya, peningkatan infrastruktur, pembinaan ekonomi dan dunia usaha, pembinaan lembaga sosial dan budaya dan pengembangan daerah khusus 1 Pengkaiian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penvusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PMD Prov. Sulbar	
	1901	B Pengembangan Sumber Daya	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PMD Prov. Sulbar	
	1901.00 1901.00.00 1901.00.01	1 Fasilitasi Pengembangan Sumberdaya a. Pendidikan dan Ketrampilan b. Kesehatan					



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	1901.00.02 1901.00.03 1901.00.04 1901.01 1901.02 1902	c. Sumberdaya Havati d. Mineral, Energi dan Lingkungan Hidup e. Teknologi dan Inovasi 2 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya 3 Pemantauan dan evaluasi C Peningkatan Infrastruktur	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PMD Prov. Sulbar	
	1903.00 1903.00.00	1 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur a. Transportasi					
	1903.00.01 1903.00.02 1903.00.03 1903.00.04 1903.01 1903.02 1903	b. Informasi dan Telekomunikasi c. Sosial d. Ekonomi e. Energi 2 Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur 3 Pemantauan dan evaluasi D Pembinaan Ekonomi Dan Dunia Usaha	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PMD Prov. Sulbar	
	1903.00 1903.00.00 1903.00.01 1903.00.02 1903.00.03 1903.00.04 1903.01	1 Fasilitasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha a. Investasi b. Kelembagaan Ekonomi c. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah d. Kemitraan Usaha e. Pengembangan Komoditas Unggulan 2 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha					
	1903.02 1904	3 Pemantauan dan evaluasi E Pembinaan Lembaga Sosial Dan Budaya	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PMD Prov. Sulbar	
	1904.00 1904.00.00 1904.00.01 1904.00.02 1904.00.03 1904.00.04 1904.01	1 Fasilitasi Pembinaan a. Penguatan Kapasitas Lembaga Lokal b. Penguatan Organisasi Masyarakat c. Pemberdayaan Masyarakat d. Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya e. Ketenagakerjaan 2 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya					
	1904.02 1905	3 Pemantauan dan evaluasi F Pengembangan Daerah Khusus	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PMD Prov. Sulbar	
	1905.00 1905.00.00 1905.00.01 1905.00.02 1905.00.03 1905.00.04 1905.01	1 Fasilitasi Pengembangan Daerah Khusus a. Daerah Perbatasan b. Daerah Rawan Konflik dan Bencana c. Perdesaan d. Daerah Pulau Terpencil dan Tertuar e. Wilayah Strategis 2 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus					
XX	2000 2000.00	3 Pemantauan dan evaluasi <b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b> A Kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PP & PA Prov. Sulbar	
		1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan kebijakan 4 Masukan dan dukungan kebijakan 5 Penetapan NSPK					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	2001	B Pengarusutamaan gender Ekonomi, politik sosial dan hukum	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PP & PA Prov. Sulbar	
	2001.00 2001.01 2001.02 2002 2002.00	1 Data gender 2 Advokasi dan fasilitasi 3 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan gender C Perlindungan perempuan ( kekerasan, masalah sosial, tenaga kerja, korban 1 Data perlindungan perempuan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PP & PA Prov. Sulbar	
	2002.01	2 Advokasi dan fasilitasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PP & PA Prov. Sulbar	
	2002.02	3 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PP & PA Prov. Sulbar	
	2002.03	4 Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PP & PA Prov. Sulbar	
	2002.04	5 Analisis dan penyajian informasi gender	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PP & PA Prov. Sulbar	
	2003	D Perlindungan anak ( hak sipil, masalah sosial, kekerasan terhadap anak, anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum )	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PP & PA Prov. Sulbar	
	2003.00 2003.01 2003.02 2004	1 Data perlindungan anak 2 Advokasi dan fasilitasi 3 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak E Tumbuh kembang anak ( pendidikan, kesehatan, partisipasi, lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur, pengembangan kota layak anak )	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas PP & PA Prov. Sulbar	
	2004.00 2004.01 2004.02	1 Data tumbuh kembang anak 2 Advokasi dan fasilitasi 3 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak					
<b>XXI.</b>	<b>2100</b>	<b>PEMERINTAHAN PROVINSI</b>					
	2101 2101.00	A. PEMERINTAHAN UMUM 1. Dekonsentrasi dan Kerjasama	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2101.00.00	a. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan					
	2101.00.01	b. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah					
	2101.00.02	c. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah					
	2101.00.03	d. Fasilitasi Kecamatan - fasilitasi (a) database pembentukan kecamatan - koordinasi - pembinaan dan pengawasan - monitoring dan evaluasi (a) evaluasi kinerja kecamatan					
	2101.00.04	e. Fasilitasi Pelayanan Umum - fasilitasi pelayanan administrasi Kecamatan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- koordinasi pelayanan administrasi Kecamatan</li> <li>- pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi Kecamatan</li> <li>- <u>monitoring dan evaluasi</u></li> </ul>					
	2101.01 2101.01.00	2. Wilayah Administrasi dan Perbatasan a. Toponimi dan Data Wilayah  <ul style="list-style-type: none"> <li>- fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan toponimi</li> <li>- fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembakuan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan</li> <li>- fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi perubahan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan</li> <li>- fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan ibukota daerah dan pemindahan pusat pemerintahan daerah</li> <li>- fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan</li> <li>- fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penghitungan luas wilayah</li> </ul>	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2101.01.01	b. Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara  <ul style="list-style-type: none"> <li>- fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum pemerintahan di wilayah perbatasan negara</li> <li>- fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan di daerah dan kerjasama internasional antar perbatasan</li> </ul>	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2101.01.02	c. Batas Antar Daerah Wilayah  <ul style="list-style-type: none"> <li>- fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penetapan batas antar daerah</li> <li>- fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa batas antar daerah</li> </ul>	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2101.02	4. Kawasan dan Pertanahan  	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2101.02.00	a. Kawasan Sumber Daya Alam <ul style="list-style-type: none"> <li>- fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumberdaya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian, dan lingkungan</li> </ul>					
	2101.02.01	b. Kawasan Sumber Daya Buatan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	2101.02.02	- fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perhubungan darat, laut dan udara c. Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas - fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pada kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas					
	2101.02.03	d. Pertanahan dan Kawasan Khusus - penyelenggaraan urusan pertanahan - penyelesaian sengketa pertanahan - evaluasi penataan kawasan khusus					
	2101.02.04	e. Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan - fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan - fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan					
	2102 2102.00	B. OTONOMI DAERAH 1. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2102.00.00	a. Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi (1) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah (2) penyusunan standar pelayanan minimal					
	2102.01	2. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah					
	2102.01.00	a. Pembentukan pemekaran, peningkatan, pemecahan dan penghapusan wilayah daerah	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2102.01.01	b. Penyelesaian sengketa batas wilayah	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2102.01.02	c. Administrasi dan dokumentasi perbatasan antar wilayah	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2102.01.03	d. Pemindahan pusat pemerintahan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2102.01.04	e. Pemberian, penggantian/ perubahan nama wilayah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2102.01.05	f. Kerjasama antar daerah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2102.02 2102.02.00	3. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga a. penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	2102.02.01	b. administrasi kepala daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2102.02.02	c. administrasi DPRD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2102.02.03	d. penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas kepala daerah dan DPRD di bidang pemerintahan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2102.02.04	e. hubungan antar lembaga daerah (pemerintah daerah dan DPRD)	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2102.02.05	f. assosiasi daerah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2102.03	4. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2102.03.00	a. kineria penvelenggaraan pemerintahan daerah					
	2102.03.01	b. kemampuan penvelenggaraan otonomi daerah					
	2102.03.02	c. pengembangan kapasitas daerah					
	2103	C. BINA PEMBANGUNAN DAERAH					
	2103.00	1. Perencanaan Pembangunan Daerah / Per Wilayah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2103.01	2. Pengembangan Wilayah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2103.01.00	a. penyusunan pedoman penverasian pengembangan wilayah					
	2103.01.01	b. penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah					
	2103.01.02	c. penyusunan dan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah					
	2103.01.03	d. Kawasan Strategis dan Andalan - evaluasi pengembangan data - pengembangan kawasan strategis dan andalan					
	2103.01.04	e. Wilayah Tertinggal - penyusunan data dan pemutahiran basis dan data informasi pengembangan wilayah tertinggal - penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal					
	2103.01.05	f. Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil - penyusunan masterplan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal - penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil					
	2103.02	3. Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
	2103.02.00	a. Penataan Ruang Wilayah - evaluasi perencanaan, pemanfaatan tata ruang wilayah - evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian tata ruang wilayah - implementasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang					
	2103.02.01	b. Penataan Ruang Kawasan - evaluasi tata ruang kawasan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	2103.02.02	- pembinaan tata ruang kawasan - implementasi c. Konservasi dan Rehabilitasi - evaluasi pelaksanaan konservasi - evaluasi pelaksanaan rehabilitasi - implementasi					
	2103.02.03	d. Perencanaan dan Pemanfaatan Sumberdava Air - evaluasi pengembangan potensi sumber dava air - evaluasi pemanfaatan sumber dava air - implementasi					
	2103.02.04	e. Pengendalian Lingkungan Hidup - pengembangan instrumen kelembagaan lingkungan hidup - analisis dan audit pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup					
	2103.03	4. Pengembangan Ekonomi Daerah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2103.03.00	a. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah - identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah - pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah					
	2103.03.01	b. Promosi dan Investasi Daerah - pelaksanaan promosi ekonomi daerah - pelaksanaan investasi daerah					
	2103.03.02	c. Sarana dan Prasarana Perekonomian daerah - pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah - pelaksanaan perindustrian daerah					
	2103.03.03	d. Kemitraan Usaha - perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah - pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah					
	2103.03.04	e. Kelembagaan Ekonomi daerah - pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah					
	2103.04	- penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah 5. Penataan Perkotaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2103.04.00	a. Perencanaan Pengendalian Perkotaan - evaluasi perencanaan perkotaan - pengendalian penataan perkotaan - fasilitasi					
	2103.04.01	b. Penataan Kota Besar dan Metropolitan, Kota Menengah, dan Kota Kecil - pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan - pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan - fasilitasi					
	2103.04.02	c. Kerjasama Perkotaan					
	2104	- pengendalian kerjasama perkotaan antar negara - pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan - fasilitasi					
	2104.00	D. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2104.00.00	a. Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan - pelaksanaan pengembangan desa - pelaksanaan pengembangan kelurahan					
	2104.00.01	b. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan - pembinaan administrasi pemerintahan desa					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	2104.00.02	- pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan c. Fasilitas Permusyawaratan Desa - pelaksanaan penataan kelembagaan badan permusyawaratan desa - pelaksanaan penataan kewenangan badan permusyawaratan desa					
	2104.00.03	d. Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa - pembinaan pengelolaan keuangan desa - pelaksanaan pengelolaan aset desa					
	2104.00.04	e. Pengembangan Kapasitas Desa - pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan - pelaksanaan pengembangan kapasitas badan permusyawaratan desa dan masyarakat					
	2104.01	2. Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2104.01.00	a. Lembaga Masyarakat - pembinaan penataan lembaga masyarakat di desa - pelaksanaan kerjasama lembaga masyarakat					
	2104.01.01	b. Pembangunan Partisipatif - pelaksanaan pengembangan metode pembangunan partisipatif					
	2104.01.02	- pelaporan kinerja pembangunan desa c. Pendataan Potensi Masyarakat - inventarisasi potensi masyarakat (a) profil desa - evaluasi perkembangan masyarakat					
	2104.01.03	d. Pengembangan Kawasan Perdesaan - pelaksanaan identifikasi dan analisa penataan ruang kawasan perdesaan - pelaksanaan penataan pengembangan terpadu kawasan perdesaan					
	2104.01.04	e. Pelatihan Masyarakat - pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat (a) grand design pelatihan masyarakat (b) pedoman pelatihan masyarakat (c) fasilitasi (d) monitoring dan evaluasi - evaluasi pelatihan masyarakat (a) penyelenggaraan pelatihan (b) monitoring dan evaluasi					
	2104.02	3 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2104.02.00	a. Budaya Nusantara - pelaksanaan pemberdayaan masyarakat - pelaksanaan kerjasama adat istiadat					
	2104.02.01	b. Pemberdayaan Perempuan - pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan - pembinaan, perlindungan hak-hak perempuan dan ketidaksetaraan gender					
	2104.02.02	c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga - pelaksanaan pemberdayaan keluarga - pembinaan peningkatan kesejahteraan keluarga					
	2104.02.03	d. Kesejahteraan Sosial - pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial - pelaksanaan penanganan masalah sosial					
	2104.02.04	e. Tenaga Kerja Perdesaan - fasilitasi dan evaluasi pembinaan dan pembinaan tenaga kerja - fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	2104.03	4 Usaha Ekonomi Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2104.03.00	a. Usaha Pertanian dan Pangan					
	2104.03.01	- pembinaan dan pengembangan usaha pertanian, agribisnis dan Lumbung Pangan (a) identifikasi data pertanian (b) fasilitasi (c) monitoring dan evaluasi b. Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam - pelaksanaan peningkatan kerjasama dan permodalan usaha perkreditan dan simpan pinjam (a) inventarisasi lembaga keuangan mikro yang belum berbadan hukum (b) inventarisasi dan pemetaan potensi desa (c) inventarisasi badan usaha milik desa (d) usaha ekonomi desa simpan pinjam (e) fasilitasi pembinaan, pendampingan dan pengawasan (f) monitoring dan evaluasi - pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha perkreditan dan simpan pinjam (a) fasilitasi pembinaan, pendampingan dan pengawasan (b) monitoring dan evaluasi					
	2104.03.02	c. Produksi dan Pemasaran - pelaksanaan pengembangan informasi pasar (a) identifikasi produk unggulan perdesaan (b) fasilitasi (c) monitoring dan evaluasi - pelaksanaan diversifikasi pasar (a) fasilitasi pengelolaan pasar desa (b) fasilitasi sarana dan prasarana desa (c) sistem penilaian kinerja pasar desa /lomba pasar desa (d) monitoring dan evaluasi (e) data pasar desa					
	2104.03.03	d. Usaha Ekonomi dan Keluarga - pelaksanaan peningkatan kewirausahaan dan perkoperasian  (a) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga (b) monitoring dan evaluasi - pelaksanaan pengembangan usaha jasa dan industri kecil (a) penyusunan Modul (b) fasilitasi (c) monitoring dan evaluasi					
	2104.03.04	e. Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal - ekonomi perdesaan (a) identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan (b) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan (c) monitoring dan evaluasi - Masyarakat tertinggal (a) identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal (b) fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal (c) monitoring dan evaluasi					
	2104.04	5 Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2104.04.00	a. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan - pembinaan pengelolaan konservasi kawasan - pelaksanaan rehabilitasi lingkungan					
	2104.04.01	b. Fasilitasi Pemanfaatan lahan dan Pesisir Perdesaan - pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya lahan perdesaan - pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya pesisir perdesaan					



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	2104.04.02	c. Fasilitas Prasarana dan Sarana Perdesaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- pembinaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan</li> <li>- pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana pemukiman</li> </ul>					
	2104.04.03	d. Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan</li> <li>- pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi perdesaan</li> </ul>					
	2104.04.04	e. Pemasvarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- pelaksanaan pemasvarakatan teknologi perdesaan</li> <li>- pelaksanaan kerjasama pengelolaan teknologi perdesaan</li> </ul>					
	2105 2105.00	E. KEUANGAN DAERAH 1. Anggaran Daerah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2105.00.00	a. Anggaran Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>- fasilitasi anggaran daerah antara lain: konsultasi, narasumber, bimbingan teknis</li> <li>- evaluasi rancangan perda, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi</li> </ul>					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	2105.00.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoring</li> <li>b. Dukungan Teknis Anggaran Daerah</li> <li>- penyiapan bahan perumusan sinkronisasi kebijakan anggaran daerah</li> <li>- penyusunan tatalaksana anggaran daerah</li> <li>- penyiapan dukungan teknis anggaran daerah</li> <li>- penyiapan data, informasi dan penyusunan laporan keuangan daerah</li> </ul>					
	2105.01	2. Pendapatan dan Investasi Daerah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2105.01.00	a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>- fasilitasi pelaksanaan kebijakan standarisasi pajak daerah dan retribusi daerah</li> <li>- penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah</li> <li>- penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah</li> <li>- penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah</li> </ul>					
	2105.01.01	b. Badan Usaha Milik Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>- fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan</li> <li>- fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan</li> <li>- penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah</li> </ul>					
	2105.01.02	c. Badan Layanan Umum Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>- analisis, standarisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah</li> <li>- pembinaan pelaksanaan kebijakan, standarisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah</li> <li>- penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah</li> </ul>					
	2105.01.03	d. Pengelolaan Kekayaan Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>- fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan</li> <li>- fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah</li> </ul>					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	2105.01.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan investasi daerah</li> <li>e. Pinjam dan Obligasi Daerah               <ul style="list-style-type: none"> <li>- fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah</li> <li>- fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah</li> <li>- fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN</li> <li>- bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah</li> <li>- penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah</li> </ul> </li> </ul>					
	2105.02	3. Fasilitasi Dana Perimbangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2105.02.00	a. Fasilitasi Dana Alokasi Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>- koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum</li> <li>- sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum</li> <li>- penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum</li> </ul>					
	2105.02.01	b. Fasilitasi Dana Alokasi Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>- koordinasi penyiapan data dasar</li> <li>- sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus</li> <li>- penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus</li> </ul>					
	2105.02.02	c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam <ul style="list-style-type: none"> <li>- koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam</li> <li>- sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam</li> <li>- penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam</li> </ul>					
	2105.02.03	d. Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya <ul style="list-style-type: none"> <li>- sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus</li> <li>- sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya</li> </ul>					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	2105.02.04	- pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya e. Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan - penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan - penyiapan dukungan teknis dana perimbangan - penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan					
	2105.03	4. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sulbar	
	2105.03.00	a. Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah - fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah - penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah					
	2105.03.01	b. Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah - fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah - penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah					
	2105.03.02	c. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah - fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah - penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah					
	2105.03.03	d. Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli - penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah - penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah					
	2105.03.04	e. Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah - penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah - penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah - pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah					
<b>XXII.</b>	<b>2200</b>	<b>PEMERINTAHAN DPRD</b>					
	2200.00	A Penyusunan/ pembentukan peraturan daerah provinsi bersama gubernur, baik atas usul inisiatif DPRD maupun atas usul gubernur  1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan kebijakan 4 Masukan dan dukungan kebijakan 5 Penetapan Kebijakan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat DPRD Prov. Sulbar	
	2201 2201.00	B Pengawasan dan Persetujuan 1 Pengawasan Pemerintahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat DPRD Prov. Sulbar	
	2201.00.00 2201.00.01 2201.00.02 2201.00.03 2201.00.04 2201.00.05 2201.01	a. Pengawasan Peraturan Daerah b. Pengawasan APBD c. Laporan Keterangan d. Hak Interpelasi e. Hak Angket f. Hak Menyatakan Pendapat 2 Persetujuan Perjanjian Internasional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat DPRD Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	2201.02	3 Persetujuan Kerja Sama	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat DPRD Prov. Sulbar	
	2202 2202.00	C Pengangkatan dan Pemberhentian 1	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat DPRD Prov. Sulbar	
	2202.00.00 2202.00.00 2202.01 2203	Pengangkatan a. Pengangkatan Gubernur/ Wagub b. Pemilihan Wagub 2 Pengawasan APBD D Penyusunan Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat DPRD Prov. Sulbar	
	2203.00 2203.01 2204	1 Penyusunan APBD 2 Penyusunan APBD-P E Persidangan					
	2204.00	1 Tata Tertib	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat DPRD Prov. Sulbar	
	2204.01	2 Sidang Pleno	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat DPRD Prov. Sulbar	
	2204.02	3 Rapat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat DPRD Prov. Sulbar	
	2204.03	4 Dengar Pendapat/ Hearing/ Dialog	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat DPRD Prov. Sulbar	
	2204.04	5 Reses	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat DPRD Prov. Sulbar	
	2204.05	6 Studi Banding	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat DPRD Prov. Sulbar	
	2204.06	7 Kunjungan Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Sekretariat DPRD Prov. Sulbar	
<b>XXIII.</b>	<b>2300</b>	<b>PEMADAM KEBAKARAN</b>					
	2300.00	1 Pencegahan Bahaya Kebakaran	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	SATPOLPP & PK Prov. Sulbar	
	2300.00.00 2300.00.01 2300.00.02 2300.00.03 2300.00.04 2300.00.05 2300.00.06 2300.00.07 2300.01	a. Identifikasi Potensi Bencana b. Organisasi Sistem dan Prosedur c. Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan IPB d. Pemeriksaan Berkala e. Pemeriksaan Izin Khusus untuk Instansi f. Pemeriksaan Sumber-Sumber Air dan Bahan-Bahan Lain g. Penelitian Bahan h. Pengawasan dan Pengendalian 2 Penanggulangan Bahaya Kebakaran					
	2300.01.00	a. Penanggulangan Kebakaran	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	SATPOLPP & PK Prov. Sulbar	
	2300.01.01	b. Penyelamatan Pertama Akibat Kebakaran	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	SATPOLPP & PK Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
XXIV.	2300.01.02	c. Penelitian dan Penyelidikan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	SATPOLPP & PK Prov. Sulbar	
	2300.02	3 Sarana dan Prasarana	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	SATPOLPP & PK Prov. Sulbar	
	2300.03	4 Pelatihan/ Penyuluhan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	SATPOLPP & PK Prov. Sulbar	
	2300.04	5 Fasilitasi Kerja Sama	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	SATPOLPP & PK Prov. Sulbar	
	2300.05	6 Peran Serta Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	SATPOLPP & PK Prov. Sulbar	
	<b>2400</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>					
	2400.00	A KEBIJAKAN	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPMPTSP Prov. Sulbar	
		Kebijakan di bidang Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Kerja Sama Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal meliputi: 1 Pengkaiian dan Pengusulan Kebijakan 2 Penyianan Kebijakan 3 Perumusan Kebijakan 4 Masukan dan Dukungan Kebijakan 5 Penetapan NSPK					
	2401	B PERENCANAAN PENANAMAN MODAL					
	2401.00	1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPMPTSP Prov. Sulbar	
	2401.00.00	a. Agribisnis a) <u>Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan</u> b) Kelautan, Perikanan dan Peternakan					
	2401.00.01	b. Energi a) Energi Terbarukan b) Energi Tak Terbarukan					
	2401.00.02	c. Sumber Daya Mineral a) Mineral Logam b) Mineral Non Logam					
	2401.01	2 Perencanaan Industri Manufaktur	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPMPTSP Prov. Sulbar	
	2401.01.00	a. Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka a) Industri Logam dan Mesin b) Industri Tekstil dan Aneka					
	2401.01.01	b. Industri Kimia a) Industri Kimia Dasar b) Industri Barang Kimia dan Farmasi					
	2401.01.02	c. Industri Alat Transportasi dan Telematika a) Industri Alat Transportasi b) Industri Telematika					
	2401.02	3 Perencanaan Jasa dan Kawasan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPMPTSP Prov. Sulbar	
	2401.02.00	a. Jasa Perdagangan dan Pariwisata a) Jasa Perdagangan b) Jasa Pariwisata					
	2401.02.01	b. Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya a) Jasa Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	2401.02.02	b) Jasa Lainnya c. Kawasan Ekonomi a) Kawasan Ekonomi Khusus b) Kawasan Ekonomi Lainnya					
	2401.03	4 Perencanaan Infrastruktur	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPMPPTSP Prov. Sulbar	
	2401.03.00	a. Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan a) Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian b) Infrastruktur Jalan dan Jembatan					
	2401.03.01	b. Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air a) <del>Infrastruktur Energi</del> b) Infrastruktur Sumber Daya Air c. Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, dan Infrastruktur Lainnya					
	2401.03.02	a) Infrastruktur Transportasi Laut b) Infrastruktur Transportasi Udara dan Infrastruktur Lainnya					
	2402 2402.00	C PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 1 Deregulasi Penanaman Modal	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPMPPTSP Prov. Sulbar	
	2402.00.00	a. Sektor Primer a) Pertanian, Kelautan dan Perikanan b) Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan					
	2402.00.01	b. Sektor Sekunder a) Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika b) Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka					
	2402.00.02	c. Sektor Tersier a) Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi b) Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya					
	2402.01	2 Pengembangan Potensi Daerah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPMPPTSP Prov. Sulbar	
	2402.01.00	a. Sektor Primer dan Tersier a) Sektor Primer b) Sektor Tersier					
	2402.01.01	b. Sektor Sekunder a) Sektor Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika					
	2402.02	b) Sektor Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka 3 Pemberdayaan Usaha	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPMPPTSP Prov. Sulbar	
	2402.02.00	a. Pembinaan dan Penyuluhan a) Pembinaan b) Penyuluhan					
	2402.02.01	b. Kemitraan Usaha a) Sektor Primer dan Tersier b) Sektor Sekunder					
	2402.02.02	c. Pelayanan Usaha a) Sektor Primer dan Tersier b) Sektor Sekunder					
	2403 2403.00	D PROMOSI PENANAMAN MODAL 1 Pengembangan Promosi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPMPPTSP Prov. Sulbar	
	2403.00.00	a. Analisis Strategi Promosi a) Analisis Target Promosi b) Analisis Daya Saing Promosi					
	2403.00.01	b. Fasilitas Promosi Luar Negeri a) Wilayah Amerika dan Eropa b) Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	2403.01	2 Promosi Sektoral	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPMPPTSP Prov. Sulbar	
	2403.01.00	a. Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan a) Industri Sumber Daya Alam b) Jasa dan Kawasan					
	2403.01.01	b. Promosi Industri Manufaktur a) Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronik b) Industri Manufaktur Lainnya					
	2403.01.02	c. Promosi Infrastruktur a) Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan b) Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur Lainnya					
	2403.02	3 Pameran dan Sarana Promosi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPMPPTSP Prov. Sulbar	
	2403.02.00	a. Pameran a) Penvisunan Program dan Monitoring b) Penvelenggaraan dan Evaluasi					
	2403.02.01	b. Media Cetak a) Materi Promosi b) Publikasi dan Distribusi					
	2403.02.02	c. Media Elektronik a) Materi Promosi b) Pelayanan Informasi					
	2404	<b>E KERJA SAMA PENANAMAN MODAL</b>					
	2404.00	1 Kerja Sama Antar Negara	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPMPPTSP Prov. Sulbar	
	2404.00.00	a. Ananlisis Strategi Promosi					
	2404.01	2 Kerja Sama Dunia Usaha Internasional	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPMPPTSP Prov. Sulbar	
	2404.01.00	a. Asosiasi dan Lembaga Bisnis a) Asosiasi Bisnis b) Lembaga Bisnis					
	2404.01.01	b. Lembaga Keuangan a) Lembaga Perbankan b) Lembaga Non Perbankan					
	2405	<b>F PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>					
	2405.00	1 Pelayanan Aplikasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPMPPTSP Prov. Sulbar	
	2405.00.00	a. Aplikasi Sektor Primer dan Tersier a) Aplikasi Baru b) Aplikasi Perluasan c) Aplikasi Perubahan					
	2405.00.01	b. Aplikasi Sektor Sekunder a) Aplikasi Baru b) Aplikasi Perluasan c) Aplikasi Perubahan					
	2405.01	2 Pelayanan Perizinan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPMPPTSP Prov. Sulbar	
	2405.01.00	a. Perizinan Sektor Primer dan Tersier a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana  b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa					
	2405.01.01	b. Perizinan Sektor Sekunder a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam b) Industri Kimia dan Barang Kimia					



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
		c) <b>Industri Aneka</b>					
	2405.02	3 Pelayanan Fasilitas	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPMPPTSP Prov. Sulbar	
	2405.02.00	a. Perizinan Sektor Primer dan Tersier a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana					
	2405.02.01	b. Perizinan Sektor Sekunder a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam b) Industri Kimia dan Barang Kimia c) Industri Aneka					
	2406	G PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPMPPTSP Prov. Sulbar	
	2406.00	1 Pemantauan Penanaman Modal					
	2406.01	2 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal					
	2406.02	3 Fasilitasi Penyelesaian Masalah					
	2406.03	4 Pengawasan Penanaman Modal					
	2406.04	5 Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal					
	2406.05	6 Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal					
<b>XXV.</b>	<b>2500</b>	<b>PENANGGULANGAN BENCANA</b>					
	2500.00	A Kebijakan Penanggulangan Bencana meliputi kebijakan dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Logistik dan Peralatan meliputi:  1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPBD Prov. Sulbar	
	2501	B PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN					
	2501.00	1 Pengurangan Resiko Bencana	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPBD Prov. Sulbar	
	2501.00.00	a. Pencegahan - Pengkajian Resiko - Pengelolaan Resiko					
	2501.00.01	b. Mitigasi - Mitigasi Struktur - Mitigasi Non Struktur	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPBD Prov. Sulbar	
	2501.01	2 Pemberdayaan Masyarakat					
	2501.01.00	a. Peran Lembaga Usaha - Usaha Padat Modal - Usaha Padat Karya					
	2501.01.01	b. Peran Organisasi Sosial Masyarakat - Organisasi Internasional - Organisasi Sosial Masyarakat Nasional					
	2501.01.02	c. Peran Masyarakat - Peningkatan Kesadaran Masyarakat - Peningkatan Ketahanan Masyarakat					
	2501.02	3 Kesiapsiagaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPBD Prov. Sulbar	
	2501.02.00	a. Peringatan Dini - Pemaduan Sistem Jaringan - Pemantauan dan Peringatan					
	2501.02.01	b. Perencanaan Siaga					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	2501.02.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya</li> <li>- Penerapan Rencana Strategis</li> </ul>					
	2502	c. Penyiapan Sumber Daya					
	2502.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya</li> <li>- Pengendalian</li> </ul>					
		C PENANGANAN DARURAT					
		1 Tanggap Darurat	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPBD Prov. Sulbar	
	2502.00.00	a. Perencanaan Darurat					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan Darurat</li> <li>- Perencanaan Operasi</li> </ul>					
	2502.00.01	b. Pengendalian Operasi					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengorganisasian Pos Komando</li> <li>- Sarana dan Prasarana Pos Komando</li> </ul>					
	2502.00.02	c. Penyelamatan dan Evakuasi					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelamatan</li> <li>- Evakuasi</li> </ul>					
	2502.01	2 Bantuan Darurat	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPBD Prov. Sulbar	
	2502.01.00	a. Bantuan Sandang Pangan					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan Sandang</li> <li>- Bantuan Pangan</li> </ul>					
	2502.01.01	b. Bantuan Kesehatan dan Air Bersih					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan Kesehatan</li> <li>- Bantuan Air Bersih</li> </ul>					
	2502.01.02	c. Bantuan Hunian Sementara					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Hunian Sementara</li> <li>- Pendukung Hunian Sementara</li> </ul>					
	2502.02	3 Perbaikan Darurat	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPBD Prov. Sulbar	
	2502.02.00	a. Pembersihan Lingkungan					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan Peralatan</li> <li>- Angkutan</li> </ul>					
	2502.02.01	b. Perbaikan Sarana Vital					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasarana Sosial</li> <li>- Prasarana Ekonomi</li> </ul>					
	2502.02.02	c. Pemantauan dan Pelaporan					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan</li> <li>- Pelaporan</li> </ul>					
	2503	D REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI					
	2503.00	1 Penilaian Kerusakan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPBD Prov. Sulbar	
	2503.00.00	a. Inventarisasi Kerusakan					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventarisasi Fisik</li> <li>- Inventarisasi Sosial Ekonomi</li> </ul>					
	2503.00.01	b. Estimasi Pembiayaan					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estimasi Pembiayaan Pembangunan</li> <li>- Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi</li> </ul>					
	2503.01	2 Pemulihan dan Peningkatan Fisik	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPBD Prov. Sulbar	
	2503.01.00	a. Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Umum					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Fasilitas Umum</li> <li>- Rekonstruksi Fasilitas Umum</li> </ul>					
	2503.01.01	b. Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Sosial					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Fasilitas Sosial</li> <li>- Rekonstruksi Fasilitas Sosial</li> </ul>					
	2503.01.02	c. Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Rekonstruksi Berat</li> </ul>					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	2503.02	- Rehabilitasi Rekonstruksi Ringan 3 Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPBD Prov. Sulbar	
	2503.02.00	a. Pemulihan dan Peningkatan Sosial - Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya - Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan					
	2503.02.01	b. Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi - Pemulihan Ekonomi - Peningkatan Ekonomi					
	2503.03	4 Penanganan Pengungsi	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BPBD Prov. Sulbar	
	2503.03.00	a. Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi - Perlindungan Pengungsi - Pemberdayaan Pengungsi					
	2503.03.01	b. Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi - Kompensasi - Pengembalian hak					
	2503.03.02	c. Penempatan Pengungsi - Pemulangan dan Repatriasi - Relokasi/Pengalihan					
	2504	E LOGISTIK DAN PERALATAN					
	2504	1 Logistik	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPBD Prov. Sulbar	
	2504.00	a. Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan - Analisis Kebutuhan - Pengadaan					
	2504.01	b. Penyimpanan dan Distribusi - Penyimpanan - Distribusi					
	2505	2 Peralatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPBD Prov. Sulbar	
	2505.00	a. Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan - Analisis Kebutuhan - Pengadaan					
	2505.01	b. Penyimpanan dan Pemeliharaan - Penyimpanan - Pemeliharaan					
	2505.02	c. Pengerahan dan Distribusi - Pengerahan - Distribusi					
	2506	3 Bahaya Kebakaran	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPBD Prov. Sulbar	
	2506.00	a. Kebijakan Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran					
	2506.01	b. Pencegahan Bahaya Kebakaran					
	2506.01.00	- Pemeriksaan dalam rangka Penerbitan IPB					
	2506.01.01	- Pemeriksaan Berkala					
	2506.01.02	- Pemeriksaan Izin Khusus untuk Instansi					
	2506.01.03	- Pemeriksaan Sumber-Sumber Air dan Bahan-Bahan Lain					
	2506.01.04	- Penelitian Bahan					
	2506.02	c. Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pertama Akibat kebakaran - Penanggulangan Kebakaran - Penyelamatan Pertama Akibat Kebakaran					
	2506.03	d. Pengawasan dan Pengendalian					
	2506.04	e. Peran Serta Masyarakat					
	2506.05	f. Penelitian dan Penyelidikan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
XXVI.	2506.06 2600	g. Bimbingan Teknis <b>PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2600.00	A Kebijakan tentang pendidikan dan kebudayaan meliputi: kurikulum, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, pendidikan dasar, menengah, atas, dan pendidikan tinggi.  1 Pengkaiian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan bahan 3 Perumusan kebijakan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan					
	2601 2602	5 Penetapan dalam bentuk NSPK B PEMBINAAN PENDIDIKAN 1 Pendidikan anak usia dini, non formal dan informal	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2602.00 2602.00.00	a. Paud - Bahan ajar - Alat permainan edukatif					
	2602.00.01 2602.00.02 2602.00.03 2602.00.04	- Pelatihan - Block Grant - Sosialisasi - Peringatan hari anak nasional					
	2602.01 2602.01.00	b. Pendidikan masvarakat - Penvelengaraan program - Bahan ajar - Penyusunan maialah					
	2602.01.01	- Pemberian bantuan sosial - Penilaian proposal - Pemberian bansos					
	2602.01.02	- Pembinaan program - Temu koordinasi - Bintek program/pendampingan - Peningkatan kapasitas kelembagaan					
	2602.01.03 2602.01.04 2602.01.05	- Lomba, penghargaan, dan anugerah - Peringatan hari anak internasional - Pameran/publikasi/sosialisasi					
	2602.02 2602.02.00	c. Kursus dan pelatihan - Penvelengaraan program - Uji kompetensi (akreditasi) - Penilaian dan penetapan kinerja lembaga kursus dan pelatihan (LKP)					
	2602.02.01 2602.02.02	- Pendataan lembaga kursus dan pelatihan - Penguatan kerja sama dengan lembaga/mitra - Pemberian bantuan sosial - Pembinaan program: bintek, orientasi teknis, dan temu karya					
	2602.02.03	- Standar kursus dan pelatihan - Kurikulum - Bahan ajar					
	2602.02.04 2602.02.05 2602.02.06	- Lomba lembaga kursus berprestasi - Publikasi dan promosi kursus - Sertifikasi					
	2602.03 2602.03.00 2602.03.01 2602.03.02 2602.03.03 2603	d. Pendidik dan tenaga pendidikan - Bahan ajar - Block grant - Sosialisasi (modul) - Data pendidik dan tenaga pendidik 2 Pendidikan dasar					
	2603.00 2603.00.00 2603.00.01 2603.00.02 2603.00.03	a. Sekolah dasar - Kurikulum - Bahan ajar - Pelatihan - Block grant					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	2603.00.04 2603.00.05 2603.00.06 2603.00.07 2603.01 2603.01.00 2603.01.01 2603.01.02 2603.01.03 2603.01.04 2603.01.05 2603.01.06 2603.01.07 2603.02 2603.02.00 2603.02.01 2603.02.02 2603.02.03 2603.02.04 2603.02.05 2603.02.06 2603.02.07 2603.02.08	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan teknis/sosialisasi</li> <li>- Lomba, savembara, dan festival</li> <li>- Bantuan operasional sekolah [BOS]</li> <li>- Bantuan siswa miskin</li> </ul> <p>b. Sekolah menengah pertama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurikulum</li> <li>- Bahan ajar</li> <li>- Pelatihan</li> <li>- Block grant</li> <li>- Bimbingan teknis/sosialisasi</li> <li>- Lomba, savembara, dan festival</li> <li>- Bantuan operasional sekolah [BOS]</li> <li>- Bantuan siswa miskin</li> </ul> <p>c. Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan ajar</li> <li>- Petunjuk teknis</li> <li>- Block grant</li> <li>- Sosialisasi</li> <li>- Lomba, savembara, festival, gebyar, dan jambore</li> <li>- Kurikulum/bahan pembelajaran</li> <li>- Alat bantu pembelajaran</li> <li>- Pendataan</li> <li>- Kelembagaan</li> <li>- Unit kesehatan sekolah</li> <li>- Pendidikan jasmani adaptif</li> <li>- Pendidikan inklusi</li> <li>- Block grant</li> <li>- Bimbingan teknis/sosialisasi</li> <li>- <b>Lomba, savembara, festival, gebyar, dan jambore</b></li> </ul>					
	2603.03 2603.03.00 2603.03.01 2603.03.02  2603.03.03  2603.03.04 2603.03.05 2603.03.06 2603.03.07 2604   2604.00 2604.00.00 2604.00.01 2604.00.02 2604.00.03 2604.00.04 2604.00.05 2604.00.06 2604.00.07 2604.01 2604.01.00 2604.01.01 2604.01.02 2604.01.03 2604.01.04 2604.01.05 2604.01.06 2604.01.07 2604.01.08	<p>d. Pendidik dan tenaga pendidik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan dan pemetaan</li> <li>- Pembinaan guru dan tenaga pendidik</li> <li>- Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi)</li> <li>- Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah</li> <li>- Penghargaan guru dan tenaga kependidikan</li> <li>- Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan</li> <li>- Block grant</li> <li>- Bimbingan teknis/sosialisasi</li> </ul> <p>3 Pendidikan menengah</p> <p>a. Sekolah menengah atas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurikulum</li> <li>- Bahan ajar</li> <li>- Pelatihan</li> <li>- Block Grant</li> <li>- Bimbingan teknis/sosialisasi</li> <li>- Lomba, savembara, dan festival</li> <li>- Bantuan operasional sekolah [BOS]</li> <li>- Bantuan siswa miskin</li> </ul> <p>b. Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan ajar</li> <li>- Petunjuk teknis</li> <li>- Block grant</li> <li>- Sosialisasi</li> <li>- Lomba, savembara, festival, gebyar, dan jambore</li> <li>- Kurikulum/bahan pembelajaran</li> <li>- Alat bantu pembelajaran</li> <li>- Pendataan</li> <li>- Kelembagaan</li> <li>- Unit kesehatan sekolah</li> <li>- Pendidikan jasmani adaptif</li> <li>- Pendidikan inklusi</li> <li>- Block grant</li> <li>- Bimbingan teknis/sosialisasi</li> </ul>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	2604.02 2604.02.00 2604.02.01	- Lomba, savembara, festival, gebvar, dan jambore c. Pendidik dan tenaga pendidik - Pendataan dan pemetaan - <u>Pembinaan guru dan tenaga pendidik</u>					
	2604.02.02 2604.02.03 2604.02.04 2604.02.05 2604.02.06 2604.02.07 2605	- Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi) - Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah - Penghargaan guru dan tenaga kependidikan - Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan - Block grant - Bimbingan teknis/ sosialisasi 4 Ujian Nasional/ Sekolah/ Lembaga	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2605.00 2605.01 2605.01 2606 2606.00 2606.00.00	a. Naskah Ujian Nasional b. Naskah Ujian Sekolah/ Lembaga c. Lembar Hasil Ujian D KEBUDAYAAN 1 Pelestarian cagar budaya dan permuseuman a. Registrasi nasional	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2606.00.01	- Pendaftaran dan penetapan - Pengelolaan data b. Pelindungan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2606.00.02	- Perizinan dan pengamanan - Pemeliharaan dan pemugaran c. Pengembangan dan pemanfaatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2606.00.03	- Pengembangan - Pemanfaatan d. Eksplorasi dan dokumentasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2606.01	- Eksplorasi cagar budaya - <u>Dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum</u> 22 Pembinaan kesenian dan perfilman	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2606.01.00 2606.01.01 2606.01.02 2606.01.03 2606.02 2606.02.00	a. Pembinaan seni pertunjukan - Seni pertunjukan tradisional - Seni pertunjukan nontradisional b. Pembinaan seni rupa - Seni rupa murni - Seni rupa terapan c. Pembinaan literasi dan apresiasi film - Literasi - Apresiasi d. Dokumentasi dan publikasi - Dokumentasi seni dan film - Publikasi seni dan film 3 Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi a. Kelembagaan dan kepercayaan - Pemberdayaan lembaga	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	2606.02.01	- Hubungan antar lembaga b. Komunitas kepercayaan - Komunitas adat - Upacara adat					
	2606.02.02	c. Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional - Pengetahuan tradisional - Ekspresi budaya tradisional					
	2606.02.03	d. Lingkungan budaya dan pranata sosial - Lingkungan budaya - Pranata sosial					
	2606.03	4 Sejarah dan nilai budaya	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2606.03.00	a. Sejarah - Penggalan sumber sejarah - Penulisan sejarah					
	2606.03.01	b. Pemetaan nilai - Pemetaan - Klasifikasi					
	2606.03.02	c. Verifikasi dan perumusan nilai					
	2606.03.03	- Verifikasi nilai - Perumusan nilai d. Dokumentasi dan publikasi - Dokumentasi sejarah dan nilai budaya - Publikasi sejarah dan nilai budaya	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2606.04	5 Internalisasi nilai dan diplomasi budaya					
	2606.04.00	a. Internalisasi nilai budaya - Pengemasan nilai budaya - Penanaman nilai budaya					
	2606.04.01	b. Kekayaan budaya - Pencatatan kekayaan budaya - Penetapan kekayaan budaya					
	2606.04.02	c. Warisan budaya nasional dan dunia - Warisan budaya benda - Warisan budaya takbenda					
	2606.04.03	d. Diplomasi budaya - Diplomasi dalam negeri - Diplomasi luar negeri	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2606.05	6 Arkeologi					
	2606.05.00	a. Program Dan Kerja Sama Penelitian					
	2606.05.01	b. Data Dan Informasi Penelitian					
	2607	E KURIKULUM					
	2607.00	1 Pembinaan kurikulum	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2607.01	2 Hasil evaluasi penyusunan kurikulum	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2607.02	3 Perbukuan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2607.02.00	a. Penvusunan standar mutu buku					
	2607.02.01	b. Pengumpulan naskah					
	2607.02.02	c. Penilaian mutu buku dan pemilihan					
	2607.02.03	d. Persetujuan dan pengesahan naskah					
	2607.02.04	e. Penerbitan/pencetakan					
	2607.02.05	f. Master buku/naskah yang dicetak					
	2607.02.06	g. Distribusi buku					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	2607.02.07 2607.02.08 2608	h. Pengembangan naskah i. Pengkajian buku F PENILAIAN PENDIDIKAN	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2608.00 2608.01 2608.02 2609	1 Penilaian akademik 2 Penilaian non akademik 3 Analisis dan sistem informasi penilaian G PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2609.00 2609.00.00	1 Pengembangan dan pelindungan a. Pengkajian - Bahasa - Sastra					
	2609.00.01 2609.00.02 2609.01	b. Pembakuan dan pelindungan c. Informasi dan publikasi 2 Pembinaan dan pemasvarakatan a. Pemasvarakatan - Penvuluhan - Bantuan teknis					
	2609.02	3 Pembelajaran - Proses pembelajaran - Pembinaan tenaga kebahasaan dan kesusasteraan					
	2609.03	4 Peningkatan dan pengendalian - Peningkatan fungsi dan peran - Pengendalian penggunaan bahasa					
	2610	H PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN					
	2610.00	1 Pengembangan profesi pendidik	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2610.00.00	a. Peningkatan kompetensi					



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	2610.00.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal</li> <li>- Pengembangan profesi pendidikan dasar</li> <li>- Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah</li> <li>b. Sertifikasi</li> <li>- Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal</li> </ul>					
	2610.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan profesi pendidikan dasar</li> <li>- Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah</li> <li>- Pengembangan profesi pendidik pendidikan tinggi (dosen)</li> <li>2 Pengembangan tenaga kependidikan</li> </ul>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2610.01.00	a. Program					
	2610.01.021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik</li> <li>- Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai</li> <li>b. Evaluasi</li> <li>- Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik</li> <li>- Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai</li> </ul>					
	2610.02	3 Pengembangan SDM kebudayaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2610.02.00	a. Program					
	2610.02.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kompetensi</li> <li>- Sertifikasi</li> <li>b. Evaluasi</li> <li>- Peningkatan kompetensi</li> <li>- Sertifikasi</li> </ul>					
	2610.03	4 Penjaminan mutu pendidikan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2610.03.00	a. Pemetaan mutu					
	2610.03.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal</li> <li>- Penjaminan mutu pendidikan dasar</li> <li>- Penjaminan mutu pendidikan menengah dan pendidikan tinggi</li> <li>b. Sistem informasi</li> <li>- Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal</li> <li>- Penjaminan mutu pendidikan dasar</li> <li>- Penjaminan mutu pendidikan menengah dan pendidikan tinggi</li> </ul>					
	2610.04	6 Penyusunan materi/SOP/instrumen/panduan/pedoman	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2610.05	a. Proposal/TOR/KAK					
	2610.06	7 Penvelenggaraan pelatihan/diseminasi/sosialisasi					
	2610.07	8 Penvelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi					
	2610.08	9 Penvaluran block grant pascabencana					
	2611	10 Lomba/sayembara/festival/olimpiade pendidikan nasional internasional					
	2611	I TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN					
	2611.00	1 Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2611.00.00	a. Perancangan dan produksi					
	2611.00.01	b. Penviaran dan pengendalian					
	2611.01	2 Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis multimedia dan web	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2611.01.00	a. Perancangan dan produksi					
	2611.01.01	b. Aplikasi dan pengendalian					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	2611.02	3 Pengembangan jejaring	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2612 2612.00	J DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN 1 Data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2612.00.00 2612.00.01	a. Validasi dan integrasi data peserta didik b. Validasi dan integrasi data peserta pendidik dan tenaga kependidikan					
	2612.01	2 Data satuan pendidikan dan proses pembelajaran	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2612.01.00	a. Validasi dan integrasi data satuan pendidikan					
	2612.01.01 2612.02	b. Validasi dan integrasi data proses pembelajaran 3 Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
	2612.02.00 2612.02.01	a. Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik anak b. Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dasar dan menengah					
	2612.02.02	c. Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan tinggi					
	2613	K MONITORING DAN EVALUASI	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISDIKBUD Prov. Sulbar	
<b>XXVII</b>	<b>2700</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>					
	2700.00	A. Kebijakan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPSDM Prov. Sulbar	
		Kebijakan Bidang Diklat 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan kebijakan 3. Perumusan kebijakan 4. Masukan dan dukungan kebijakan 5. Penetapan NSPK					
	2701	B. Pengembangan program dan pembinaan diklat	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPSDM Prov. Sulbar	
	2701.00 2701.01 2701.01.00 2701.01.01 2701.01.02 2701.01.03 2701.01.04 2701.01.05 2701.02 2701.02.00 2701.02.01 2701.02.02 2701.02.03	1. Standarisasi 2. Akreditasi a. Institusi penilai b. Program/Institusi yang dinilai c. Kurikulum dan Modul d. Sistem Informasi e. Monitoring dan evaluasi f. Konsultasi, advokasi, asistensi diklat 3. Pembinaan Widvaisyara a. Seleksi dan pengembangan b. Sertifikasi c. Monitoring dan evakuasi d. Penilaian					
	2701.02.04 2701.02.05 2702	e. Konsultasi, advokasi dan asistensi f. Sistem Informasi C. Penyelenggaraan Diklat	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPSDM Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
XXVIII.	2702.00 2702.00.00 2702.00.01 2702.00.02 2702.00.03 2702.00.04 2702.01 2702.01.00 2702.01.01 2702.01.02 2702.01.03 2702.01.04 2702.02 2702.02.00 2702.02.01 2702.02.02 2702.02.03 2702.02.04 2702.03 2702.03.00 2702.03.01 2702.03.02 2702.03.03 2702.03.04 2702.04 2702.04.00 2702.04.01 2702.04.02 2702.04.03 2702.04.04	1. Prajabatan a. Penyelenggaraan b. Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat prajabatan c. Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran d. Sistem informasi diklat prajabatan e. Alumni 2. Diklatpim a. Penyelenggaraan b. Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklatpim c. Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran d. Sistem informasi diklatpim e. Alumni 3. Diklat Teknis a. Penyelenggaraan b. Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat teknis c. Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran d. Sistem informasi diklat teknis e. Alumni 4. Diklat Fungsional a. Penyelenggaraan b. Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat fungsional c. Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran d. Sistem informasi diklat fungsional e. Alumni 5. Orientasi DPRD a. Penyelenggaraan b. Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan orientasi DPRD c. Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran d. Sistem informasi orientasi DPRD e. Alumni					
	<b>2800</b> 2800.00	<b>PENELITIAN</b> A. Perumusan kebijakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan serta pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi : kelembagaan, sumber daya dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi  <u>1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan</u> 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan/uji petik/hearing dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK B. Penelitian dan pengkajian 1 Rencana Kerja  a. Master plan/rencana strategis b. Rencana kerja tahunan : proposal/idea concept paper (ICP) c. Berkas/kontrak MoU kerjasama/material transfer agreement (MTA)  d. Perencanaan penelitian 2 Administrasi penelitian : surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja, dokumen/formulir pendukung/instruksi, persiapan survey, penggunaan peralatan ( alat dan bahan ), dan lain-lain.  3 Pelaksanaan penelitian/pengkajian a. Prosedur/petunjuk  b. Data primer	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPPD Prov. Sulbar	
	2801 2801.00		Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPPD Prov. Sulbar	
	2801.00.00 2801.00.01 2801.00.02						
	2801.00.03 2801.01		Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPPD Prov. Sulbar	
	2801.02 2801.02.00		Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPPD Prov. Sulbar	
	2801.02.01		Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPPD Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	2801.02.02	c. Log Book	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPPD Prov. Sulbar	
	2801.02.03	d. Studi kelayakan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPPD Prov. Sulbar	
	2801.02.04	e. Instrumen penelitian	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPPD Prov. Sulbar	
	2801.02.05	f. Pelaksanaan survey	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPPD Prov. Sulbar	
	2801.02.05	g. Laporan hasil pendataan/survey	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BPPD Prov. Sulbar	
	2801.02.06	h. Analisis/pengolahan data	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BPPD Prov. Sulbar	
	2801.03	4 Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPPD Prov. Sulbar	
	2801.04	a. Laporan hasil penelitian dan hasil luaran b. Rekomendasi 5 Hasil penelitian dan pengkajian hasil jasa layanan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPPD Prov. Sulbar	
	2802	C. Pengembangan dan Inovasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPPD Prov. Sulbar	
	2802.00 2802.01 2802.02 2802.03 2803	1 Rencana kerja 2 Administrasi pengembangan dan inovasi 3 Pelaksanaan 4 Hasil pengembangan/inovasi D. Penerapan dan Pemanfaatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPPD Prov. Sulbar	
	2803.00 2803.01 2803.02 2803.03	1 Rencana kerja 2 Advokasi dan fasilitasi penelitian 3 Diseminasi hasil penelitian 4 Pembinaan Penelitian a. Pembinaan dan Pengkajian b. Sertifikasi Personil Peneliti c. Akreditasi Laboratorium					
	2803.04 2803.05	5 Jaringan Sistem Nasional Penelitian 6 Data dan informasi hasil penelitian					
	2803.06 2803.07 2803.08 2804	7 Master proceeding/ jurnal penelitian 8 HAKI 9 Forum Komunikasi Penelitian E. Layanan Jasa	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BPPD Prov. Sulbar	
	2804.00 2804.00.00 2804.00.01 2804.00.02 2804.00.03	1. Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK a. Jasa laboratorium pengujian b. Jasa teknologi produksi c. Jasa studi d. Jasa penvewaan peralatan					

1 NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
XXIX.	2804.00.04 2804.00.05 2804.00.06	e. Jasa perbantuan tenaga ahli/profesi f. Jasa sertifikasi/kalibrasi dan sertifikasi g. Buku rekaman barang yang diuji/dikalibrasi					
	2900	PENGADAAN					
	2900.00	A KEBIJAKAN	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
	2901	B PELAKSANAAN PENGADAAN 1  Kebijakan: Pengembangan Strategi, Monitoring-evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Penyelesaian Sengketa. 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penetapan Kebijakan 3 Perumusan kebijakan 4 Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) 5 Penetapan kebijakan 6 MOU  a.. Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang/Jasa b. Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pengadaan  c. Penetapan Kebijakan Umum d. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) e. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
	2901.00	2 Pemilihan Penyedia					
	2901.00.00	a. Persiapan Pemilihan Penyedia	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
	2901.00.01	- Kaji ulang pengadaan - Menyusun dan Menetapkan spesifikasi teknis - Menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)					
		- Menetapkan rancangan kontrak - Menyusun dokumen pengadaan					
		b. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia - Pelelangan 1). Pengumuman	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
		2). Pendaftaran	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
		3). Penjelasan pekerjaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
		4). Pemasukan dan pembukaan penawaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
		5). Evaluasi penawaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
		6). Penetapan dan pengumuman pemenang	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	2901.00.02	- e-Purchasing	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
	2901.00.03	- Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
	2901.01 2901.01.00	3 Penandatanganan Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak a. Penandatanganan Kontrak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
	2901.01.01	- Surat Penunjukkan Penvedia Barang/Jasa (SPPBJ) - Kontrak - Surat Perintah Mulai Keria (SPMK) b. Pelaksanaan Kontrak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
	2901.02	- Laporan Pelaksanaan - Berita Acara Serah Terima (BAST) 4 Swakelola a. Perencanaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
		b. Pelaksanaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
		c. Pengawasan dan Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
	2902 2902.00	C PENGEMBANGAN STRATEGI PENGADAAN 1 Pengembangan Strategi Pengadaan Umum	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
	2902.00.00	a. Barang dan jasa - Barang dan jasa lainnva - Jasa Konsultansi					
	2902.00.01	b. Pekerjaan Konstruksi - Pelaksana Konstruksi - <u>Perencana dan Pengawas Konstruksi</u>					
	2902.01	2 Pengembangan Strategi Pengadaan Khusus	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
	2902.01.00	a. Kemitraan pemerintah dengan badan usaha - Kemitraan infrastruktur - Kemitraan non infrastruktur					
	2902.01.01	b. Badan usaha dan keadaan khusus - Badan usaha - Bidang pertahanan keamanan dan keadaan khusus					
	2903 2903.00	D MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 1 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
	2903.00.00	a. Perencanaan pengadaan - Perencanaan Pengadaan Kementerian/Lembaga/Instansi - Perencanaan Pengadaan Pemerintah Daerah					
	2903.00.01	b. Monitoring dan evaluasi - Pelaksanaan kebijakan pengadaan - Kinerja pelaksanaan pengadaan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	2903.01	2 Pengembangan Sistem Katalog	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
	2903.01.00	a. Riset dan kontrak					
		- Riset Pasar dan Industri					
		- Kontrak pavyung					
	2903.01.01	b. Pengelolaan katalog					
		- Pengendalian pelaksanaan katalog					
		- Evaluasi katalog					
	2903.02	3 Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
	2903.02.00	a. Pengembangan aplikasi dan teknologi informasi					
		- Pengembangan aplikasi SPSE					
		- Teknologi Informasi dan Komunikasi SPSE					
	2903.02.01	b. Pengelolaan dan pembinaan layanan pengadaan secara elektronik					
		- Bimbingan Teknis LPSE					
		- Monitoring dan Evaluasi LPSE Nasional					
	2904	E PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA					
	2904.00	1 Pengembangan pengelola pengadaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
	2904.00.00	a. Karir pengelola pengadaan					
	2904.00.01	b. Tata kelola pengelola pengadaan					
	2904.00.02	c. Unit layanan pengadaan					
	2904.00.03	d. Standar kompetensi					
	2904.01	2 Pelatihan Kompetensi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
	2904.01.00	a. Penvelenggaraan diklat					
	2904.02	3 Sertifikasi Profesi					
	2904.02.00	a. Sistem sertifikasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
		- Sistem sertifikasi					
		1. Dokumen ISO					
		2. Dokumen Kebijakan/Reguler					
	2904.02.01	b. Sarana sertifikasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
		1. Dokumen Inventarisasi dan Pemeliharaan Sarana					
		2. Master soal	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
	2904.03	4 Tata Kelola dan evaluasi sertifikasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
	2904.03.00	a. Tata kelola sertifikasi					
		- Dokumen Kegiatan Penvelenggaraan Ujian					
	2904.03.01	b. Evaluasi dan surveilen					
		- Dokumen Evaluasi					
		- Dokumen Surveilen					
	2905	F. Hukum dan Penvelesaian Sanggah					
	2905.00	1 Bantuan hukum/konsultasi hukum/advokasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
XXX.	2905.00.00	a. Tata Usaha Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Biro Ekbang Setda. Prov. Sulbar	
	2905.00.01	b. Perdata					
	2905.01	c. Pidana					
		2 Penanganan Permasalahan Hukum					
	2905.01.00	a. Penanganan permasalahan kontrak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Inspektorat Daerah Prov. Sulbar	
		- Penanganan permasalahan kontrak barang dan jasa					
		- Penanganan permasalahan kontrak pekerjaan konstruksi					
	2905.01.01	b. Keterangan ahli					
		- Keterangan ahli barang dan jasa					
		- Keterangan ahli pekerjaan konstruksi					
XXXI.	3000	PENGAWASAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Inspektorat Daerah Prov. Sulbar	
	3000.00	A. Audit					
	3000.01	B. Reviu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Inspektorat Daerah Prov. Sulbar	
	3000.02	C. Evaluasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Inspektorat Daerah Prov. Sulbar	
	3000.03	D. Pengaduan Masyarakat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Inspektorat Daerah Prov. Sulbar	
	3000.04	E. Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Inspektorat Daerah Prov. Sulbar	
	3000.05	F. Pemantauan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Inspektorat Daerah Prov. Sulbar	
XXXI.	3000.05.00	1. Pemantauan pelaksanaan kegiatan/program	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Inspektorat Daerah Prov. Sulbar	
	3000.05.01	2. Tuntutan Ganti Rugi					
	3000.05.02	3. Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP)					
	3000.05.03	4. Penerapan Early Warning System					
	3000.05.04	5. Pemantauan Disiplin Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dukcapil Prov. Sulbar	
	3000.05	D. Kegiatan Pengawasan lainnya					
XXXI.	3100	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dukcapil Prov. Sulbar	
	3100.00	A Kebijakan					
			Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dukcapil Prov. Sulbar	
		Kebijakan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga					
		1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan					
		2 Penyiapan kebijakan					
		3 Perumusan kebijakan					
		4 Masukam dan dukungan kebijakan					
		5 Penetapan Kebijakan					
	3101	B Pengendalian Penduduk					
	3101.00	1 Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk					
	3101.00.00	a. Analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk					
		- Pengumpulan dan Pengolahan Data					



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3101.00.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi dan Pelaporan</li> <li>b. Fasilitas pemaduan kebijakan pengendalian penduduk</li> <li>- Penyiapan fasilitas</li> <li>- Evaluasi dan pelaporan</li> </ul>					
	3101.01	2 Perencanaan pengendalian penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dukcapil Prov. Sulbar	
	3101.01.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Profil dan Proveksi Penduduk</li> <li>- Data profil dan proveksi Penduduk</li> <li>- Evaluasi data profil dan proveksi penduduk</li> </ul>					
	3101.01.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penetapan parameter pengendalian penduduk</li> <li>- Penetapan sasaran parameter</li> <li>- <u>Evaluasi sasaran parameter</u></li> </ul>					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3101.01.02	c. Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk - Pemanfaatan profil dan proyeksi - Pemanfaatan Parameter					
	3101.02	3 Kerja sama pendidikan kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dukcapil Prov. Sulbar	
	3101.02.00	a. Pengembangan sistem - Pengembangan sistem jalur pendidikan formal - Pengembangan jalur pendidikan nonformal dan informal					
	3101.02.01	b. Pengembangan Materi - Pengembangan materi jalur pendidikan formal - Pengembangan materi jalur pendidikan nonformal dan informal					
	3101.02.02	c. Monitoring dan evaluasi - Monitoring dan evaluasi jalur pendidikan formal - Monitoring dan evaluasi jalur pendidikan nonformal dan informal					
	3101.03	4 Analisis dampak kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dukcapil Prov. Sulbar	
	3101.03.00	a. Analisis Sosial					
	3101.03.01	b. Analisis Ekonomi					
	3101.03.02	c. Analisis dampak politik, pertahanan, dan keamanan					
	3101.03.03	d. Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan					
	3102	C Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi					
	3102.00	1 Bina kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dukcapil Prov. Sulbar	
	3102.00.00	a. Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah					
	3102.00.01	b. Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana					
	3102.00.02	c. Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah - Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah - Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah					
	3102.01	2 Bina kesertaan keluarga berencana jalur swasta	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dukcapil Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3102.01.00 3102.01.01 3102.01.02	a. Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta b. Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta c. Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta - Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta - Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta					
	3102.02	3 Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran khusus	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dukcapil Prov. Sulbar	
	3102.02.00	a. Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan - Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan - Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan					
	3102.02.01	b. Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan - Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan - Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan					
	3102.02.02	c. Kesertaan keluarga berencana pria - Peningkatan akses keluarga berencana pria - Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria					
	3102.03	4 Kesehatan Reproduksi  a. Kelangsungan hidup ibu, bavi, dan anak b. Pencegahan PMS dan HIV/AIDS c. Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dukcapil Prov. Sulbar	
	3103 3103.00	D Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga 1 Bina keluarga Balita dan Anak	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dukcapil Prov. Sulbar	
	3103.00.00	a. Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak - Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak - Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak					
	3103.00.01	b. Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak - <u>Monitoring bina keluarga Balita dan anak</u> - Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak					
	3103.01	2 Bina ketahanan remaja	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dukcapil Prov. Sulbar	
	3103.01.00	a. Pelembagaan bina ketahanan remaia - Pelembagaan bina ketahanan remaia jalur pendidikan - Pelembagaan bina ketahanan remaia jalur masvarakat					
	3103.01.01	b. Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaia - Monitoring bina ketahanan remaia - Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaia					
	3103.02	3 Bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dukcapil Prov. Sulbar	
	3103.02.00	a. Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan  - Pengembangan Program Bina Ketahanan keluaraga Lansia  - Pengembangan Program Bina Ketahanan keluaraga Rentan					
	3103.02.01	b. Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan - Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan - Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3103.02.02	Rentan c. Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan - Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan - Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan					
	3103.03	4 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dukcapil Prov. Sulbar	
	3103.03.00	a. Pengembangan program usaha ekonomi keluarga					
	3103.03.01	b. Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga					
	3103.03.02	c. Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga - Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga - Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga					
	3103.03.03	d. Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga					
	3103.04	5 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dukcapil Prov. Sulbar	
	3103.04.00	a. Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera					
	3103.04.01	b. Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera - Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera - Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera					
	3103.04.02	c. Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera - Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera - Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera					
	3104	E Advokasi dan Informasi					
	3104.00	1 Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dukcapil Prov. Sulbar	
	3104.00.00	a. Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi - Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi - Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi					
	3104.00.01	b. Advokasi dan pencitraan c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi - Promosi - Sarana produksi media komunikasi - Produk media komunikasi					
	3104.01	2 Bina hubungan antar lembaga	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dukcapil Prov. Sulbar	
	3104.01.00	a. Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi					
	3104.01.01	b. Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota - Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota - Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota					
	3104.01.02	c. Hubungan dengan lembaga nonpemerintah - Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah - Penguatan hubungan dengan lembaga non pemerintah					
	3104.02	3 Bina lini lapangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dukcapil Prov. Sulbar	
	3104.02.00	a. Tenaga lini lapangan - Pengembangan tenaga lini lapangan - Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan					
	3104.02.01	b. Institusi Masyarakat Pedesaan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3104.02.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan institusi masyarakat pedesaan</li> <li>- Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan</li> <li>c. Mekanisme Operasional lini lapangan</li> <li>- Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan</li> <li>- Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan</li> </ul>					
	3104.03	4 Pelaporan dan statistik	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dukcapil Prov. Sulbar	
	3104.03.00	a. Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan					
	3104.03.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan</li> <li>- Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan</li> </ul>					
	3104.03.02	b. Pengumpulan dan pengolahan data					
		c. Analisis dan evaluasi					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk</li> <li>- Analisa dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera</li> </ul>					
	3104.04	5 Teknologi Informasi dan Dokumentasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dukcapil Prov. Sulbar	
	3104.04.00	a. Sistem aplikasi dan bank data					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan sistem aplikasi</li> <li>- Pengelolaan bank data</li> </ul>					
	3104.04.01	b. Infrastruktur teknologi informasi					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Infrastruktur teknologi informasi</li> <li>- Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi</li> </ul>					
	3104.04.02	c. Dokumentasi dan penyebarluasan informasi					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi dan perpustakaan</li> </ul>					
<b>XXXII.</b>	<b>3200</b>	<b>PERDAGANGAN</b>					
	3200.00	A KEBIJAKAN	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
		Kebijakan tentang Perdagangan Dalam Negeri, Standarisasi dan perlindungan konsumen, Perdagangan Luar Negeri, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Pengembangan Ekspor Nasional.					
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan</li> <li>2 Penyiapan bahan</li> <li>3 Perumus Kebijakan</li> <li>4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</li> <li>5 Penetapan dalam bentuk NSPK</li> <li>6 perumusan dan penerapan standar</li> </ol>					
	3201	B PERDAGANGAN DALAM NEGERI					
	3201.00	1 Bina Usaha	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3201.00.00	a. Kelembagaan dan penguatan usaha					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelembagaan</li> <li>- Penguatan usaha</li> </ul>					
	3201.00.01	b. Jasa Perdagangan					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan berbasis elektronik</li> <li>- Perdagangan berbasis jasa distribusi dan bisnis</li> </ul>					
	3201.00.02	c. Usaha dagang asing dan keagenan					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usaha dagang asing</li> <li>- Keagenan</li> </ul>					
	3201.00.03	d. Informasi perusahaan					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendaftaran perusahaan</li> <li>- Seksi analisa LKTP</li> </ul>					
	3201.00.04	e. Pelaku pasar					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengecer</li> <li>- Pemasok</li> </ul>					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3201.01	2 Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3201.01.00	a. iklim usaha dan bimbingan teknis					
	3201.01.01	- Iklim usaha					
		- Bimbingan teknis					
	3201.01.01	b. fasilitasi usaha dan pemasaran					
		- Fasilitasi usaha produktif					
		- Pemasaran					
	3201.01.02	c. pengembangan produk lokal					
		- Penelaahan potensi produk					
		- Fasilitasi penguatan produk					
	3201.01.03	d. pencitraan produk dalam negeri					
		- kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri					
		- peningkatan promosi					
	3201.02	3 Logistik dan Sarana Distribusi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3201.02.00	a. Pengembangan sarana distribusi					
		- Perencanaan					
		- Bimbingan teknis pengembangan					
	3201.02.01	b. Pengelolaan sarana distribusi					
		- Bimbingan teknis pengelolaan					
		- Evaluasi pengelolaan					
	3201.02.02	c. kerja sama pengembangan sistem logistik					
		- Pemerintah					
		- Lembaga non pemerintah					
	3201.02.03	d. Informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik					
		- Informasi logistik					
		- Bimbingan teknis penyedia jasa logistik					
	3201.03	4 Bahan Pokok dan Barang Strategis	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3201.03.00	a. Informasi Pasar					
		- Informasi harga					
		- Pengumpulan					
		- Pengolahan data					
		- Penyiapan					
		- Penilaian informasi					
		- Analisis					
		- Informasi non harga					
		- Pengumpulan					
		- Pengolahan data					
		- Penyiapan					
		- Penilaian informasi					
		- Analisis					
	3201.03.01	b. Hasil industri					
		- Gula dan tepung					
		- Minyak goreng dan garam					
	3201.03.02	c. <del>Barang strategis</del>					
	3201.03.03	- Hasil agro					
		- Hasil industri					
		d. Bahan pokok agro					
		- Serelia					
		- Hewan dan non serelia					
	3202	C STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
	3202.00	1 Standardisasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3202.00.00	a. Kelembagaan dan informasi standar					
	3202.00.01	b. Kerjasama standarisasi					
	3202.00.02	c. Usaha dagang asing dan keagenan					
	3202.00.03	d. Perumusan dan Penerapan Standar					
	3202.00.04	e. Tata Usaha					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3202.01	2 Pemberdayaan Konsumen	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3202.01.00	a. keriasama, informasi, dan publikasi					
	3202.01.01	- kerja sama					
	3202.01.01	- informasi dan publikasi					
	3202.01.02	b. analisa penyelenggara perlindungan konsumen					
	3202.01.02	- konsultasi hukum					
	3202.01.02	- analisis					
	3202.01.03	c. bimbingan konsumen dan pelaku usaha					
	3202.01.03	- bimbingan konsumen					
	3202.01.03	- bimbingan pelaku usaha					
	3202.02	d. fasilitasi kelembagaan					
	3202.02	- pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat					
	3202.02	- pemberdayaan badan penyelesaian sengketa konsumen					
	3202.02	2 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3202.02.00	a. produk pertambangan dan aneka industri					
	3202.02.00	- produk pertambangan dan olahan					
	3202.02.01	- produk aneka industri					
	3202.02.01	b. produk pertanian, kimia, dan kehutanan					
	3202.02.01	- produk pertanian dan kehutanan					
	3202.02.02	- produk kimia dan olahan					
	3202.02.02	c. jasa					
	3202.02.03	- jasa distribusi					
	3202.02.03	- jasa bisnis					
	3202.03	d. kerjasama					
	3202.03	- kerja sama baik lembaga pemerintah dan non pemerintah					
	3202.03	3 Metrologi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3202.03.00	a. Sarana dan Kerjasama					
	3202.03.01	- Sarana metrologi legal					
	3202.03.01	- Kerja sama metrologi legal					
	3202.03.02	b. Kelembagaan dan Penilaian					
	3202.03.02	- kelembagaan metrologi legal					
	3202.03.02	- penilaian kelembagaan metrologi legal					
	3202.03.03	c. UTTP dan Standar Ukuran					
	3202.03.03	- Besar massa, listrik, tekanan dan suhu					
	3202.03.03	- Besar arus, panjang dan volume					
	3202.03.04	d. Pengawasan					
	3202.03.04	- Pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya					
	3202.03.04	- Pengawasan barang dalam keadaan terbungkus dan satuan internasional					
	3202.03.05	e. Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)					
	3202.03.05	- Bimbingan Mutu					
	3202.03.05	- Pelayanan Teknis					
	3202.03.06	f. Balai Pengujian UTTP					
	3202.03.06	- Bimbingan Mutu					
	3202.03.06	- Pelayanan Teknis					
	3203	g. Balai SML					
	3203	D PERDAGANGAN LUAR NEGERI					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3203.00	1 Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3203.00.00	a. Ekspor produk tanaman pangan, perikanan, dan peternakan					
	3203.00.01	- Tanaman pangan - Perikanan dan peternakan b. Perkebunan					
	3203.00.02	- Tanaman tahunan - Tanaman semusim c. Hortikultura, rempah-rempah dan tanaman obat Hortikultura					
	3203.00.03	Rempah-rempah dan tanaman obat Kehutanan					
	3203.01	d. Hasil kayu dan produk kayu - Hasil hutan bukan kayu 2 Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3203.01.00	a. Produk TPT, aneka dan jasa - Produk tekstil dan produk teksti (TPT) - Produk aneka dan jasa					
	3203.01.01	b. Produk Logam, mesin, alat transportasi dan elektronika - Logam dan mesin					
	3203.01.02	c. Alat transportasi dan elektronika - Produk industri agro dan kimia - Produk industri agro					
	3203.01.03	d. Produk kimia - Produk migas dan pertambangan - Migas					
	3203.02	- Produk pertambangan 3 Impor	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3203.02.00	a. Impor Barang Modal - Mesin dan peralatan mesin - Alat angkut					
	3203.02.01	b. Barang pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan - Barang pertanian dan kehutanan - <u>Barang kelautan dan perikanan</u>					
	3203.02.02	c. Barang aneka industri dan bahan baku industri - Barang aneka industri - Bahan baku industri					
	3203.02.03	d. Barang konsumsi - Barang konsumsi tahan lama - Barang konsumsi tidak tahan lama					
	3203.02.04	e. Barang kimia, tambang dan limbah - Barang kimia dan bahan berbahaya - Barang tambang dan limbah					
	3203.03	4 Fasilitasi Ekspor dan Impor	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3203.03.00	a. Prosedur dan Dokumen - Prosedur ekspor dan impor - Dokumen ekspor dan impor					
	3203.03.01	b. Pelayanan Perdagangan - Analisa pelayanan perdagangan - Fasilitasi pelayanan perdagangan					
	3203.04	5 Pengamanan Perdagangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3203.04.00	a. Monitoring Hambatan Perdagangan - Monitoring					



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3203.04.01	- Evaluasi b. Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan					
	3203.04.02	- Hambatan teknis perdagangan c. Penanganan Tuduhan:					
		- Dumping - Subsidi - Safeguard					
	3204	E Kerjasama Perdagangan Internasional					
	3204.00	1 Multilateral	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3204.00.00	a. Akses Pasar Barang Pertanian					
	3204.00.01	c. Akses Pasar Barang Non Pertanian					
	3204.00.02	d. Fasilitas dan Aturan Perdagangan					
	3204.00.03	e. Haki, Investasi, Lingkungan dan Isu Baru					
	3204.00.04	f. Ketentuan Perdagangan Dan Notifikasi					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3204.01	2 Asean	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3204.01.00 3204.02	a. Kerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Asean 3 Apec dan dan Organisasi Internasional Lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3204.02.00 3204.02.01 3204.02.02 3204.02.03 3204.03	a. Akses perdagangan dan investasi APEC b. Fasilitas perdagangan dan investasi APEC c. Badan-badan PBB dan Non PBB d. Organisasi komoditi internasional 4 Bilateral	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3204.03.00 3204.04	a. Keria sama bilateral dengan berbagai negara-negara 5 Perundingan Perdagangan Jasa	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3204.04.00 3204.04.01 3204.04.02 3204.04.03 3204.04.04 3205 3205.00	a. Jasa bisnis, distribusi, keuangan b. Jasa konstruksi, pariwisata, rekreasi budaya dan olah raga, transportasi c. Jasa pendidikan, kesehatan d. Jasa komunikasi, lingkungan dan jasa lainnya e. Rules, peraturan domestik dan penusunan analisis informasi F PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL 1 Pasar dan Informasi Ekspor	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3205.00.00	a. Pelayanan informasi ekspor - Pelayanan pelaku usaha - Publikasi informasi ekspor					
	3205.01	2 Produk ekspor dan ekonomi kreatif	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3205.01.00	a. Hasil industri manufaktur - Mesin, logam, elektronika dan telematika - Pangan, tekstil dan produk tekstil, alat kesehatan dan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3205.01.01	b. aneka Produk agro - Kehutanan dan perkebunan - Pertanian dan perikanan					
	3205.01.02	c. Jasa - Jasa bisnis dan profesi - jasa konstruksi dan distribusi					
	3205.01.03	d. Ekonomi kreatif - Media dan Iptek - Seni budaya dan desain					
	3205.02	3 Kerja Sama Pengembangan Ekspor	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3205.02.00	a. Luar Negeri - Pemerintah - Non Pemerintah					
	3205.02.01	b. Dalam Negeri - Pemerintah - Non Pemerintah					
	3205.03	4 Promosi dan Citra	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3205.03.00	a. promosi					
	3205.03.01	b. Perencanaan dan pemantauan citra - perencanaan - pemantauan dan evaluasi					
	3205.03.02	c. Penerapan citra - penerapan citra dalam dan luar negeri					
	3206	G PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI					
	3206.00	1 Perniagaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3206.00.00	a. Bina Usaha - a. kelembagaan dan pelaku penunjang - b. pelaku pasar					
	3206.00.01	b. Pengawasan Transaksi - Kelembagaan dan pelaku penunjang - Pelaku pasar					
	3206.00.02	c. Pengawasan keuangan dan audit - <u>Pemantauan dan evaluasi keuangan</u> - Audit kepatuhan dan keuangan					
	3206.01	2 Analisis Pasar	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3206.01.00	a. Pengkaiian pasar - Pengkaiian pasar fisik dan penverahan - Posisi dan pelaporan					
	3206.01.01	b. Pengembangan pasar - Kelembagaan dan produk - Tata tertib dan kontrak					
	3206.01.02	c. Sistem informasi - Teknologi informasi - Data					
	3206.02	3 Pasar Fisik dan Jasa	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3206.02.00	a. Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang - Pembinaan penvelenggaraan dan pelaku pasar lelang - Pembinaan pelaku sistem resi gudang					
	3206.02.01	b. Pengawasan pasar lelang - Pengawasan transaksi - Pengawasan penvelenggara dan pelaku pasar lelang					
	3206.02.02	c. Pengawasan sistem resi gudang					

1 NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
XXXIII.	3300	PERENCANAAN					
		- Pengawasan pengelola agunan dan lembaga sertifikasi - Pengawasan lembaga penjamin dan agen penjual					
		A Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional meliputi : rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)/Master Plan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan tahunan nasional.	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BAPPEDA Prov. Sulbar	
		1 Pengkaiian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk peraturan perundang-undangan B Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BAPPEDA Prov. Sulbar	
	3301.00	1 Musrenbang provinsi					
	3301.01	2 Penalaahan Pokok Pikiran DPRD					
	3302	C Perencanaan Pembangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BAPPEDA Prov. Sulbar	
	3302.00	1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)					
	3302.01	2 Rencana Keria Pemerintah Daerah (RKPD)					
	3302.02	3 Penetapan/Kontrak Kinerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	BAPPEDA Prov. Sulbar	
	3302.03	a. Pimpinan Unit Keria b. Pimpinan OPD 4 Laporan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BAPPEDA Prov. Sulbar	
	3302.04	a. Berkala - Laporan Triwulan - Laporan Semesteran - Laporan Tahunan Unit Keria - Laporan Tahunan Lembaga/Instansi - Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah b. Laporan Insidental 5 Evaluasi Program	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BAPPEDA Prov. Sulbar	
	3303	D Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BAPPEDA Prov. Sulbar	
	3304	E Konsultasi perencanaan pembangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BAPPEDA Prov. Sulbar	
	3305	F Pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan perencanaan pembangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BAPPEDA Prov. Sulbar	
	3306	G Aksi Strategis Daerah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BAPPEDA Prov. Sulbar	
		1 Rancangan awal perencanaan aksi strategis daerah 2 Rapat pembahasan rancangan awal dengan OPD					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
XXXIV.	3307	H 3 Sosialisasi dengan OPD 4 Rancangan akhir perencanaan aksi strategis daerah 5 Penetapan perencanaan aksi strategis daerah Perencanaan Pendanaan Pembangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	BAPPEDA Prov. Sulbar	
	3307.00	1 Pendanaan APBN					
	3307.01	2 Pendanaan APBD					
	3400	<b>PERHUBUNGAN</b>					
	3400.00	A KEBIJAKAN	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3401	B Kebijakan mengenai Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, dan Perkereta apian : 1 Pengkaiian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiaian kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK PERHUBUNGAN DARAT 1 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3401.00 3401.00.00	a. Jaringan Transportasi Jalan : (a) Jaringan Prasarana dan Pelayanan : -penentuan lokasi terminal penumpang, tipe B -standar pelayanan minimal pengoperasian terminal -jaringan travek angkutan antar kota dalam propinsi -penetapan kelas pada jaringan jalan provinsi					
	3401.01 3401.01.00	b. Sarana Angkutan Jalan (a) Pengujian Kendaraan Bermotor -pengesahan hasil uii tipe kendaraan bermotor -sertifikasi uii tipe kendaraan bermotor (b) Teknologi Kendaraan Bermotor : -sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor -persvaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor -harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor					
	3401.02 3401.02.00	c. Lalu lintas jalan (a) Manajemem dan Rekayasa Lalu Lintas : -analisa dampak lalu lintas jalan provinsi di luar kawasan perkotaan -manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi baik di jalan tol/non-tol (b) Perlengkapan Jalan : -pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan provinsi					
	3401.03 3401.03.00	d. Angkutan jalan (a) Angkutan Penumpang : -tarif angkutan penumpang kelas ekonomi -izin travek antar kota antar propinsi -penilaian kinerja perusahaan angkutan umum -angkutan perintis -penghargaan perusahaan angkutan umum (b) Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil : -pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3402	2 Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3402.00 3402.00.00	a. Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (a) Analisa dan Evaluasi Jaringan : -pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan -analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan					
	3402.00.01	(b) Pengembangan Jaringan : -pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan) -pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan					
	3402.01 3402.01.00 3402.01.01	b. Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (a) Rancang Bangun Sarana : (b) Bimbingan Perawatan Sarana : -perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan					
	3402.02 3402.02.00	c. Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (a) Rancang Bangun Pelabuhan : -perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan -pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan					
	3402.02.01	(b) Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan : -penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan -kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan					
	3402.03 3402.03.00	d. Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan (a) Manajemen Lalu Lintas : -manajemen lalu lintas -tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan					
	3402.04 3402.04.00	-Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau -sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau e. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (a) Bimbingan Usaha Angkutan : -penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan					
	3402.04.01	(b) Tarif dan Keperintisan : -perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan -kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan					
	3403 3403.00	3 Bina Sistem Transportasi Perkotaan a. Jaringan Transportasi Perkotaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3403.00.00	(a) Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah I : -transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan -transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi -Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan					
	3403.01	b. Lalu Lintas Perkotaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3403.01.00	(a) Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I : - manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan - manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3403.02	- penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah  c. Angkutan Perkotaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3403.02.00	(a) Angkutan Perkotaan Wilayah I : -penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek -jaringan trayek perkotaan -penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi					
	3403.03	d. Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3403.03.00	(a) Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I : -penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang -pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi -penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi					
	3403.04	e. Dampak Transportasi Perkotaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3403.04.00	(a) Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah I : -penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan -penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan -masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan -pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi dalam kawasan kota -rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi dalam kawasan perkotaan -Masterplan transportasi perkotaan					
	3404 3404.00	4 Keselamatan Transportasi Darat a. Manajemen Keselamatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3404.00.00	(a) Monitoring dan Evaluasi : -monitoring dan evaluasi data kecelakaan					
	3404.00.01	(b) Pengembangan Keselamatan : -program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan					
	3404.01	b. Promosi dan Kemitraan Keselamatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3404.01.00 3404.01.01 3404.02	(a) Promosi (b) Kemitraan c. Bina Keselamatan Angkutan Umum	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3404.02.00 3404.02.01	(a) Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum (b) Keselamatan Awak Angkutan Umum : -keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3404.03	d. Audit dan Inspeksi Keselamatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3404.03.00	(a) Audit Keselamatan : -Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia -identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan -audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan					
	3403.03.01	(b) Inspeksi Keselamatan					
	3405	C PERHUBUNGAN LAUT 1 Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3405.00	a. Angkutan Laut Dalam Negeri					
	3405.00.00	(a) Penyusunan Jaringan dan Penempatan Kapal Liner : -jaringan trayek berjadwal tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri					
	3405.00.01	(b) Tramper dan Pelavaran Rakvat : -trayek tidak berjadwal tetap dan tidak teratur (tramper) angkutan laut dalam negeri -usaha pelavaran rakvat					
	3405.02	b. Angkutan Laut Luar Negeri 2 Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan Laut	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3405.02.00	a. Pertambangan, Pariwisata dan Tenaga Kerja Bongkar Muat					
	3405.02.01	b. Aneka Industri dan Penunjang Angkutan Laut					
	3405.03	3 Pengembangan Usaha Angkutan Laut	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3405.03.00	a. Analisa Kebutuhan dan Bimbingan Armada					
	3405.03.01	b. Bimbingan Usaha dan Tarif Angkutan Laut					
	3405.04	4 Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan Laut	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3405.04.00	a. Pengolahan Data Informasi Angkutan Laut					
	3405.04.01	b. Evaluasi Angkutan Laut					
	3406	5 Pelabuhan dan Pengerukan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3406.00	a. Pengembangan Pelabuhan					
	3406.00.00	(a) Tatahan dan Evaluasi Kepelabuhanan : -pengumpulan dan evaluasi data dan informasi kepelabuhan					
	3406.00.01	(b) Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Pengembangan Pelabuhan : -rencana induk dan pengembangan pelabuhan					
	3406.01	b. Perancangan Fasilitas Pelabuhan					
	3406.01.00	(a) Pedoman dan Rancangan Teknis Fasilitas Pelabuhan					
	3406.01.01	(b) Penyusunan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan					
	3406.02	c. Pengerukan dan Reklamasi					
	3406.02.00	(a) Program dan Perancangan Teknis Pengerukan dan Reklamasi : -perancangan dan survei teknis pelaksanaan pengerukan dan reklamasi					
	3406.02.01	(b) Bimbingan Peralatan Pengerukan dan Reklamasi : -perizinan -penggunaan kapal dan alat bantu keruk -pekerjaan pengerukan dan reklamasi					



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3406.03 3406.03.00 3406.03.01 3406.04 3406.04.00  3406.04.01   3407   3407.00 3407.00.00	d. Pemantauan dan Penundaan Kapal (a) Perairan dan Pelavanan Pandu (b) Tenaga Pandu dan Sarana Bantu Pemantuan e. Bimbingan Pelayanan Jasa dan Operasional Pelabuhan (a) Bimbingan Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan : -kinerja pelayanan pelabuhan dan penetapan pelabuhan terbuka untuk perdagangan luar negeri (b) Bimbingan Tata Guna Tanah dan Perairan : -penetapan batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan -persetujuan pengoperasian pelabuhan  3 Perkapalan dan Kepelautan  a. Kelaikan Kapal (a) Konstruksi dan Stabilitas Kapal -konstruksi, instalasi permesinan, listrik dan lambung kapal <u>stabilitas kapal dan peti kemas</u>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3407.00.01 3407.01 3407.01.00  3407.02 3407.02.00  3407.02.01  3407.03 3407.03.00 3407.03.01 3407.04 3407.04.00 3407.04.01  3408  3408.00 3408.00.00 3408.00.01 3408.01 3408.01.00 3408.01.01 3408.02 3408.02.00 3408.02.01 3408.03 3408.03.00 3408.03.01 3408.04 3408.04.00 3408.04.01  3409	(b) Rancang bangun dan pemasukan kapal b. Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (a) Pengukuran Kapal -pengukuran kapal cara dalam negeri dan cara internasional  c. Nautis, Teknis dan Radio Kapal (a) Penilikan Keselamatan Kapal -teknis permesinan kapal -elektronika dan radio kapal -perlengkapan dan peralatan kapal (b) Sertifikasi Keselamatan Kapal -sertifikasi keselamatan kapal d. Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal (a) Pencegahan dan Ganti Rugi Pencemaran (b) Manajemen Keselamatan Kapal e. Kepelautan (a) Pengawakan dan Perlindungan Awak Kapal (b) Standarisasi dan Sertifikasi Pelaut  4 Kenavigasian  a. Perambuan (a) Operasi dan Survey (b) Peralatan dan Pemeliharaan Perambuan b. Telekomunikasi Pelayaran (a) Operasi dan Survey (b) Peralatan dan Pemeliharaan Telekomunikasi Pelayaran c. Kapal Negara Kenavigasian (a) Operasi dan Pengawakan (b) Pembangunan dan Pemeliharaan d. Pangkalan Kenavigasian (a) Bangunan Pangkalan (b) Perbengkelan e. Sarana dan Prasarana (a) Program (b) Evaluasi dan Pelaporan  5 Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3409.00 3409.00.00 3409.00.01 3409.01 3409.01.00	a. Patroli dan Pengamanan (a) Patroli (b) Pengamanan b. Pengawasan Keselamatan dan Penvidik Pegawai Negeri Sipil (a) Advokasi dan Diseminasi Pengawasan Keselamatan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3409.01.01 3409.02 3409.02.00 3409.02.01 3409.03 3409.03.00 3409.03.01 3409.04 3409.04.00 3409.04.01	(b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil c. Tertib Pelayaran (a) Kebandaraan (b) Kecelakaan Kapal d. Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air (a) Penganggulangan Musibah (b) Pekerjaan Bawah Air e. Sarana dan Prasarana (a) Sarana dan Prasarana Operasional (b) Awak Kapal					
	3410	6 Angkutan Udara	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3410.00 3410.00.00	a. Sistem Informasi dan Pelayanan Angkutan Udara (a) Sistem Informasi Angkutan Udara					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3410.00.01 3410.01 3410.01.00 3410.01.01 3410.02 3410.02.00 3410.02.01	(b) Sistem Pelayanan Angkutan Udara b. Kerjasama Angkutan Udara (a) Kerjasama Bilateral dan Perusahaan Angkutan Udara (b) Kerjasama Multilateral dan Lembaga Internasional c. Pengembangan dan Pembinaan Usaha Angkutan Udara (a) Bimbingan Usaha Angkutan Udara (b) Tarif Jasa Pelayanan Angkutan Udara					
	3411	7 Bandar Udara	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3411.00 3411.00.00 3411.00.01 3411.01 3411.01.00 3411.01.01 3411.02 3411.02.00	a. Tatanan Kebendaudaraan dan Lingkungan (a) Tata Bandar Udara (b) Tata Lingkungan dan Kawasan Bandara b. Prasarana Bandar Udara (a) Program dan Standarisasi Prasarana Bandar Udara (b) Verifikasi Prasarana Bandar Udara c. Peralatan dan Utilitas Bandar Udara (a) Program dan Standarisasi Peralatan dan Utilitas Bandar Udara					
	3411.02.01 3411.03 3411.03.00 3411.03.01 3411.04 3411.04.00 3411.04.01	(b) Verifikasi Peralatan dan Utilitas Bandara d. Personel dan Operasi Bandar Udara (a) Sertifikasi Personel Bandar Udara (b) Pengawasan Personil dan Operasi Bandar Udara e. Penvelenggaraan Bandar Udara (a) Kerjasama Penvelenggaraan Bandar Udara (b) Verifikasi Penvelenggaraan Bandar Udara					
	3412	8 Keamanan penerbangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3412.00	a. Standarisasi, Kerjasama dan Program Keamanan dan Penerbangan					
	3412.00.00 3412.00.01 3412.01 3412.01.00 3412.01.01 3412.02	(a) Standarisasi Keamanan Penerbangan (b) Kerjasama dan Program Keamanan Penerbangan b. Pelayanan Darurat (a) PKP - PK dan Salvage (b) Fasilitas Pelayanan Darurat c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Personel Keamanan Penerbangan					
	3412.02.00	(a) Bimbingan Teknik PPNS					
	3412.02.01 3412.03 3412.03.00 3412.03.01	(b) Personel Keamanan Penerbangan d. Fasilitas Keamanan Penerbangan dan Pengangkutan Barang Berbahaya (a) Fasilitas Keamanan Penerbangan (b) Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan dan Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya					
	3414	9 Navigasi Penerbangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3414.00 3414.00.00 3414.00.01 3414.01 3414.01.00 3414.01.01 3414.02 3414.02.00 3414.02.01 3414.03 3414.03.00 3414.03.01 3414.04 3414.04.00	a. Manajemen Lalu Lintas Penerbangan (a) Manajemen Ruang Udara (b) Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan b. Manajemen Informasi Aeronautika (a) Kartografi Penerbangan (b) Publikasi Informasi Aeronautika c. Komunikasi Penerbangan (a) Operasi Komunikasi Penerbangan (b) Jaringan dan Peralatan Komunikasi Penerbangan d. Fasilitas Bantu Navigasi dan Pengamatan Penerbangan (a) Fasilitas Bantu Navigasi Penerbangan (b) Fasilitas Pengamatan Penerbangan e. Standarisasi dan Sertifikasi Navigasi Penerbangan (a) Standarisasi Navigasi Penerbangan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3414.04.01	(b) Sertifikasi Navigasi Penerbangan					
	3415	10 Kelalaian Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3415.00	a. Standarisasi					
	3415.00.00	(a) Standarisasi Teknik					
	3415.00.01	(b) Standarisasi Operasi Penerbangan					
	3415.01	b. Rekayasa					
	3415.01.00	(a) Pengawasan Proses Rekayasa					
	3415.01.01	(b) Uji Terbang dan Kemampuan Pesawat Udara					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3415.02 3415.02.00 3415.02.01 3415.03 3415.03.00 3415.03.01 3415.04 3415.04.00 3415.04.01	c. Produk Aeronautika (a) Pengawasan Mutu dan Proses Produksi (b) Pengesahan Produksi d. Operasi Pesawat Udara (a) Pengawasan Operasi Pesawat Udara (b) Personel Operasi Pesawat Udara e. Perawatan (a) Perawatan Pesawat Udara (b) Personel Teknik Perawatan					
	3416 3416.00	D PERKERETAAPIAN 1 Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api a. Jaringan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3416.00.00	(a) Penataan Jaringan : -penataan jaringan jalur kereta api untuk jangka pendek, menengah, panjang pemantauan dan evaluasi kelas jalur kereta api -kapasitas lintas -pemanfaatan dan kondisi jaringan jalur kereta api -pemantauan dan evaluasi kelas stasiun -pemanfaatan dan kondisi stasiun -pemanfaatan jaringan jalur kereta api yang beroperasi dan tidak beroperasi -pengembangan sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan jalur kereta api					
	3416.00.01	(b) Pengembangan Jaringan : -pengembangan jaringan jalur kereta api untuk jangka pendek, menengah dan panjang rencana pembangunan, rencana kelayakan, rencana teknis perkeretaapian -pemantauan dan evaluasi kinerja jaringan jalur kereta api yang ada dan pengembangan jaringan jalur kereta api baru  -penetapan trase jalur kereta api -pemaduan dan integrasi antarmoda dan intermoda di bidang perkeretaapian					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3416.01	-rekomendasi mengenai dampak lingkungan di bidang perkerataapian b. Lalu Lintas	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3416.01.00	(a) Lalu Lintas Antarkota : -penggunaan sinyal, tanda, dan marka -penetapan, pemantauan dan evaluasi grafik perjalanan kereta api (GAPEKA) -penetapan, pemantauan kinerja jaringan dan lintas pelayanan kereta api -teknis pemaduan lintas pelayanan kereta api dengan moda lainnva -pemantauan dan evaluasi kelambatan dan kecepatan perjalanan kereta api -pemantauan dan evaluasi sistem operasi perjalanan kereta api  -pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi perizinan lintas pelayanan kereta api -pelaksanaan penataan dan pengembangan sistem informasi manaiemen (SIM) lalu lintas -penyelenggaraan, rencana operasi, pemantauan dan evaluasi angkutan lebaran, natal dan tahun baru kereta api antarkota					
	3416.01.01	(b) Lalu Lintas Perkotaan : - penggunaan sinyal, tanda, dan marka - penetapan, pemantauan dan evaluasi grafik perjalanan kereta api (GAPEKA) - penetapan, pemantauan kinerja jaringan dan lintas pelayanan kereta api - teknis pemaduan lintas pelayanan kereta api dengan moda lainnva - pemantauan dan evaluasi kelambatan dan kecepatan perjalanan kereta api - pemantauan dan evaluasi sistem operasi perjalanan kereta api  - pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi perizinan lintas pelayanan kereta api - pelaksanaan penataan dan pengembangan sistem operasi perialanan kereta api - penyelenggaraan, rencana operasi, pemantauan dan evaluasi anekutan lebaran, natal dan tahun baru kereta api antarkota					
	3416.02	c. Angkutan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3416.02.00	(a) Angkutan Antarkota : -penetapan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja dan kebutuhan angkutan -pelaksanaan perhitungan pemantauan dan evaluasi tarif -kewajiban pelayanan publik (PSO) dan subsidi angkutan perintis  -penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum angkutan -penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum stasiun -penetapan penempatan, pemantauan dan evaluasi kereta-kereta ekonomi -penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen angkutan kereta api antarkota					
	3416.02.01	(b) Angkutan Perkotaan : -penetapan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja dan kebutuhan angkutan -pelaksanaan perhitungan pemantauan dan evaluasi tarif -kewajiban pelayanan publik (PSO) dan subsidi angkutan perintis					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3416.03  3416.03.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>-penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum angkutan</li> <li>-penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum stasiun</li> <li>-penetapan penempatan, pemantauan dan evaluasi kereta-kereta ekonomi</li> <li>-penataan dan pengembangan sistem pengangkutan angkutan kereta api antar kota</li> <li>-penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen angkutan kereta api antarkota</li> </ul> <p>d. Investasi</p> <p>(a) Penyelenggaraan Kerjasama :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-pemantauan kerjasama pemerintah dan swasta</li> <li>-penetapan perhitungan pemantauan nilai kerjasama</li> <li><del>-pemanfaatan prasarana dan sarana perkeretaapian</del></li> </ul>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3416.03.01  3417 3417.00  3417.00.00  3417.00.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>-penetapan inventarisasi dan pengawasan aset pemerintah yg dikeriasamakan</li> <li>-perhitungan, pelaksanaan biaya penggunaan dan pengelolaan prasarana perkertaapian</li> <li>-penataan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) investasi dibidang perkertaapian</li> </ul> <p>(b) Pengembangan Usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-penetapan, pemantauan penyelenggara perkeretaapian</li> <li>-penetapan, pemantauan izin usaha dan izin operasi</li> <li>-pelaksanaan, pemantauan promosi investasi perkeretaapian</li> </ul> <p>2 Prasarana Perkeretaapian</p> <p>a. Jalur dan Bangunan Kereta Api</p> <p>(a) Jalan Rel dan Tanah Kereta Api</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-pembangunan, perawatan dan pengusahaan jalan rel dan tanah kereta api</li> <li>-perhitungan biaya perawatan, pengoperasian dan pengusahaan jalan rel dan tanah kereta api</li> <li>-penetapan rancang bangun</li> <li>-penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang jalan rel</li> <li>-pengesahan kualitas material baru jalan rel</li> </ul> <p>(b) Jembatan dan Bangunan Kereta Api</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-pembangunan, perawatan dan pengusahaan jalan rel dan tanah kereta api</li> <li>-perhitungan biaya perawatan, pengoperasian dan pengusahaan jalan rel dan tanah kereta api</li> <li>-penetapan rancang bangun</li> <li><del>-penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang</del></li> </ul>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3417.01	jalan rel -pengesahan kualitas material baru jalan rel b. Fasilitas Operasi Kereta Api	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3417.01.00	(a) Persinvalan : -pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusaha persinvalan -perhitungan dan perawatan, pengoperasian dan pengusaha persinvalan -penetapan rancang bangun -penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang persinvalan -pengesahan kualitas material baru persinvalan					
	3417.01.01	(b) Telekomunikasi dan Pelistrikan : -pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusaha telekomunikasi dan pelistrikan #NAME? -penetapan rancang bangun -penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang telekomunikasi dan pelistrikan -pengesahan kualitas material baru telekomunikasi dan pelistrikan					
	3418 3418.00	3 Sarana Perkeretaapian a. Pengembangan Sarana	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3418.00.00	(a) Rancang Bangun dan Rekayasa : -penyiapan database -sistem informasi bidang rancang bangun dan rekayasa					
	3418.00.01	(b) Pengendalian Mutu : -pengendalian mutu sarana perkeretaapian -persyaratan teknis sarana perkeretaapian database dan sistem informasi bidang pengendalian mutu					
	3418.01	b. Pengawasan Sarana	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3418.01.00	(a) Pengawasan Pengujian, Pemeriksaan dan Perawatan : -pengawasan pengujian, pemeriksaan dan perawatan sarana -pelaksanaan pengawasan pengujian, pemeriksaan dan perawatan sarana -database dan pengembangan sistem informasi (b) Pengawasan Tempat dan Fasilitas Pengujian, Pemeriksaan & Perawatan : - penyusunan standar peralatan dan fasilitas pendukung di balai vasa, depo, dan tempat pengujian - database dan sistem informasi bidang fasilitas sarana perkeretaapian					
	3418.02	c. Pengelolaan Sarana Milik Negara	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3418.02.00	(a) Pengadaan dan Pengoperasian : -pengoperasian sarana milik negara -pengadaan dan rehabilitasi sarana milik negara -database dan pengembangan sistem informasi sarana milik negara					
	3418.02.01	(b) Perawatan : -pemeliharaan sarana milik negara -database dan pengembangan sistim informasi sarana milik negara					
	3419	4 Keselamatan Perkeretaapian					



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3419.00	a. Audit dan Peningkatan Keselamatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3419.00.00	(a) Audit Keselamatan : -audit keselamatan perkeretaapian -identifikasi daerah rawan kecelakaan dan bencana alam					
	3419.00.01	(b) Peningkatan Keselamatan : -pengembangan sistem informasi di bidang peningkatan keselamatan					
	3419.01	b. Analisis dan Penanganan Kecelakaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISHUB Prov. Sulbar	
	3419.01.00	(a) Analisis Kecelakaan : -pelaporan di bidang penyebab kecelakaan -pengembangan sistem informasi kecelakaan perkeretaapian					
XXXV.	3419.01.01	(b) Penanganan Kecelakaan : -penanganan kecelakaan perkeretaapian					
	3419.01.02	(c) Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi SDM - Akreditasi Kelembagaan - Seminar Sumber Daya Manusia					
	3419.01.03	(d) Penegakan Hukum - PPNS - Bimbingan Teknis					
	3500	PERINDUSTRIAN					
	3500.00	A KEBIJAKAN	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3501	B IKLIM USAHA DAN KERJASAMA					
	3501.00	1 INDUSTRI MANUFAKTUR	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3501.00.00	a. Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnva - Industri Material Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnva - Industri Kimia Dasar - Anorganik dasar - Organik dasar - Dasar lainnva - Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik Hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnva - Industri Tekstil dan Aneka					
		- Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnva - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka					

1 NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3501.01	2 INDUSTRI AGRO	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3501.01.00	a. INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN - Kayu dan Rotan - Selulosa dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya					
	3501.01.01	b. INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan					
	3501.01.02	c. INDUSTRI MINUMAN DAN TEMBAKAU - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Tembakau - Hasil Susu dan Minuman Lainnya					
	3501.02	3 INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3501.02.00	a. ALAT TRANSPORTASI DARAT - Kendaraan Roda Empat atau Lebih - Kendaraan Roda Dua dan Kereta Api - Industri Komponen					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3501.02.01	b. INDUSTRI MARITIM, KEDIRGANTARAAN, DAN ALAT PERTAHANAN					
	3501.02.02	- Industri Perkapalan - Industri Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan - Industri Bangunan Lepas Pantai c. ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA - Industri Software dan Konten - Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika - Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen					
	3501.02.03	d. PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN - Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan - Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan - Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat					
	3501.03	4 INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3501.03.00	Industri Kecil dan Menengah Wilayah I, Wilayah II (JAWA BALI), Wilayah III (NUSA TENGGARA, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA) a. Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan					
	3501.03.01	b. Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan - Sandang					
	3501.03.02	c. Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika - Industri Produk Logam dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika dan Elektronik					
	3502 3502.00	C PROMOSI INDUSTRI 1 INDUSTRI MANUFAKTUR	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3502.00.00	a. Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya - Industri Material Dasar Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya - Industri Kimia Dasar - Anorganik Dasar					
		- Organik Dasar - Dasar Lainnya - Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik Hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya - Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka					
	3502.01	2 INDUSTRI AGRO	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3502.01.00	a. INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN - Kayu dan Rotan - Selulosa dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya					
	3502.01.01	b. INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan					
	3502.01.02	c. INDUSTRI MINUMAN DAN TEMBAKAU					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3502.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan</li> <li>- Hasil Tembakau</li> <li>- Hasil Susu dan Minuman Lainnya</li> </ul> 3 INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3502.02.00	a. ALAT TRANSPORTASI DARAT <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendaraan Roda Empat atau Lebih</li> <li>- Kendaraan Roda Dua dan Kereta Api</li> <li>- Industri Komponen</li> </ul>					
	3502.02.01	b. INDUSTRI MARITIM, KEDIRGANTARAAN, DAN ALAT PERTAHANAN					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3502.02.02	- Industri Perkapalan - Industri Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan - Industri Bangunan Lepas Pantai c. ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA - Industri Software dan Konten - Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika - Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen					
	3502.02.03	d. PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN - Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan - Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan - Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat					
	3502.03	4 INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3502.03.00	Industri Kecil dan Menengah Wilayah I, Wilayah II (JAWA BALI), Wilayah III (NUSA TENGGARA, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA) a. Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan					
	3502.03.01	b. Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan - Sandang					
	3502.03.02	c. Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika - Industri Produk Logam dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika dan Elektronik					
	3503 3503.00	D STANDARISASI DAN TEKNOLOGI 1 INDUSTRI MANUFAKTUR	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3503.00.00	a. Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnva - Industri Material Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnva - Industri Kimia Dasar - Anorganik Dasar					
		- Organik Dasar - Dasar Lainnva - Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik Hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnva - Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnva - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka					
	3503.01	2 INDUSTRI AGRO	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3503.01.00	a. INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN - Kayu dan Rotan - Selulosa dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnva					
	3503.01.01	b. INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan					
	3503.01.02	c. INDUSTRI MINUMAN DAN TEMBAKAU - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3503.02	3 - Hasil Tembakau - Hasil Susu dan Minuman Lainnya INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3503.02.00	a. ALAT TRANSPORTASI DARAT - Kendaraan Roda Empat atau Lebih - Kendaraan Roda Dua dan Kereta Api - Industri Komponen					
	3503.02.01	b. INDUSTRI MARITIM, KEDIRGANTARAAN, DAN ALAT PERTAHANAN  - Industri Perkapalan - Industri Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan - Industri Bangunan Lepas Pantai					
	3503.02.02	c. ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA - Industri Software dan konten - Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Perkantoran dan Elektronika - Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen					
	3503.02.03	d. PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN - Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan - Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan - Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat					
	3503.03	4 INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH  Industri Kecil dan Menengah Wilayah I, Wilayah II (JAWA BALI), Wilayah III (NUSA TENGGARA, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA)	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3503.03.00	a. Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan					
	3503.03.01	b. Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan - Sandang					
	3503.03.02	c. Industri Produk Logam, Alat angkut dan Kreatif Telematika - Industri Produk Logam dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika dan Elektronik					
	3504 3504.00	E HAK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL 1 INDUSTRI MANUFAKTUR	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3504.00.00	a. Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya - Industri Material Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya					
	3504.00.01	- Industri Kimia Dasar - Anorganik Dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya					
	3504.00.02	- Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya					
	3504.00.03	- Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3504.01	2 INDUSTRI AGRO	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3504.01.00	a. INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN - Kayu dan Rotan - Selulosa dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya					
	3504.01.01	b. INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan					
	3504.01.02	c. INDUSTRI MINUMAN DAN TEMBAKAU - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Tembakau - Hasil Susu dan Minuman Lainnya					
	3504.02	3 INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3504.02.00	a. ALAT TRANSPORTASI DARAT - Kendaraan Roda Empat atau Lebih - Kendaraan Roda Dua dan Kereta Api - Industri Komponen					
	3504.02.01	b. INDUSTRI MARITIM, KEDIRGANTARAAN, DAN ALAT PERTAHANAN  - Industri Perkapalan - Industri Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan - Industri Bangunan Lepas Pantai					
	3504.02.02	c. ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA - Industri Software dan Konten - Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika - Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen					
	3504.02.03	d. PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN - Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan - Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan - Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat					
	3504.03	4 INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH  Industri Kecil dan Menengah Wilayah I, Wilayah II (JAWA BALI), Wilayah III (NUSA TENGGARA, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA)	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3504.03.00	a. Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan					
	3504.03.01	b. Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan - Sandang					
	3504.03.02	c. Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika - Industri Produk Logam dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika dan Elektronik					
	3505	F INDUSTRI HIJAU					
	3505.00	1 INDUSTRI MANUFAKTUR	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3505.00.00	a. Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya - Industri Material Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi - Logam Lainnya					
	3505.00.01	- Industri Kimia Dasar					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3505.00.02	- Anorganik Dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya					
	3505.00.03	- Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik Hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya - Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka					
	3505.01	2 INDUSTRI AGRO	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3505.01.00	a. INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN - Kayu dan Rotan - Selulosa dan Karet - Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya					
	3505.01.01	b. INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN - Hasil Tanaman Pangan - Hasil Perkebunan - Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan					
	3505.01.02	c. INDUSTRI MINUMAN DAN TEMBAKAU - Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan - Hasil Tembakau - Hasil Susu dan Minuman Lainnya					
	3505.02	3 INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3505.02.00	a. ALAT TRANSPORTASI DARAT - Kendaraan Roda Empat atau Lebih - Kendaraan Roda Dua dan Kereta Api - Industri Komponen					
	3505.02.01	b. INDUSTRI MARITIM, KEDIRGANTARAAN, DAN ALAT PERTAHANAN - Industri Perkapalan - Industri Kedingantaraan dan Alat Pertahanan - Industri Bangunan Lepas Pantai					
	3505.02.02	c. ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA - Industri Software dan Konten - Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika - Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen					
	3505.02.03	d. PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN - Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan - Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan - Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat					
	3505.03	4 INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3505.03.00	a. Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan - Pangan - Industri Kimia dan Bahan Bangunan					
	3505.03.01	b. Industri Kerajinan dan Sandang - Kerajinan - Sandang					
	3505.03.02	c. Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika - Industri Produk Logam dan Alat Angkut - Industri Kreatif Telematika dan Elektronik					



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3506	G ANALISIS INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3506.00 3506.01 3506.02 3506.03 3507	a. Industri Material Logam b. Industri Kimia Dasar c. Industri Kimia Hilir d. Industri Tekstil dan Aneka H Industri Unggulan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3507.00 3507.01 3508	a. Analisis Industri Unggulan Provinsi b. Monitoring dan evaluasi Kompetensi Inti Industri I Pengembangan Industri	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3508.00 3508.01	a. Pengembangan Infrastruktur Pendukung b. Fasilitas Pengembangan Kawasan Industri					
	3509 3509.00	J KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL 1 KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3509.00.00	a. Akses Industri Industri Wilayah Amerika <u>Industri Wilayah Eropa dan Timur Tengah</u>					
	3509.00.01	b. Kerjasama Teknik dan Promosi Industri Kerjasama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Amerika Kerjasama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Eropa dan Timur Tengah					
	3509.00.02	c. Multilateral WTO dan Organisasi Komoditas Fora Multilateral Lainnya					
	3509.01	2 KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3509.01.00	a. Akses Industri Industri Wilayah Asia Timur, Pasifik dan Australia Industri Wilayah Asia Barat, Asia Selatan, dan Afrika					
	3509.01.01	b. Kerja sama Teknik dan Promosi Industri Kerja sama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Asia Timur, Pasifik dan Australia Kerja sama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Asia Barat, Asia Selatan, dan Afrika					
	3509.01.02	c. Regional APEC dan Regional Lainnya ASEAN dan Mitra Dialog					
	3509.02	3 KETAHANAN INDUSTRI	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3509.02.00	a. Penanganan Hambatan Industri Hambatan Wilayah I (Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan For a Multilateral) Hambatan Wilayah II (Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan for a Multilateral)					
	3509.02.01	b. Pengamanan Industri I Pengamanan Basis Industri Manufaktur Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi					
	3509.02.02	c. Pengamanan Industri II Pengamanan Industri Agro Pengamanan Industri Kecil dan Menengah					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3510	K STANDARISASI DAN PENGKAJIAN					
	3510.00	Standarisasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3510.00.00	1					
	3510.00.01	a. Standar Standar Industri Manufaktur Standar Industri Agro dan Teknologi Tinggi					
	3510.00.02	b. Penyiapan Penerapan Penyiapan Penerapan Standar Keria sama Standarisasi					
	3510.01	c. Infrastruktur Standar Pengembangan Infrastruktur Standar Pengawasan Lembaga Penilaian Kesuaian					
	3510.01.00	2 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3510.01.01	a. Kebijakan Industri Kebijakan Sektoral Kebijakan Kewilayahan					
	3510.01.02	b. Perpaiaakan dan Tarif Perpaiaakan dan Tarif Tarif dan Non Tarif					
	3501.01.02	c. Pengembangan Model Industrial Pemrograman Model Aplikasi Model					
	3510.02	3 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3510.02.00	a. Industri Hijau Pengembangan Industri Hijau Keria Sama Industri Hijau					
	3510.02.01	b. Lingkungan Hidup Lingkungan Global Pengendalian Lingkungan Hidup					
	3510.02.02	c. Energi Konservasi Energi Diversifikasi Energi					
	3510.03	4 Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPPK & UKM Prov. Sulbar	
	3510.03.00	a. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri Pengkajian Kebijakan Teknologi Industri Penerapan Kebijakan Teknologi Industri					
	3510.03.01	b. Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri Pengkajian Inovasi Teknologi Industri Penerapan Inovasi Teknologi Industri					
	3510.03.02	c. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual					
XXXVI.	3600	PERPUSTAKAAN					
	3601	A. Pembinaan Perpustakaan					
	3601.00	1 Pembinaan Pustakawan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	3601.00.00	a. Bimbingan Pustakawan					
	3601.00.01	b. Pengembangan Profesi					
	3601.00.02	c. Bimbingan Tim Penilai					
	3601.00.03	d. Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan					
	3601.00.04	e. Organisasi Profesi Pustakawan					
	3601.00.05	f. Sertifikasi Tenaga Perpustakaan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3601.00.06 3601.01	g. Pangkalan data Tenaga Perpustakaan 2 Bimbingan, Konsultasi, Supervisi dan Implementasi Sistem Perpustakaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	3601.01.00 3601.01.01 3601.01.02 3601.01.03 3601.01.04 3601.01.05 3601.01.06 3601.01.07 3601.01.08 3601.01.09 3601.01.10	a. Data Lembaga Perpustakaan b. Supervisi Perpustakaan c. Bimbingan dan Konsultasi Perpustakaan d. Bimbingan Teknis Perpustakaan e. Apresiasi Perpustakaan f. Konsultasi Penyusunan Sistem Perpustakaan g. Konsultasi Penyusunan Peraturan Perpustakaan h. Implementasi Pengelolaan Perpustakaan Elektronik i. Pemberian Penghargaan Perpustakaan j. Evaluasi Pembinaan Perpustakaan k. Akreditasi Perpustakaan					
	3601.02	3 Sosialisasi Perpustakaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	3601.02.00 3601.02.01 3601.02.02 3601.03	a. Seminar/Lokakarya/Workshop/Ekspose b. Rakorda/Rakor/Rakernis/Temu Teknis c. Sosialisasi Peraturan Perundangan Perpustakaan 4 Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	3601.03.00 3601.03.01 3602 3602.00	a. Lomba Peningkatan Minat dan Budaya Baca b. Pemilihan Duta Baca B. Pengembangan Bahan Pustaka 1 Deposit Bahan Pustaka	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	3602.00.01 3602.00.02 3602.00.03 3602.00.04 3602.00.05 3602.01	a. Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman b. Terbitan Internasional dan Regional c. Bibliografi dan Katalog d. ISBN e. ISMN 2 Pengembangan Koleksi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	3602.01.00 3602.01.01 3602.01.02 3602.01.03 3602.01.04 3602.01.05 3602.01.06 3602.02	a. Pembelian b. Akuisisi c. SKCKR d. Tukar Menukar e. Hadiah f. Pengolahan Bahan Pustaka g. Pangkalan Data Katalog Koleksi 3 Preservasi Bahan Pustaka	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	3602.02.00 3602.02.01 3602.02.02 3602.02.03	a. Konservasi b. Reproduksi c. Transformasi Digital d. Kurasi Digital					
	3603	C. Pengkajian Dan Pengembangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	3603.00 3603.00.00 3603.00.01 3603.00.02 3603.00.03	1 Pengkajian a. Sistem Perpustakaan b. Kelembagaan c. Sumber Daya Manusia d. Sarana Prasarana					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3603.01 3603.01.00 3603.01.01 3603.01.02 3603.01.03 3603.02 3603.02.00 3603.02.01 3604	2 Pengembangan a. Sistem Perpustakaan b. Kelembagaan c. Sumber Daya Manusia d. Sarana Prasarana 3 Diseminasi a. Penerbitan jurnal b. Penerbitan Buku D. Informasi Perpustakaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	3604.00 3604.00.00 3604.00.01  3604.01 3604.02 3604.03 3604.04 3605	1 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Perpustakaan Elektronik (E-Library) a. Pengkajian Sistem b. Pengembangan Sistem Uji Coba Implementasi Pemeliharaan Sistem 2 Sosialisasi Informasi Perpustakaan 3 Pengumpulan Data SIP 4 Pengolahan Data SIP 5 Penyajian SIP E. Jasa Perpustakaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DPKD Prov. Sulbar	
	3605.00 3605.00.00 3605.00.01 3605.00.02 3605.00.03 3605.00.04 3605.00.05 3605.00.06	1 Pelayanan Perpustakaan a. Pameran Perpustakaan b. Komunikasi Layanan c. Layanan Perpustakaan d. Keanggotaan e. Sirkulasi f. Referensi g. Alih aksara, Alih Bahasa					
<b>XXXVII.</b>	3605.00.07 3605.00.08 3605.00.09 3605.00.10 <b>3700</b> 3700.00	<b>PERSANDIAN</b> A. KEBIJAKAN  Kebijakan: pembinaan dan pengendalian persandian, pengamanan persandian 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penetapan Kebijakan 3 Perumusan kebijakan 4 Masukan dan dukungan kebijakan 5 Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISKOMINFO Prov. Sulbar	
	3701	B Pembinaan dan pengendalian persandian	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISKOMINFO Prov. Sulbar	
	3701.00	1 Pembinaan dan pengendalian sumber daya manusia, materiil dan jaring komunikasi sandi dan akreditasi dan sertifikasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISKOMINFO Prov. Sulbar	
	3701.00.00	a. SDM - Data Personel Sandi - Pembinaan Personel Sandi - Pengawasan dan Pengendalian					
	3701.00.01	b. Materiil dan Jaring Komunikasi Sandi - Data Materiil dan JKS - Analisa Kebutuhan Materiil dan Jaringan Komunikasi Sandi					
	3701.00.02	c. Akreditasi dan Sertifikasi					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akreditasi Diklat</li> <li>- Sertifikasi Alat</li> </ul>					
	3702	C Pengamanan persandian					
	3702.00	1 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	DISKOMINFO Prov. Sulbar	
	3702.01	a. Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi) b. Pelaporan 2 Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	DISKOMINFO Prov. Sulbar	
	3702.02	a. Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi) b. Pelaporan 3 Materiil sandi: sistem dan peralatan	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	DISKOMINFO Prov. Sulbar	
	3703	a. Pelaksanaan (Perencanaan dan Administrasi) b. Pelaporan D Pengkajian persandian : Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	DISKOMINFO Prov. Sulbar	
XXXVIII.	3800	PERTANIAN					
	3800.00	A KEBIJAKAN	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
		Kebijakan di bidang Hortikultura, Sarana Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan, Pemasaran Hasil Pertanian					
	3801	1 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan 2 Penyiapan Bahan 3 Perumusan Kebijakan 4 Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan 5 Penetapan Berbentuk NSPK A. Peternakan dan Kesehatan Hewan					
	3801.00	1 Perbibitan Ternak		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3801.00.00	a. Produksi Bibit Ternak Ruminansia					
	3801.00.01	b. Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia					
	3801.00.02	c. Penilaian dan Pelepasan Bibit Ternak					
	3801.00.03	d. Mutu Bibit Ternak					
	3801.00.04	e. Pengembangan Bibit Ternak					
	3801.00.05	f. Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan / Pengeluaran					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3801.01	2 Pakan Ternak		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3801.01.00 3801.01.01 3801.01.02 3801.01.03 3801.01.04 3801.02	a. Bahan Pakan b. Pakan Hijauan c. Pakan Olahan d. Mutu Pakan e. Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan / Pengeluaran 3 Budidaya Ternak		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3801.02.00 3801.02.01 3801.02.02 3801.02.03 3801.03	a. Ternak Potong b. Ternak Perah c. Ternak Unggas dan Aneka Ternak d. Usaha dan Kelembagaan 4 Kesehatan Hewan		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3801.03.00 3801.03.01 3801.03.02 3801.03.03 3801.03.04	a. Pengamatan Penyakit Hewan b. Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan c. Perlindungan hewan d. Kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan e. <del>Pengawasan obat hewan</del>					
	3801.04	5 Kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3801.04.00 3801.04.01 3801.04.02 3801.04.03 3801.04.04 3802 3802.00	a. Pascapanen b. Higien Sanitasi c. Pengawasan sanitasi dan keamanan produk hewan d. Zoonis dan kesejahteraan hewan e. Pengujian dan sertifikasi pengujian hewan B. Perkebunan 1 Tanaman semusim		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3802.00.00 3802.00.01 3802.00.02 3802.00.03 3802.01	a. Identifikasi dan pendayagunaan sumber daya b. Perbenihan c. Budidaya d. Pemberdayaan dan Kelembagaan 2 Tanaman rempah & penyegar		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3802.01.00 3802.01.01 3802.01.02 3802.01.03 3802.02	a. Identifikasi dan pendayagunaan sumber daya b. Perbenihan c. Budidaya d. Pemberdayaan dan Kelembagaan 3 Tanaman tahunan		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3802.02.00 3802.02.01 3802.02.02 3802.02.03 3802.03	a. Identifikasi dan pendayagunaan sumber daya b. Perbenihan c. Budidaya d. Pemberdayaan dan Kelembagaan 4 Perlindungan Perkebunan		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3802.03.00 3802.03.01	a. Identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim b. Identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3802.03.02	tanaman rempah dan penvegar c. Identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan					
	3802.03.03 3802.04	d. Dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran 5 Pascapanen dan pembinaan usaha		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3802.04.00 3802.04.01 3802.04.02 3802.04.03 3803 3803.00	a. Pascapanen tanaman semusim b. Pascapanen tanaman tahunan c. Bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan d. gangguan usaha dan penanganan konflik C. Holtikultura 1 Perlindungan Holtikultura		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3803.00.00 3803.00.01 3803.00.02 3803.00.03 3803.01	a. Perlindungan tanaman buah b. perlindungan tanaman sayuran dan tanaman obat c. Perlindungan tanaman florikultur d. Dampak iklim dan persvaratan teknis 2 Perbenihan Holtikultur		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3803.01.00 3803.01.01 3803.01.02 3804 3804.00	a. Penilaian Varietas b. Pengawasan Mutu Benih c. Budidaya dan Pascapanen Florikultura 3 PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN 1 Perluasan dan Pengelolaan Lahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3804.00.00 3804.00.01 3804.00.02	a. Basis Data Lahan - Identifikasi Lahan - Analisis dan Penilaian Data Lahan b. Pengendalian Lahan - Identifikasi dan Analisis Lahan - Rekomendasi Teknis pengendalian lahan c. Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan - Identifikasi dan Analisis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan. - Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.					
	3804.00.03	d. Perluasan Kawasan Tanaman Pangan - Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan. - Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan tanaman pangan. e. Perluasan Kawasan Hortikultura - Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura - Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura.					
	3804.01	2 Pengelolaan Air Irigasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3804.01.00 3804.01.01 3804.01.02 3804.01.03	a. Pengembangan Sumber Air - Air Permukaan - Air Tanah b. Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air - Pengembangan Jaringan - Optimasi Air c. Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup - Iklim - Konservasi Air dan Lingkungan Hidup d. Kelembagaan - Identifikasi Kelembagaan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3804.02	- Pengembangan Kelembagaan 3 Pembiayaan Pertanian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3804.02.00	a. Pembiayaan Program - Data dan Informasi pembiayaan program - Pendampingan dan Bimbingan Teknis pembiayaan program					
	3804.02.01	b. Pembiayaan Svariah dan Keria Sama - Pembiayaan Svariah - Keria Sama pembiayaan					
	3804.02.02	c. Pembiayaan Agribisnis - Materi dan Verifikasi pembiayaan agribisnis - Fasilitasi dan Pemantauan pembiayaan agribisnis					
	3804.02.03	d. Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis - Kelembagaan Agribisnis - Pemberdayaan Agribisnis					
	3804.03	4 Pupuk Pestisida	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3804.03.00	a. Pupuk Organik dan Pembenah Tanah - Tanaman Pangan - Hortikultura					
	3804.03.01	b. Pupuk Anorganik - Tanaman Pangan - Hortikultura					
	3804.03.02	c. Pestisida - Pestisida Kimia - Pestisida Havati					
	3804.03.03	d. Pengawasan Pupuk dan Pestisida - Pengawasan Pupuk - Pengawasan Pestisida					
	3804.04	5 Alat dan Mesin Pertanian	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3804.04.00	a. Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian - Tanaman Pangan dan Hortikultura					
	3804.04.01	b. Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian - Tanaman Pangan dan Hortikultura					
	3804.04.02	c. Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian - Kelembagaan - Pelayanan					
	3805 3805.00	D TANAMAN PANGAN 1 Perbenihan Tanaman Pangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3805.00.00	a. Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih - Penilaian Varietas - Pengawasan Mutu Benih					
	3805.00.01	b. Produksi Benih Sereal - Padi - Sereal Non Padi					
	3805.00.02	c. <u>Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi</u>					
	3805.00.03	- Aneka Kacang - Aneka Umbi d. Kelembagaan Benih - Kelembagaan Produksi - Kelembagaan Pengawasan					



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3805.01	2 Budidaya Serealia	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3805.01.00	a. Padi Irigasi dan Rawa					
		- Padi Irigasi					
		- Padi Rawa					
	3805.01.01	b. Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering					
		- Padi Tadah Hujan					
		- Padi Lahan Kering					
	3805.01.02	c. Jagung					
		- Intensifikasi Jagung					
		- Pengembangan Jagung					
	3805.01.03	d. Serealia Lain					
		- Intensifikasi Serealia Lain					
		- Pengembangan Serealia Lain					
	3805.02	3 Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3805.02.00	a. Kedelai					
		- Intensifikasi Kedelai					
		- Pengembangan Kedelai					
	3805.02.01	b. Ubi Kavu					
		- Intensifikasi Ubi Kavu					
		- Pengembangan Ubi Kavu					
	3805.02.02	c. Aneka Kacang					
		- Intensifikasi Aneka Kacang					
		- Pengembangan Aneka Kacang					
	3805.02.03	d. Aneka Umbi					
		- Intensifikasi Aneka Umbi					
		- Pengembangan Aneka Umbi					
	3805.03	4 Perlindungan Tanaman Pangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3805.03.00	a. Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan					
		- Monitoring dan Analisis Data organisme pengganggu tumbuhan					
		- Evaluasi dan Pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan					
	3805.03.01	b. Dampak Perubahan Iklim					
		- Adaptasi					
		- Mitigasi dampak perubahan iklim					
	3805.03.02	c. Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan					
		- Identifikasi teknologi pengendalian.					
		- Verifikasi teknologi pengendalian.					
	3805.03.03	d. Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu					
		- Pemasyarakatan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan.					
		- Kelembagaan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan.					
	3805.04	5 Pascapanen Tanaman Pangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3805.04.00	a. Padi					
		- Teknologi pascapanen padi					
		- Sarana pascapanen padi					
	3805.04.01	b. Jagung dan Serealia Lain					
		- Teknologi pascapanen jagung dan serealia lain					
		- Sarana pascapanen jagung dan serealia lain					
	3805.04.02	c. Kedelai dan Aneka Kacang					
		- Teknologi pascapanen kedelai dan aneka kacang					
		- Sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3805.04.03	d. Aneka Umbi - Teknologi pascapanen aneka umbi - Sarana pascapanen aneka umbi					
	3806 3806.00	E PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN 1 Pengolahan Hasil Pertanian	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3806.00.00	a. Tanaman Pangan - Serealialia - Aneka Kacang dan Aneka Umbi					
	3806.00.01	b. Hortikultura					
	3806.01	- Tanaman Buah dan Savuran - Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat 2 Mutu dan Standariasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3806.01.00	a. Standardisasi - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan					
	3806.01.01	b. Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan					
	3806.01.02	c. Akreditasi dan Kelembagaan - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan					
	3806.01.03	d. Kerjasama dan Harmonisasi - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan					
	3806.02	3 Pengembangan Usaha dan Investasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3806.02.00	a. Kemitraan dan Kewirausahaan - Kemitraan - Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif					
	3806.02.01	b. Investasi - Tanaman Pangan dan Hortikultura - Perkebunan dan Peternakan					
	3806.02.02	c. Promosi Dalam Negeri - Dava Saing - Eksibisi dan Ekspo					
	3806.02.03	d. Promosi Luar Negeri - Dava Saing - Eksibisi dan Ekspo					
	3806.03	4 Pemasaran Domestik	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3806.03.00	a. Informasi Pasar - Analisis Pasar - Deseminasi Informasi Pasar					
	3806.03.01	b. Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga - Pemantauan Pasar - Stabilisasi Harga					
	3806.03.02	c. Sarana dan Kelembagaan Pasar - Sarana Pasar - Kelembagaan Pasar					
	3806.03.03	d. Jaringan Pemasaran - Akses Pasar - Sarana Pemasaran					
	3807 3807.00	F Penelitian, Pengkaiian, dan Pengembangan Pertanian 1 Admininstrasi					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3807.01	2 Hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3807.01.00 3807.01.01 3807.02	a. Hasil Penelitian dan Pengembangan b. Hasil Pengkajian Kebijakan dan Strategi 3 Deseminasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3807.03	4 Publikasi hasil penelitian	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3807.03.00 3807.03.01 3807.04	a. Pameran, temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temukarva, Workshop b. Jurnal, Buletin, Monograf, Prosising dan Publikasi Lainnya 5 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3807.05	6 Forum Komunikasi Peneltian dan Pengembangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3807.06	7 Data penelitian dan pengembangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3807.07	8 Hak Atas kekayaan intelektual	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3807.07.00 3807.07.01 3807.07.02 3807.07.03 3807.07.04 3807.07.05 3807.07.06 3807.08	a. Hak cipta b. Hak Paten sederhana c. Hak merek d. Pendaftaran Varietas Tanaman e. Pemohonan Hak PVTT Tanaman Semusim f. Pemohonan Hak PVTT Tanaman Tahunan g. Permohonan HKI yang ditolak 9 Forum komunikasi penelitian dan pengembangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3808 3808.00	G Ketahanan Pangan 1 Ketersediaan dan kerawangan pangan		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3808.00.00 3808.00.01 3808.00.02 3808.01	a. Ketersediaan Pangan b. Akses Pangan c. Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi 2 Distribusi dan Cadangan Pangan		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3808.01.00 3808.01.01 3808.01.02 3808.02 3808.02.00	a. Distribusi Pangan b. Harga Pangan c. Cadangan Pangan 3 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan a. Konsumsi Pangan		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3808.02.01	b. Pengankaragaman Pangan		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3808.02.02	c. Keamanan Pangan Segar		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3808.03	4 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3808.03.00	a. Pengelolaan Lembaga Ketahanan Pangan					
	3808.03.01	b. Dewan Ketahanan Pangan					
	3808.03.02	c. Solid					
	3808.03.03	d. Penghargaan Ketahanan Pangan					
	3809	H Karantina Pertanian					
	3809.00	1 Data Karantina		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3809.00.00	a. Data Karantina Hewan					
	3809.00.01	b. Data Karantina Tumbuhan					
	3809.01	2 Inventariasi Penyakit		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3809.01.00	a. Inventariasi Penyakit Hewan					
	3809.01.01	b. Inventariasi Penyakit Tumbuhan					
	3809.02	3 Tindakan Karantina		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3809.02.00	a. Tindakan Karantina Hewan					
	3809.02.01	b. Tindakan Karantina Tumbuhan					
	3809.03	4 Sertifikasi Pelepasan karantina		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3809.03.00	a. Sertifikasi Pelepasan karantina Tumbuhan					
	3809.03.01	b. Sertifikasi Pelepasan karantina Hewan					
	3809.04	5 Pemberantasan Penyakit		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3809.04.00	a. Pemberantasan Penyakit Hewan					
	3809.04.01	b. Pemberantasan Penyakit Tumbuhan					
	3809.05	6 Keamanan Pangan		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3809.05.00	a. Pengawasan Keamanan PSAH					
	3809.05.01	b. Pengawasan Keamanan PSAT					
	3809.06	7 Tertib Operasional		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3809.06.00	a. Tertib Operasional Karantina Hewan					
	3809.06.01	b. Tertib Operasional Karantina Tumbuhan					
	3810	I Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
XXXIX.	3810.00	1 Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Perumahan dan KP Prov. Sulbar
	3810.00.00	a. Permohonan Perlindungan Varietas Tanaman		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	Distanak Prov. Sulbar	
	3810.00.01	b. Pengujian Perlindungan Varietas Tanaman					
	3810.00.02	c. Pendaftaran Varietas Sumber Dava Genetik Tanaman					
	3810.01	2 Pelayanan Perijinan Pertanian					
	3810.01.00	a. Perjinan Sarana I		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Perumahan dan KP Prov. Sulbar	
	3810.01.01	b. Perjinan Sarana II					
	3810.01.02	c. Perinnan Sarana III					
	3900	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Perumahan dan KP Prov. Sulbar	
	3900.00	A Perumusan Kebijakan Teknis dan Strategi Perumahan Rakyat meliputi: Penyediaan Perumahan, Pembiayaan Perumahan, dan Kawasan Permukiman					
		1 Pengkaiian dan pengusulan kebiiaan					
		2 Penviapan kebiiaan					
		3 Perumusan kebiiaan dan penvusunan bahan					
		4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penvusunan kebiiaan		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Perumahan dan KP Prov. Sulbar	
		5 Penetapan dalam bentuk NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)					
	3901	B Penvediaan Perumahan					
	3901.00	1 Perencanaan Penyediaan Perumahan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Perumahan dan KP Prov. Sulbar	
	3901.00.00	a. Keterpaduan Perencanaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Perumahan dan KP Prov. Sulbar	
	3901.00.01	b. Bimbingan Perencanaan					
	3901.01	2 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Perumahan dan KP Prov. Sulbar	
3901.01.00	a. Skala Besar	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Perumahan dan KP Prov. Sulbar		
3901.01.01	b. Bukan Skala Besar						
3901.02	3 Kemitraan dan kelembagaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Perumahan dan KP Prov. Sulbar		
3901.02.00	a. Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Perumahan dan KP Prov. Sulbar		
3901.02.01	b. Pembinaan Kelembagaan						
3901.03	4 Pengelolaan Data dan Informasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Perumahan dan KP Prov. Sulbar		
3901.04	5 Penyediaan Rumah Susun	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Perumahan dan KP Prov. Sulbar		
3901.04.00	a. Analisa Teknik	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Perumahan dan KP Prov. Sulbar		
3901.04.01	b. Penvusunan Rencana						
3901.04.02	c. Bimbingan Teknis dan Supervisi						
3901.04.03	d. Penghunian						
3901.04.04	e. Pengelolaan						



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	3903.01.01 3903.01.02  3903.02 3903.02.00	b. Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan c. Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan 3 Kawasan Permukiman Khusus a. Pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Prov. Sulbar Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Perumahan dan KP	



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
XL.	3903.02.01	b. Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	Dinas Perumahan dan KP Prov. Sulbar	
	3903.02.02	c. Fasilitasi penyediaan tanah, implementasi inovasi dan pengembangan jaringan kemitraan					
	3903.03	4 Standarisasi dan Kelembagaan					
	3903.03.00	a. Standarisasi Pengembangan Kawasan Permukiman					
	3903.03.01	b. Kelembagaan, sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat					
	4000	POLISI PAMONG PRAJA	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	SATPOLPP & PK Prov. Sulbar	
	4000.00	A Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja					
	4000.00.00	1 fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional polisi pamong praia					
	4000.00.01	2 standarisasi sarana prasarana polisi pamong praia a. fasilitasi data pengajuan DAK b. koordinasi c. pembinaan dan pengawasan d. monitoring dan evaluasi					
	4000.01	B Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	SATPOLPP & PK Prov. Sulbar	
	4000.01.00	1 fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyusunan program peningkatan kapasitas aparaturnya polisi pamong praia					
	4000.01.01	2 fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan evaluasi peningkatan kapasitas aparaturnya polisi pamong praia					
	4000.02	C Perlindungan Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	SATPOLPP & PK Prov. Sulbar	
	4000.02.00	1 fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masvarakat					
	4000.02.01	2 fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparaturnya dan kelembagaan perlindungan masyarakat					
	4000.03	D Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	SATPOLPP & PK Prov. Sulbar	
	4000.03.00	1 fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil					
	4000.03.01	2 fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan dan evaluasi administrasi aparaturnya penyidik pegawai negeri sipil					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
XLI.	4000.04	E Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	SATPOLPP & PK Prov. Sulbar	
	4000.04.00	1 fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia					
	4000.04.01	2 fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi konvensi internasional					
	4100	SOSIAL					
	4100.00	A Kebijakan Kebijakan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan.	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DINSOS Prov. Sulbar	
	4100.00.00	1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan					
	4100.00.01	2 Penyiapan kebijakan					
	4100.00.02	3 Perumusan kebijakan					
	4100.00.03	4 Masukan dan dukungan kebijakan					
	4100.00.04	5 Penetapan NSPK					
	4101	B Rehabilitasi Sosial					
	4101.00	1 Kesejahteraan sosial anak					
	4101.00.00	a. Kesejahteraan Sosial Anak Balita	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DINSOS Prov. Sulbar	
		- Pengangkatan Anak					
		- Pengasuhan Anak Balita					
	4101.00.01	b. Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DINSOS Prov. Sulbar	
	- Pengasuhan Anak dalam Keluarga						
	- Pengasuhan Anak dalam Lembaga						
4101.00.02	c. Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DINSOS Prov. Sulbar		
	- Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum						
	- Pengembangan Remaja						
4101.00.03	d. Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DINSOS Prov. Sulbar		
	- Kelembagaan dan Penguatan Keluarga						
	- Aksesibilitas Anak dengan Kecacatan						

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	4101.00.04	e. Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DINSOS Prov. Sulbar	
	4101.01 4101.01.00	2 Rehabilitasi Sosial a. Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DINSOS Prov. Sulbar	
	4101.01.01	- Kelembagaan Perlindungan Anak - Advokasi dan Perlindungan Khusus b. Kelembagaan dan advokasi sosial	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DINSOS Prov. Sulbar	
	4101.01.02	c. Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DINSOS Prov. Sulbar	
	4101.02 4101.02.00	3 Rehabilitasi sosial tuna sosial a. Gelandangan, pengemis dan pemulung	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DINSOS Prov. Sulbar	
	4101.02.01	b. Tuna susila dan korban trafficking perempuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	DINSOS Prov. Sulbar	
	4101.02.02	c. Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	DINSOS Prov. Sulbar	
	4101.02.03	- Penyiapan - Reintegrasi d. Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	DINSOS Prov. Sulbar	



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	4102.01.03	4 Perlindungan sosial korban bencana alam a. Kesiapsiagaan dan mitigasi b. Tanggap darurat - Bantuan darurat - Advokasi Sosial c. Pemulihan sosial dan penguatan sosial d. Keria sama - Keria sama pemerintah - Keria sama Non Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DINSOS Prov. Sulbar	
	4102.01.04	5 Jaminan sosial a. Seleksi dan verifikasi b. Asuransi kesejahteraan sosial - Kelembagaan - Pengelolaan premi c. Bantuan langsung dan tunjangan berkelaniutan - Pendampingan - Penyaluran d. Keria sama - Keria sama pemerintah - Keria sama Non Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DINSOS Prov. Sulbar	
	4103	D Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan					
	4103.00	1 Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DINSOS Prov. Sulbar	
	4103.00.00	a. Ketahanan keluarga - Bimbingan kesejahteraan sosial keluarga - Konsultasi dan advokasi keluarga					
	4103.00.01	b. Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan					
	4103.00.02	c. Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial					
	4103.00.03	d. Kemitraan dunia usaha - Keria sama - Bimbingan Sosial					
	4103.00.04	e. Karang Taruna - Kelembagaan - Pengembangan Kapasitas					
	4103.01	2 Pemberdayaan komunitas adat terpencil	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DINSOS Prov. Sulbar	
	4103.01.00	a. Persiapan pemberdayaan - Identifikasi - Analisis					
	4103.01.01	b. Pemberdayaan sumber daya manusia - Pemberdayaan sumber daya manusia adat terpencil - Pemberdayaan pendamping sosial komunitas adat terpencil					
	4103.01.02	c. Penggalian dan pengembangan potensi - Penggalian potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan - Pengembangan potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan					
	4103.01.03	d. Keresasian dan penguatan komunitas adat terpencil - Keresasian sosial - penguatan sosial					
	4103.01.04	e. Keria sama kelembagaan - Keria sama kelembagaan - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan					
	4103.02	3 Penanggulangan kemiskinan perkotaan dan Perdesaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DINSOS Prov. Sulbar	
	4103.02.00	a. Identifikasi dan analisis					
	4103.02.01	b. Pengembangan kapasitas - Pengembangan kapasitas sumber daya manusia - Pengembangan kapasitas usaha					
	4103.02.02	c. Penataan sosial lingkungan kumuh - Bimbingan sosial - Pengembangan lingkungan sosial					
	4103.02.03	d. Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas - Advokasi sosial - Pengembangan aksesibilitas					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
XLII.	4103.03	4 Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DINSOS Prov. Sulbar	
	4103.03.00	a. Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan					
		- Pengangkatan					
		- Penghargaan					
		- Kesejahteraan					
	4103.03.01	b. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan					
		- Identifikasi					
		- Pendayagunaan					
	4103.03.02	c. Pengembangan kesetiakawanan sosial					
		- penggalan nilai					
		- Pelestarian nilai					
	4103.03.03	d. Pengelolaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
		- Pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama					
		- Standardisasi taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional					
	<b>XLII. 4200</b>	<b>TENAGA KERJA</b>					
	4200.00	A PERUMUSAN KEBIJAKAN					
		Kebijakan di bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja.					
	4200.00.00	1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan					
	4200.00.01	2 Penyiapan bahan					
	4200.00.02	3 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan					
	4200.00.03	4 Pengumpulan dan pengolahan data					
	4200.00.04	5 Penetapan dalam bentuk pengaturan berupa norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK)					
	4201	B PERENCANAAN TENAGA KERJA	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
	4201.00	1 Perencanaan Tenaga Kerja Makro					
	4201.00.00	a. Perencanaan Tenaga Kerja Nasional					
		- Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional					
		- Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	4201.00.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional</li> <li>b. Perencanaan Tenaga Kerja Daerah               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah</li> <li>- Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah</li> </ul> </li> <li>- Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah</li> </ul>					
	4201.01	2 Perencanaan Tenaga Kerja Mikro	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
	4201.01.00	a. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah</li> <li>- Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah</li> <li>- Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah</li> </ul>					
	4201.01.01	b. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Swasta</li> <li>- Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta</li> <li>- Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta</li> </ul>					
	4202	C PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS					
	4202.00	1 Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan					
	4202.00.00	a. Pengembangan Standarisasi Kompetensi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan Standar Kompetensi</li> <li>- Bimbingan Penerapan Standar Kompetensi</li> <li>- Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pelatihan Ketenagakerjaan</li> <li>- Penyusunan Materi Pelatihan Ketenagakerjaan</li> </ul> </li> <li>- Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan</li> <li>- Penyusunan Materi Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan</li> </ul> </li> <li>- Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pelatihan Ketransmigrasian</li> <li>- Penyusunan Materi Pelatihan Ketransmigrasian</li> </ul> </li> </ul>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	

1 NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	4202.00.01	b. Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan</li> <li>- Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja</li> <li>- Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan</li> <li>- Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan</li> <li>- Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan</li> <li>- Bimbingan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas</li> <li>- Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan</li> <li>- Standar Mutu Lembaga Pelatihan</li> <li>- Bimbingan Penerapan Standar Mutu</li> <li>- Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga</li> <li>- Sistem Pendanaan Pelatihan</li> <li>- Kerjasama Antar Lembaga</li> </ul>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
	4202.00.02	c. Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah</li> <li>- Peningkatan Kompetensi Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah</li> <li>- Pengembangan Karir Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah</li> <li>- Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta</li> <li>- Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta</li> <li>- Pengembangan Karir Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta</li> <li>- Tenaga Pelatihan</li> <li>- Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan</li> <li>- Pengembangan Karir Tenaga Pelatihan</li> <li>- Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan</li> <li>- Registrasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan</li> <li>- Penyebaran Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan</li> </ul>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
	4202.00.03	d. Bina Pemagangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemagangan Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pemagangan Dalam Negeri</li> <li>- Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Dalam Negeri</li> </ul> </li> <li>- Pemagangan Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pemagangan Luar Negeri</li> <li>- Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Luar Negeri</li> </ul> </li> <li>- Perizinan dan Advokasi Pemagangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perizinan dan Rekomendasi</li> <li>- Advokasi dan Perlindungan</li> </ul> </li> <li>- Promosi dan Jenjang Pemagangan</li> <li>- Promosi dan Sistem Informasi Pemagangan</li> <li>- Pemagangan Jejaring Pemagangan</li> </ul>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
	4202.00.04	e. Produktivitas dan Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan</li> <li>- Promosi Produktivitas dan Kewirausahaan</li> <li>- Kerjasama Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan</li> <li>- Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem dan Metode Produktivitas</li> <li>- Alat dan Teknik Peningkatan Produktivitas</li> </ul> </li> <li>- Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengukuran Produktivitas</li> <li>- Kajian Produktivitas</li> </ul> </li> <li>- Pengembangan Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Manajemen Kewirausahaan</li> <li>- Bimbingan Konsultasi</li> </ul> </li> </ul>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
	4203 4203.00 4203.00.00 4203.00.01	D PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA 1 Pengembangan Pasar Kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi Pasar Kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi Pasar Kerja Dalam Negeri</li> <li>- Informasi Pasar Kerja Luar Negeri</li> </ul> </li> <li>b. Analisis Pasar Kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri</li> </ul> </li> </ul>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	4203.00.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Pasar Kerja Luar Negeri</li> <li>c. Bursa Kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bursa Kerja Dalam Negeri</li> <li>- Bursa Kerja Luar Negeri</li> </ul> </li> <li>d. Analisis Jabatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis dan Informasi Jabatan</li> <li>- Pengembangan Sistem Analisis Jabatan</li> </ul> </li> </ul>					
	4203.01	2 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
	4203.01.00	a. Antar Kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) /Antar Kerja Lokal (AKL)</li> <li>- Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja</li> </ul>					
	4203.01.01	b. Penempatan Tenaga Kerja Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penempatan Tenaga Kerja Khusus Muda dan Wanita</li> <li>- Penempatan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Cacat dan Lansia</li> </ul>					
	4203.01.02	c. Penvuluhan dan Bimbingan Jabatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penvuluhan Jabatan</li> </ul>					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	4203.01.03	- Bimbingan Jabatan d. Pemberdavaan Pengantar Kerja - Pengembangan Kompetensi Pengantar Kerja - Kerjasama antar Lembaga					
	4203.02	3 Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
	4393.02.00	a. Kelembagaan Penempatan - Perizinan Kelembagaan - Evaluasi Kinerja					
	4393.02.01	b. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) - Penyiapan dan Dokumen Penempatan TKI - Fasilitasi Penvediaan TKI					
	4393.02.02	c. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia - Advokasi dan Kepulangan - Sarana dan Perlindungan					
	4393.02.03	d. Kerjasama Internasional - Kerjasama Bilateral - Kerjasama Regional dan Multilateral					
	4203.03	4 Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
	4203.03.00	a. Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal - Tenaga Kerja Mandiri - Tenaga Kerja Sektor Informal					
	4203.03.01	b. Pengembangan Padat Karva - Padat Karva Perdesaan - Padat Karva Perkotaan					
	4203.03.02	c. Terapan Teknologi Tepat Guna - Pengembangan Teknologi Tepat Guna - Penvebarluasan Teknologi Tepat Guna					
	4203.03.03	d. Pemberdavaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga - Pemberdavaan Pendampingan - Kerjasama Antar Lembaga					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	4203.04 4203.04.00	5 Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing a. Analisis dan Perizinan Sektor Industri - Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri - Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
	4203.04.01	b. Analisis dan Perizinan Sektor Jasa - Rencana Pembangunan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa - Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa					
	4203.04.02	c. Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan - Pengendalian - Kerjasama Kelembagaan					
	4203.05 4203.05.00	6 Standardisasi Profesi a. Sistem Informasi dan Registrasi - Dokumen yang berhubungan dengan sistem informasi dan registrasi - Dokumen yang berhubungan dengan Sertifikasi kompetensi kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
	4203.05.01	b. Pembakuan Akreditasi - Dokumen yang berhubungan dengan kompetensi dan akreditasi kelembagaan sertifikasi - Dokumen yang berhubungan dengan penyelenggaraan konvensi dan persidangan					
	4204 4204	E PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA					
	4204.00.00	1 Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi a. Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama - Peraturan Perusahaan - Perjanjian Kerja Bersama	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
	4204.00.01	b. Perjanjian Kerja					
	4204.00.02	c. Kesejahteraan Pekerja - Program Kesejahteraan - Fasilitas Kesejahteraan					
	4204.00.03	d. Analisis Diskriminasi Svarat Kerja - Penanggulangan Diskriminasi Svarat Kerja - Evaluasi Diskriminasi Svarat Kerja					
	4204.01 4204.01.00	2 Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial a. Organisasi Pekerja dan Pengusaha - Organisasi Pekerja - Organisasi Pengusaha	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
	4204.01.01	b. Kelembagaan Hubungan Industrial - Lembaga Kerjasama BIPARTIT - Lembaga Kerjasama TRIPARTIT					
	4204.01.02	c. Pemasyarakatan Hubungan Industrial					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan Masyarakat Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial</li> <li>- Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial</li> </ul>					
	4204.02 4204.02.00	3 Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial					
		a. Pengupahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
	4204.02.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan Standar Pengupahan</li> <li>- Pengurusan Pengupahan</li> </ul>					
		b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
	4204.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurusan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja</li> <li>- Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja</li> </ul>					
		4 Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
	4204.03.00	a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan Dini</li> <li>- Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan</li> </ul>					
	4204.03.01	b. Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial</li> <li>- Evaluasi dan Pelaporan</li> </ul>					
	4204.03.02	c. Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Hubungan Industrial</li> <li>- Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan</li> </ul>					
	4205 4205.00	F PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					
		1 Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
	4205.00.00	a. Pengawasan Norma Kerja					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat</li> <li>- Pengawasan Norma Pengupahan</li> </ul>					
	4205.00.01	b. Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Norma Hubungan Kerja</li> <li>- Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat</li> </ul>					
	4205.00.02	c. Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	4205.01	- Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Negeri - Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri - Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek					
	4205.01.00	2 Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
	4205.01.01	a. Pengawasan Norma Kerja Perempuan - Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi - Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan					
	4205.01.02	b. Pengawasan Norma Kerja Anak - Pengawasan Norma Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak - Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Anak					
	4205.01.03	c. Kerjasama Lintas Sektoral - Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Perempuan - Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Anak					
	4205.02	d. Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak - Advokasi Tenaga Kerja Perempuan - Advokasi Tenaga Kerja Anak					
	4205.02.00	3 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
	4205.02.01	a. Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan - Pengawasan Norma Mekanik - Pengawasan Norma Pesawat Uap dan Bejana Tekan					
	4205.02.02	b. Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran - Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan - Pengawasan Norma Listrik dan Penanggulangan Kebakaran					
	4205.02.03	c. Pengawasan Norma Kesehatan Kerja - Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja - Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja					
	4205.02.04	d. Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya - Pengawasan Norma Lingkungan Kerja - Pengawasan Norma Bahan Berbahaya					
		e. Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3 - Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K3 - Pengawasan Norma Sistem Manajemen K3					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	4205.03	4 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
	4205.04 4205.04.00	5 Bina Penegakan Hukum a. Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
	4205.04.01	- Teknis Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan - Penindakan Norma Ketenagakerjaan b. Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
	4205.04.02	- Teknis Penvedikan Norma Ketenagakerjaan - Administrasi Penyidikan Norma Ketenagakerjaan c. Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
	4205.04.03	- Pemberdavaan PPNS - Sarana dan Prasarana PPNS d. Kerjasama Penegakan Hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
	4206 4206.00	G KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 1 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
	4206.00.01	a. Pengkajian K3 - Analisis dan Standardisasi bidang K3 - Hasil kajian, perekrayaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3 - Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3					
	4206.01	b. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3					
	4206.01.00	2 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 a. SDM K3 - Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 - Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISNAKER Prov. Sulbar	
	4206.01.01	b. Kompetensi K3 - Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
XLIII.	4300	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3</li> <li>- Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3</li> <li>- Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3</li> </ul>					
		<b>TRANSMIGRASI</b>					
		A PERUMUSAN KEBIJAKAN	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISTRANS Prov. Sulbar	
		Kebijakan di bidang Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masvarakat.					
		1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan					
		2 Penyiapan bahan					
		3 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan					
		4 Pengumpulan dan pengolahan data					
		5 Penetapan dalam bentuk pengaturan berupa norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK)					
		B PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	DISTRANS Prov. Sulbar	
		1 Perencanaan Teknis Pembangunan Kawasan Transmigrasi					
		a. Perencanaan Kawasan					
		b. - Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi					
		- Perencanaan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT)/Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT)					
		c. Perencanaan Teknis Permukiman					
		- Perencanaan Teknis Satuan Kawasan Pengembangan					
		- Perencanaan Teknis Satuan Permukiman					
		d. Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana					
		- Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman					
		- Perencanaan Teknis Infrastruktur Kawasan					
		e. Perencanaan Sumber Daya Manusia					
		- Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia					
		- Penataan Persebaran					
		2 Penyediaan Tanah Transmigrasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	DISTRANS Prov. Sulbar	
		a. Fasilitas Pengadaan Tanah					
		- Identifikasi Status dan Penggunaan Tanah					
		- Pengurusan Status Tanah					
		b. Pengurusan Legalitas Tanah					
		- Pengurusan Hak Pengelolaan Tanah					
		- Pengurusan Hak Milik Atas Tanah					
		c. Dokumentasi Pertanahan					
		- Pengumpulan dan Pengolahan Data Pertanahan					
		- Penyediaan Informasi Pertanahan					
		d. Advokasi Pertanahan					
		- Identifikasi Kasus Pertanahan					
		- Rekognisi dan Kompensasi					
		3 Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	DISTRANS Prov. Sulbar	
		a. Penyiapan Lahan					
		- Bina Teknis Penyiapan Lahan					
		- Evaluasi Penyiapan Lahan					
		b. Penyiapan Sarana					
		- Bina Teknis Penyiapan Sarana					
		- Evaluasi Penyiapan Sarana					
		c. Penyiapan Prasarana					
		- Bina Teknis Penyiapan Sarana					
		- Evaluasi Penyiapan Prasarana					
		d. Evaluasi Kelayakan Permukiman					
		- Bina Teknis Kelayakan Permukiman					
		- Penilaian Kelayakan Permukiman					
		4 Fasilitas Penempatan Transmigrasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	DISTRANS Prov. Sulbar	
		a. Penyiapan Calon Transmigrasi					
		- Pendaftaran dan Seleksi					
		- Keterampilan Calon Transmigrasi					
		b. Penyiapan Perpindahan					
		- Penyerahan Perpindahan					
		- Administrasi Perpindahan					
		c. Pelaksanaan Perpindahan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	4301.03.03	- Penampungan - Pengangkutan d. Penataan dan Adaptasi - Penataan Persebaran - Adaptasi					
	4301.04	5 Partisipasi Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISTRANS Prov. Sulbar	
	4301.04.00	a. Promosi dan Motivasi - Promosi - Motivasi					
	4301.04.01	b. Kerjasama Kelembagaan - Kerjasama Lembaga Pemerintah - Kerjasama Lembaga Non Pemerintah					
	4301.04.02	c. Kerjasama Antar Daerah - Mediasi Kerjasama Antar Daerah - Pelayanan Kerjasama Antar Daerah					
	4301.04.03	d. Pelayanan Investasi - Pelayanan Aplikasi Investasi - Evaluasi Pelaksanaan Investasi					



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	4302	C PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
	4302.00	1 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Sulbar	DISTRANS Prov. Sulbar	
	4302.00.00	a. Bina Sistem Informasi					
		- Sistem Informasi Permukiman					
		- Sistem Informasi Kawasan					
	4302.00.01	b. Perencanaan Pengembangan Kawasan					
		- Penataan Ruang dan Infrastruktur Kawasan					
		- Pengembangan Sosial dan Ekonomi					
	4302.00.02	c. Perencanaan Pengembangan Masyarakat					
		- Pengembangan Usaha Ekonomi					
		- Pengembangan Sosial Budaya					
	4302.00.03	d. Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan					
		- Penataan Ruang dan Infrastruktur Pusat Pertumbuhan					
		- Pengelolaan Kelembagaan Sosial dan Ekonomi					
	4302.01	2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISTRANS Prov. Sulbar	
	4302.01.00	a. Bantuan Pangan dan Kesehatan					
		- Penediaan Bantuan Pangan					
		- Penediaan Bantuan Kesehatan					
	4302.01.01	b. Fasilitas Sosial Budaya					
		- Pendidikan dan Seni Budaya					
		- Mental Spiritual					
	4302.01.02	c. Pengembangan Kelembagaan					
		- Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat					
		- Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kawasan Transmigrasi					
	4302.01.03	d. Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi					
		- Penediaan Tenaga Pendamping Non PNS					
		- Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping Non PNS					
	4302.02	3 Pengembangan Usaha	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISTRANS Prov. Sulbar	
	4302.02.00	a. Kewirausahaan					
		- Pembangunan Usaha Mandiri					
		- Pelayanan Investasi dan Kemitraan					
	4302.02.01	b. Produksi					
		- Tanaman Pangan					
		- Non Tanaman Pangan					
	4302.02.02	c. Pengolahan Hasil dan Pemasaran					
		- Pengolahan Hasil					
		- Pemasaran					
	4302.02.03	d. Lembaga Ekonomi dan permodalan					
		- Penguatan Kelembagaan					
		- Kerjasama Kelembagaan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7
	4302.03	4 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISTRANS Prov. Sulbar	
	4302.03.00	a. Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana					
		- Analisis dan Standarisasi Sarana					
		- Analisis dan Standarisasi Prasarana					
	4302.03.01	b. Pengembangan Sarana					
		- Bina Perencanaan Teknis Sarana					
		- Bina Pelaksanaan Sarana					
	4302.03.02	c. Pengembangan Prasarana					
		- Bina Perencanaan Teknis Prasarana					
		- Pemantauan Pengembangan Sarana dan Prasarana					
	4302.03.03	d. Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana					
		- Pemantauan Pengembangan Sarana dan Prasarana					
		- Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana					
	4302.04	5 Penyerasian Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Prov. Sulbar	DISTRANS Prov. Sulbar	
	4302.04.00	a. Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan					
		- Persiapan Pengelolaan Lingkungan					
		- Pemantauan Lingkungan					
	4302.04.01	b. Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan					
		- Adaptasi Lingkungan					
		- Mitigasi Lingkungan					
	4302.04.02	c. Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi					
		- Pemantauan Perkembangan Permukiman Transmigrasi					
		- Pengalihan Status Pembinaan Permukiman Transmigrasi					
	4302.04.03	d. Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan					
		- Analisis Perkembangan Pusat Pertumbuhan					
		- Pemantauan Perkembangan Pusat Pertumbuhan					

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. : 19750630 200212 1 010